LAPORAN AKHIR

PENELITIAN DANA PNBP FAKULTAS ILMU SOSIAL

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TERDAFTAR
JUDUL : EKSISTENSI ORGANISASI ETNIS TIONGHOA DI KOTA PADANG JEJAK...
P... Dr. ERNIWATI, S.S. M. Hum, dkk
JE... LAPORAN PENELITIAN
N... 33/UN.35.15/PK/KI 2020
T... 27 FEBRUARI 2020
UNIVERSITAS NEGERI PADANG UNP
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG UPT PERPUSTAKAAN
NIP 196...1104 ...

EKSISTENSI ORGANISASI ETNIS TIONGHOA DI KOTA PADANG JEJAK PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA HINGGA REFORMASI

Oleh :

Dr. Erniwati, SS, M.Hum

Ike Sylvia, S.IP,M.Si

DIBIAYAI OLEH

DIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN DOSEN MADYA

MELALUI PNBP FAKULTAS ILMU SOSIAL DIPA UNP TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : 4605/UN35.1.6/PG/2014

TANGGAL 22 SEPTEMBER 2014

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN DANA PNBP FAKULTAS ILMU SOSIAL

Judul Penelitian	:	**Eksistensi Organisasi Etnis Tionghoa di Kota Padang Jejak Pemerintahan Kolonial Belanda hingga Reformasi**
Ketua Peneliti	:	
A. Nama Lengkap	:	Dr. Erniwati, SS, M.Hum
B. NIDN/NIP	:	0006047104/19710406 199802 2 001
C. Jabatan Fungsional	:	Lektor /Penata /III/c
D. Program Studi	:	Pendidikan Sejarah
E. Nomor HP	:	081294221340
F. Surel (e-mail)	:	erniwati_nur@ymail.com
Anggota Peneliti		
A. Nama Lengkap	:	Ike Sylvia, S.IP, M.Si
B. NIDN/NIP	:	19770608 200501 2 002
C. Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Padang
Lama Penelitian	:	5 Bulan
Lokasi Penelitian	:	Padang Panjang dan Padang
Biaya Penelitian	:	Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Mengetahui
Dekan FIS UNP;

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP.196210011989031002

Padang, November 2014
Ketua Peneliti

Dr. Erniwati, SS, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian UNP,

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 196107221986021002

PENGANTAR

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian internal dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik yang secara lansung dibiayai dengan dana Universitas Negeri Padang, BOPTN maupun dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerja sama dengan Pimpinan Fakultas telah mendanai skema **Penelitian Dosen Madya** yang berjudul ***Eksistensi Organisasi Etnis Tionghoa di Kota Padang Sejak Pemerintahan Kolonial Belanda Hingga Reformasi*** atas nama Dr. ERNIWATI, SS, M.Hum, yang dibiayai oleh DIPA Universitas Negeri Padang melalui PNBP Fakultas Ilmu Sosial UNP sesuai surat penugasan pelaksanaan penelitian desentralisasi Nomor: 4607/UN35.1.6/PG/2014 tanggal 22 September 2014.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut diatas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan hasil penelitian. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim pereviu Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Dekan FIS Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2014
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, sang pemilik seluruh alam. Shalawat dan salam pada junjungan kita nabi Muhammad SAW, sang pemberi petunjuk kehidupan yang lurus. Penelitian tentang Eksistensi Organisasi Etnis Tionghoa Di Kota Padang Jejak Pemerintahan Kolonial Belanda Hingga Reformasi rampung dilaksanakan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Penelitian Sejarah tentang Eksistensi Organisasi Etnis Tionghoa Di Kota Padang Jejak Pemerintahan Kolonial Belanda Hingga Reformasi ini dilakukan berawal dari keprihatinan penulis akan minimnya pengetahuan civitas akademika, terutama para siswa dan guru, juga para Mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilakukan oleh dua orang tim peneliti yakni Dr. Erniwati, SS, M.Hum sebagai ketua penelitian dan Ike Sylvia, S.IP, M.Si sebagai anggota penelitian. Penelitian ini dibiayai oleh DIPA UNP Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Skema Penelitian Dosen Madya melalui PNBP FIS DIPA UNP tahun Anggaran 2014 Nomor: 4605/UN35.1.6/PG/2014 Tanggal 22 September 2014.

Akhirukalam, semoga hasil penelitian ini mampu memberi manfaat pada pembacanya.

Padang, November 2014

Tim Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Berdasarkan Temuan Penelitian	6
B. Pendekatan Teoritis	9
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	13
B. Teknik Pengumpulan Data	14
C. Jadwal Penelitian	17
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Padang Tempo Dulu	18
B. Kedatangan Berbagai Etnis di Padang	23
C. Etnis Tionghoa Padang	27
1. Terbentuknya Komunitas Tionghoa Padang	27
2.Kebudayaan Kampung Pondok	35
D. Organisasi Tionghoa Padang	38
1.Berakar dari Tradisi Hung dan Kongsi	38
2.Organisasi Tionghoa Padang	45
E. Peranan Organisasi Tionghoa Padang	53
1. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda	53
2. Masa Pendudukan Jepang	60
3. Setelah Kemerdekaan	63

BAB V PENUTUUP 96
DAFTAR PUSTAKA 101
DAFTAR PETA 29
BAGAN 32
FOTO 1 59
FOTO 2 DAN 3 93

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Keberadaan etnis Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif. Pengalaman sejarah Indonesia menjadikan etnis Tionghoa berada pada posisi yang tidak menentu. Mereka dihadapkan pada kondisi politik negara yang dapat mempengaruhi eksistensinya dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini berlaku hampir di seluruh kota di Indonesia, termasuk etnis Tionghoa yang tinggal di kota Padang. Selain politik negara, Padang dalam konteks ruang sebagai salah satu lokalitas tempat etnis Tionghoa tinggal juga memiliki peranan yang penting dalam proses pembentukan identitas penduduk yang mendiaminya. Proses interaksi dan sosialisasi dengan masyarakat setempat memberikan warna tersendiri bagi etnis Tionghoa Padang. Dominasi penduduk dengan budaya Minangkabau tercermin dalam kehidupan sehari-hari kota.[1] Yang menarik disini adalah kemampuan etnis Tionghoa (1,90 % dari keseluruhan jumlah penduduk) beradaptasi dan berkembang di tengah masyarakat Minangkabau (90,07% dari keseluruhan jumlah penduduk) yang berorientasi ke agama Islam, adat istiadat yang kuat mengenai sistem kepemilikan tanah, dan keahliannya dalam berdagang.[2] Bahkan sepanjang sejarah, tidak ditemukan adanya konflik antar etnis di kota Padang, terutama konflik antar etnis

---

[1] Ketegasan budaya dan adat istiadat Minangkabu terhadap nilai-nilai yang dianut menyebabkan tidak mudah untuk menyatakan diri sebagai orang Minangkabau. Mina Elfira mengatakan bahwa "Bila seorang Minangkabau sudah tidak Muslim lagi, maka Minangnya akan hilang". Pentingnya agama tertuang di dalam pandangan hidup orang Minangkabau, yaitu "Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah" . Lihat lebih lanjut Mina Elfira, " Not Muslim, Not Minangkabau" Interrelious Marriage and its Cultural Impact in Minangkabau Society", in Gavin W Jones, Chee Heng Leng, and Maznah Mohamad (ed), *Muslim-NoMuslim: Marriage Political and Cultural Conteations in Southeast Asia*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009, hlm. 161.

[2] J.S. Furnivall mengatakan, bahwa orang Minangkabau termasuk di antara sedikit kelompok Indonesia yang tidak kalah dari etnis Tionghoa dalam hal keahliannya berdagang. Pandangan Furnivall ditemukan dalam kehidupan masyarakat kota Padang yang terbukti dengan adanya kompetisi yang tinggi antara pedagang dari etnis Minangkabau dengan pedagang dari etnis Tionghoa. Kompetisi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari antara ke dua kelompok pedagang tersebut. Yang menarik adalah bahwa kompetisi yang terjadi tidak memicu konflik seperti yang terjadi di kota lainnya di Indonesia. Lihat lebih lanjut J.S. Furnivall, Netherlands Indie: *A Study of Plural Economy,* London: Cambrige University Press, 1967, hlm. 47.

Minangkabau dengan etnis pendatang lainnya, termasuk dengan etnis Tionghoa.

Pengalaman buruk bagi sebagian etnis Tionghoa di beberapa kota di Indonesia tidak dialami oleh etnis Tionghoa Padang, termasuk saat peristiwa Mei 1998. Sepanjang Reformasi bahkan tidak ditemukan tindak kekerasan dan kriminal yang menjadikan etnis Tionghoa Padang sebagai sasaran kekerasan, seperti yang terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Medan, maupun kota lainnya. Fenomena Nasional yang menjadikan etnis Tionghoa sebagai sasaran untuk mengungkapkan kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, krisis ekonomi, dan kekacauan politik tidak dialami oleh etnis Tionghoa Padang. Sebaliknya, ketika massa dari luar kota Padang mencoba memanfaatkan kondisi dengan merusak beberapa rumah, toko, perkantoran, dan mencoba menjarah pemukiman etnis Tionghoa pada tanggal 15 Mei 1998, perlindungan diberikan oleh organisasi Tionghoa, masyarakat sekitarnya, dan aparat keamanan yang langsung berkoordinasi dengan pimpinan organisasi marga dan organisasi sosial, budaya, dan kematian yang ada di kota Padang.[3] Kenyataan ini menunjukkan bahwa walaupun di sekitar pemukiman etnis Tionghoa dalam suasana mencekam, namun dari tidak adanya korban akibat demonstrasi menunjukkan bahwa kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya dapat dikatakan sebagai wilayah yang relatif normal pada waktu itu.

Begitu juga ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keppres no 6/2000 untuk mencabut Inpres no.14/1967 dan membebaskan etnis Tionghoa untuk merayakan hari besar dan adat istiadat serta tradisi mereka terjadi gejala euforia yang mewarnai bangkitnya semangat identitas ketionghoaan yang selama ini seakan terkubur.[4] Era Reformasi memberikan ruang kepada etnis Tionghoa

---

[3] Erniwati, "Cina Padang Dalam Dinamika Masyarakat Minangkabau Dari Revolusi Sampai Reformasi", *Disertasi,* Depok: Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Ilmu Sejarah, Desember 2011, hlm. 7.

[4] Ulasan isi Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2000 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Januari 2000.Sejak masa pemerintahan presiden Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – Juli 2001), Megawati (23 Juli 2001 - 2004) menyatakan Hari Raya Imblek sebagai hari libur nasional, dan Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – 2009) telah dikeluarkan peraturan yang menghapuskan peraturan pemerintah sebelumnya yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Keterbukaan dan kebebasan melaksanakan budaya serta adat istiadat leluhur semakin terbuka setelah tahun 2002 ketika Presiden Megawati Soekarno Putri menyatakan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional dan di tahun 2006 ketika Presiden

untuk melaksanakan aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik secara lebih terbuka dan lebih terpublikasi. Perubahan sikap pemerintah ini memberikan peluang bagi etnis Tionghoa untuk mengekspresikan identitas ketionghoaan yang terbelenggu saat kekuasaan tidak berpihak kepada mereka. Secara euforia etnis Tionghoa berlomba mendirikan organisasi dalam berbagai tujuan dan kepentingan. Pada tahun 1998 ditemukan beribu organisasi Tionghoa yang tumbuh di Indonesia,[5] namun fenomena Nasional ini malah tidak ditemukan di kota Padang. Penolakan pembentukan organisasi Tionghoa baru dipengaruhi oleh telah adanya organisasi Tionghoa yang membentuk karakter etnis Tionghoa Padang yang pada umumnya telah berdiri sejak zaman Kolonial. Hampir seluruh etnis Tionghoa yang tinggal di kota Padang tergabung ke dalam organisasi-organisasi Tionghoa tersebut.[6] Besarnya peranan organisasi terhadap seluruh aspek kehidupan etnis Tionghoa terlihat dalam perjalanan sejarah kota Padang. Hal inilah yang memberikan keunikan dan karakteristik bagi etnis Tionghoa Padang dibandingkan dengan etnis Tionghoa di daerah lainnya di Indonesia. Bertolak dari pandangan di atas, muncul pertanyaan Bagaimana proses pembentukan dan dinamika organisasi etnis Tionghoa Padang di tengah perubahan kota dan politik Negara Indonesia?.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu aspek tematis, aspek temporal, dan aspek spasial. Aspek tematis penelitian ini mengenai proses pembentukan dan dinamika organisasi Etnis Tionghoa Padang dalam perubahan kota dan politik Negara. Tema ini penting diteliti untuk memberikan analisis secara ilmiah mengenai sejarah pembentukan organisasi dan

---

Susilo Bambang Yudhoyono menghapus diskriminasi dengan mengeluarkan UU Kewarganegaraan RI no. 12 tahun 2006.

[5] Aimee Darwis, *Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 196.

[6] Organisasi menjadi institusi yang penting bagi migran Tionghoa. Pada mulanya organisasi merupakan perkumpulan persaudaraan yang berkembang dari organisasi rahasia (*triad)* yang kemudian berubah menjadi organisasi sosial, budaya, dan kematian setelah pemerintah kolonial Belanda secara resmi melarang keberadaan perkumpulan rahasia di tahun 1851. Lihat lebih lanjut Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 119..

dinamikanya dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Bagaimana sejarah pembentukan dan dinamika organisasi etnis Tionghoa dalam mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat kota Padang dan politik negara merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian tentang organisasi etnis Tionghoa pada tingkat lokal penting dilakukan untuk melihat sejarah pembentukan organisasi secara lokalitas sebagai ruang tempat etnis Tionghoa menjalankan aktivitas sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Penelitian ini juga untuk menghindari generalisasi dan stereotip yang selama ini cenderung diberikan kepada kelompok etnis Tionghoa secara makro.

Aspek temporal penelitian dilakukan sejak awal pembentukan organisasi etnis Tionghoa di kota Padang yaitu pada pertengahan abad 19 dengan batasan akhir penelitian sampai tahun 2014. Pengambilan kurun waktu penelitian yang panjang diharapkan dapat memperlihatkan dinamika perkembangan organisasi etnis Tionghoa seiring dengan perubahan kota dan politik Indonesia dari masa pemerintahan kolonial Belanda hingga Reformasi. Tahun 2014 dijadikan sebagai batasan akhir penelitian untuk melihat bagaimana peranan organisasi etnis Tionghoa dalam pesta demokrasi baik tingkat lokal maupun Nasional.

Batasan spasial penelitian adalah wilayah kotamadya Padang secara administratif. Padang dijadikan sebagai batasan spasial mengingat fungsi Padang sebagai ruang tempat etnis Tionghoa melakukan aktivitas sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pertumbuhan dan peranan kota Padang sebagai pusat pemerintahan sejak pemerintahan kolonial menjadikan Padang sebagai pusat migran etnis Tionghoa di pantai barat Sumatera. Walaupun lokasi penelitian diambil wilayah Kotamadya Padang secara administratif, namun penelitian lebih difokuskan di kecamatan Padang Selatan dan Padang Barat. Pengambilan lokasi utama penelitian di kedua kecamatan ini disebabkan karena organisasi etnis Tionghoa Padang terkonsentrasi di kawasan tersebut. Untuk memfokuskan permasalahan dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah pembentukan organisasi etnis Tionghoa di kota Padang?
2. Apa peranan dan manfaat organisasi bagi etnis Tionghoa baik sebagai anggota (in-group) maupun bagi masyarakat dan pemerintah?

3. Bagaimana dinamika organisasi etnis Tionghoa di tengah masyarakat Minangkabau dan politik negara Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang proses pembentukan dan dinamika organisasi etnis Tionghoa Padang dilakukan dengan tujuan:

1. Mengungkapkan proses pembentukan organisasi etnis Tionghoa di kota Padang.
2. Mengetahui peranan dan manfaat organisasi bagi anggota maupun bagi masyarakat dan pemerintah
3. Merekonstruksi dinamika organisasi etnis Tionghoa di tengah masyarakat Minangkabau dan politik negara Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang proses pembentukan dan dinamika organisasi etnis Tionghoa Padang penting dilakukan karena diharapkan akan mempunyai manfaat:

1. Sebagai masyarakat migran etnis Tionghoa harus memperkuat diri dengan membangun solidaritas melalui suatu organisasi. Dengan demikian akan diketahui bahwa fungsi organisasi merupakan kekuatan yang ada dibalik kesuksesan etnis Tionghoa untuk eksis dalam berbagai aspek kehidupan di perantauan.
2. Untuk mengetahui peranan dan manfaat organisasi bagi etnis Tionghoa.
3. Memberikan variasi komponen kajian etnis Tionghoa. Selama ini penelitian mengenai etnis Tionghoa terfokus kepada permasalahan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mereka hadapi, tetapi apa yang menjadi penyebab atau yang melatar belakangi secara interen belum dilakukan secara mendalam. Melalui penelitian tentang organisasi etnis Tionghoa akan diketahui potensi dan kekuatan etnis Tionghoa secara interen dalam dinamika kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun politik

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

A. Berdasarkan Temuan Penelitian

Kajian tentang etnis Tionghoa di Indonesia sudah banyak dilakukan.[7] Ini menunjukkan bahwa fenomena tentang etnis Tionghoa di Indonesia telah menarik begitu banyak kajian, baik kajian lapangan maupun kepustakaan berupa buku, artikel, maupun laporan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber untuk penelitian ini, pertama adalah karya Freek Colombijn, Poco-Poco (Kota) Padang.[8] Dalam karyanya, Colombijn mengulas tentang cara manusia mengubah penggunaan ruang sehingga membentuk kota. Colombijn membahas tentang sejarah pembentukan kota Padang dari tahun 1906 sampai tahun 1990 sebagai akibat penggunaan ruang oleh penghuninya melalui proses perubahan yang berlangsung secara terus menerus. Walaupun proses perubahan menimbulkan ketegangan di antara sejumlah kelompok yang berkepentingan, di kota Padang tidak menimbulkan konflik. Padahal konflik tidak bisa dihindarkan ketika terjadi kompetisi permintaan akan ruang oleh kelompok, sedangkan ruang yang tersedia sangat terbatas. Dalam karyanya, Colombijn juga mengulas tentang keberadaan etnis Tionghoa sebagai bagian dari penduduk kota Padang. Kontribusi etnis Tionghoa terlihat pada bidang perdagangan, terutama dalam pemanfaatan ruang untuk sarana pasar. Untuk mengatasi konflik di antara pengguna ruang diperlukan *master plan,*

---

[7]Di antaranya adalah sejumlah karya para penulis seperti Leo Suryadinata, Mona Lohanda, Aime Darwis, J.A. Mackie, Donald E. Wilmot dan Melly G. Tan. Pada umumnya mereka menulis dalam konteks kolonial dan post-kolonial, yakni menelusuri perkembangan etnis Cina dari era pemerintahan kolonial Belanda sampai sekarang. Di samping yang berbentuk bunga rampai, karya-karya itu lebih banyak menggunakan metodologi naratif.

[8]Freek Colombijn, *Paco-Paco (Kota) Padang : Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad ke 20 dan Penggunaan Ruang Kota*, Yogyakarta : Ombak, 2006.

sehingga ruang dapat digunakan untuk pengunaan umum dan penggunaan simbolik yang memberikan ciri khas bagi kota Padang.

Penelitian Colombijn berguna dalam penelitian ini untuk memahami Padang sebagai lokalitas yang dinamis, terutama dalam penggunaan konsep ruang. Untuk membahas mengenai posisi etnis Tionghoa dalam dinamika perubahan kota Padang digunakan konsep ruang dari Colombijn. Konsep ruang mendasari penulis untuk merekonstruksi dinamika sosial budaya etnis Tionghoa di tengah masyarakat kota Padang yang plural. Uraian Colombijn tentang peranan etnis Tionghoa dalam perekonomian kota Padang membantu penulis untuk menganalis posisi ekonomi etnis dalam sejarah perubahan kota Padang dari kolonial hingga saat ini. Peranan etnis Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari pembangunan pasar dan perkembangan perekonomian kota Padang. Meskipun di bidang perdagangan ditemukan kompetisi yang tinggi dengan pedagang Minangkabau, namun eksistensi pedagang Tionghoa terlihat dalam perdagangan di kota Padang.Walaupun menguraikan tentang posisi etnis Tionghoa sebagai salah satu etnis yang berjuang untuk mendapatkan ruang di kota Padang, namun Colombijn tidak membahas secara mendalam tentang dinamika kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa dalam perubahan politik lokal maupun Nasional. Hal inilah yang membedakan tulisan Colombijn dengan penelitian ini.

Kedua karya Rustopo, *Menjadi Jawa : Orang-Orang Cina dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895 – 1998.*[9] Karya Rustopo merupakan karya terbaru dan merupakan hasil penelitian disertasi. Rustopo memberikan fenomena baru dengan melihat masa lalu etnis Tionghoa di Jawa secara sosio-kultural dari perkembangan intelektual dan mentalitas yang manusiawi dalam kehidupan sehari-hari individu atau sekelompok orang biasa. Etnis Tionghoa digambarkan sebagai salah satu bagian yang secara kolektif membentuk identitas Jawa sebagai upaya mencari *jati diri* dalam membangun identitas kejawaannya. Dalam tulisannya Rustopo berhasil menempatkan etnis Tionghoa, baik sebagai komunitas maupun sebagai individu menjadi satu kesatuan ke dalam masyarakat dan kebudayaan Jawa. Dengan menampilkan tokoh-tokoh etnis Tionghoa sebagai contoh, tulisan ini menunjukkan

---

[9] Rustopo, *Menjadi Jawa : Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta 1895 – 1998*, Yogyakarta : Ombak, 2007.

adanya keinginan etnis Tionghoa untuk "menjadi" Jawa dan berharap agar dapat diterima oleh masyarakat Jawa.

Secara metodologi, tulisan Rustopo mampu membangun model penelitian sejarah yang merekonstruksi penulisan *prosopografi* dengan memanfaatkan intuisi dan imajinasi seniman untuk menghasilkan karya sejarah kebudayaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.[10] Dengan menggunakan teori konvergensi dari William Stern, yaitu hasil pertemuan (*konvergensi*) antara faktor pribadi dan faktor lingkungan, Rustopo menggambarkan faktor-faktor pribadi etnis Tionghoa yang menjadi Jawa dalam kurun waktu 1895 -1998. Rustopo melacak kajiannya melalui silsilah dan faktor lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga hingga lingkungan budaya. Pola-pola kebudayaan Jawa yang disampaikan oleh Geertz dijadikan sebagai rujukan untuk mengamati simbol-simbol kejawaan mana yang diadopsi dan kuat di Surakarta. Gambaran Rustopo mengenai integrasi budaya Jawa ke dalam identitas etnis Tionghoa berbeda dengan etnis Tionghoa yang tinggal di Padang. Integrasi budaya Jawa ke dalam identitas etnis Tionghoa diserap secara individu maupun kelompok, sehingga ditemukan etnis Tionghoa yang menjadi Jawa setelah mengalami proses adaptasi melalui pribadi-pribadi yang kemudian menjadi Jawa di Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh ruang lokal sangat kuat mempengaruhi kepribadian etnis Tionghoa yang kemudian mengikuti pola-pola lokal. Kasus Surakarta tidak ditemukan dalam dinamika sosial budaya etnis Tionghoa Padang. Walaupun ada pengaruh nilai-nilai lokal (budaya Minangkabau) terhadap kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa Padang, terutama terhadap bahasa yang digunakan, namun keberadaan lembaga sosial, budaya, dan kematian Himpunan Tjinta Teman (HTT) dan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) mampu menjaga dan mewariskan budaya dan adat istiadat leluhur seiring perubahan zaman. Lembaga sosial, budaya, dan kematian HTT dan HBT berpusat di kota Padang dan memiliki cabang di beberapa kota di pedalaman Sumatera Barat, Riau daratan, Riau kepulauan, serta Sibolga. Lembaga sosial, budaya, dan kematian etnis Tionghoa ini memiliki peranan penting dalam melestarikan tatanan budaya dan memberikan

---

[10] Penulisan prosopografi adalah tulisan mengenai kehidupan sekelompok orang. Lihat lebih lanjut Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial,* Jakarta : Yayasan Obor, 2003, hlm. 55.

bantuan pelaksanaan upacara kematian sesuai dengan tradisi leluhur, sehingga di kota Padang hingga saat ini masih ditemukan budaya etnis Tionghoa yang tradisional.

Ketiga, disertasi Erniwati tentang Cina Padang dalam Dinamika masyarakat Minangkabau : dari Revolusi sampai Reformasi menjadi sumber acuan primer untuk penelitian ini. Erniwati menggambarkan bagaimana etnis Tionghoa mampu melestarikan dan membudayakan tradisi leluhur secara turun temurun meskipun mereka 90% sudah tidak bisa berbahasa Tionghoa lagi. Dengan menggunakan konsep etnisitas dan identitas dari Barth (1970) dan Wang Gungwu (1985), Erniwati mengekspresikan identitas Tionghoa Padang sebagai kelompok etnis yang unik dan berbeda dengan kelompok etnis Tionghoa yang ada di kota lainnya di Indonesia. Karakteristik budaya lokal digambarkan memberikan peluang kepada etnis Tionghoa untuk mampu menjaga identitas ketionghoaan mereka melalui sistem *simbolis mutualisme* (saling ketergantungan) di mana orang Tionghoa digambarkan sebagai etnis pendatang yang mampu memainkan peranannya di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang juga memiliki kemampuan dalam berdagang. Karakteristik orang Minangkabau yang terbuka dan demokratis memberikan kesempatan kepada etnis Tionghoa untuk berkembang di kota Padang sebatas tidak mengganggu tatanan adat dan budaya Minangkabau. Disertasi Erniwati membantu penelitian ini memberikan gambaran tentang posisi etnis Tionghoa di tengah-tengah masyarakat kota Padang. Kompleksitas kehidupan etnis Tionghoa secara interen baru digambarkan secara umum, sehingga memberikan peluang kepada penelitian ini untuk melihat secara mendalam bagaimana kehidupan etnis Tionghoa Padang secara interen melalui kajian proses pembentukan dan dinamika organisasi etnis Tionghoa di kota Padang.

B.Pendekatan Teoritis

Merujuk kepada kajian terdahulu, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kelompok etnis dan identitas yang disampaikan oleh Barth dan Wang Gungwu. Kedua konsep ini dipakai karena objek yang diteliti adalah sebuah kelompok etnis yang memiliki identitasnya sendiri yang berbeda dengan etnis lainnya. Barth mendefinisikan kelompok etnis sebagai dua aspek penting, yaitu

sebagai suatu unit kebudayaan dan sebagai suatu tatanan sosial.[11] Sebagai unit kebudayaan kelompok etnis ditinjau melalui kemampuan mereka berbagi sifat budaya yang mencirikan kelompok tersebut. Pencirian kelompok itu tergantung kepada kemampuan individu atau seseorang untuk mengekspresikan ciri-ciri atau sifat budaya kelompoknya. Sementara sebagai suatu tatanan sosial, ekspresi identitas dilakukan melalui hubungan sosial dengan kelompok budaya lainnya.[11] Bagi Barth, etnisitas tidak hanya tergantung kepada ras atau warisan biologis, melainkan juga pada ekspresi identifikasi rasial atau sentimen-sentimen primodial. Dengan demikian ada batas-batas antar kelompok etnis yang masing-masing membangun, mempertahankan, dan melestarikan identitas secara terus menerus melalui proses interaksi sosial. Karena itu identitas merupakan hasil dari sebuah konstruksi.[12]

Selanjutnya Barth mengatakan bahwa karakteristik kelompok etnis terdiri atas : (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, (3) mempunyai jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok pupulasi lain.[13] Walaupun demikian Barth sendiri masih memberikan pertimbangan pada pengaruh sistem politik pada hubungan antar etnis.[14]

Sementara itu dalam studinya tentang identitas Tionghoa di Asia Tenggara, Wang Gungwu menekankan tentang konsep identitas Tionghoa dan identitas ganda. Dalam analisa Wang, kesadaran sebagai orang Tionghoa (rasa kecinaan) merupakan unsur inti etnisitas etnis Tionghoa yang tidak saja memiliki sekaligus beberapa jenis identitas, melainkan identitas-identitas itu hadir secara bersama-sama, bahkan bisa tumpang tindih, saling memperkuat, dan saling bersaing dengan identitas yang lainnya.[15] Dengan menekankan dimensi waktu, Wang Gungwu menyimpulkan

---

[11]Fredrik Barth(ed), *Ethnic Groups and Boundaries*, Boston : Little Brown, 1969, hlm 12-15.

[12]Fredrik Barth, (ed),*ibid.*,1969, hlm. 15-38.

[13]Fredrik Barth, *Kelompok Etnik dan Batasannya,* terj, Nining I. Susilo, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1988, hlm. 1.

[14] Fredrik Barth, *ibid.*, 1988, hlm. 39.

[15]Wang Gungwu, "Kajian Tentang Identitas Orang Cina Asia Tenggara", dalam Jennifer Cushman & Wang Gungwu (ed), *Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara* (terj), Jakarta : PT. Temprint, 1991, hlm. 13-16.

identitas di atas bisa tidak berdiri sendiri, karena suatu hal yang wajar bagi setiap individu atau kelompok menganut lebih dari satu identitas pada satu waktu yang bersamaan. Hal inilah yang dikembangkan oleh Wang dalam identitas gandanya.[16] Tahapan proses identitas etnis Tionghoa di atas, memuncul pertanyaan apakah tahapan tersebut juga ditemukan di kota Padang atau malah sebaliknya etnis Tionghoa Padang mengalami proses tahapan yang berbeda dalam membentuk identitas mereka sendiri?

Teori Barth dan Wang Gungwu membantu peneliti dalam menganalisis proses pembentukan organisasi etnis Tionghoa. Sebagai tatanan sosial, kelompok etnis terbentuk jika anggota kelompok tersebut menggunakan identitasnya untuk tujuan interaksi, maka dia akan membedakan dirinya sendiri dengan orang dari kelompok lainnya. Meskipun begitu, ke dua teori ini masih belum mampu menggambarkan fungsi dan peranan organisasi secara organisatoris. Untuk itu teori organisasi dari Gillin dan Gillin di dalam karyanya yang berjudul *General Future of Social Institution,* membantu menguraikan beberapa ciri-ciri umum dari sebuah lembaga kemasyarakatan sebagai berikut: lembaga kemasyarakat merupakan suatu organisasi dari pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud dari aktivitas masyarakat. Lembaga masyarakat mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu di mana untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga masyarakat membutuhkan alat seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Selain dari perlengkapan, lembaga masyarakat biasanya memiliki lambang-lambang yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai suatu tradisi yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang merumuskan tujuan dan tata tertib yang berlaku.[17] Lembaga masyarakat adalah sebuah organisasi sosial dengan perilaku anggota yang terorganisasi secara sosial. Sebagai organisasi sosial yang didirikan oleh sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi etnis Tionghoa bisa dikatakan sebagai organisasi Non-

---

[16]Wang, *ibid.*,hlm 13-23.

[17] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, hlm 203-205

Govermental Organization (NGO) yang mandiri dan berbentuk yayasan.[18] Dalam organisasi sosial terdapat tindakan yang saling terkait dan tertata melalui aktivitas sosial, susunan kerja suatu masyarakat, dan aspek kerjasama yang menggerakkan tingkah laku para individu pada tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Dengan demikian dalam organisasi sosial terdapat unsur-unsur seperti kelompok dan perkumpulan, lembaga-lembaga sosial, peranan-peranan, dan kelas-kelas sosial.

[18] UU No 16 Tahun 2001.

BAB 3
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu mencari, menemukan, dan menguji sumber-sumber. Untuk mendapatkan fakta sejarah yang otentik dan dapat dipercaya. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber-sumber tertulis yang diteliti meliputi arsip, surat kabar, artikel, majalah, laporan dan AD/ART lembaga/organisasi etnis Tionghoa, dan buku-buku ilmiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural dengan menggunakan analisis sejarah makro untuk menjelaskan proses pembentukkan dan dinamika organisasi etnis Tionghoa Padang sejak pemerintahan kolonial hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi proses pembentukan dan perkembangan organisasi etnis Tionghoa di kota Padang. Metode kualitatif juga didukung dengan data perpusakaan dan arsip, hasil wawancara, dan pengamatan. Ada beberapa alasan utama mengapa pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Pertama, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan yang timbul dari proses pembentukan dinamika organisasi dalam fenomena sosial dengan *setting* alamiah dan interpretasi berdasarkan pengamatan dan pemaknaan yang diberikan oleh ruang sebagai lokalitas tempat etnis Tionghoa Padang beraktivitas. Kedua, realita bersifat multidimensi sebagai akibat dari kompleksitas situasi yang beragam. Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena ini harus dilakukan dengan menganalisa sesuai konteksnya dan ini hanya mungkin dilakukan dengan pendekatan kualitatif.[19]

---

[19]Matthew B. Miles and A. Michel Huberman, *Qualitative Data Analysis,* London : Sage Publ, 1994, hlm. 17.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik, yaitu studi pustaka dan arsip, observasi, dan wawancara.[20] Data diperoleh melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.

Identifikasi Data dan Teknik Pengumpulan

No	Data yang diperlukan	Teknik Pengumpulan
1	Dokumen Pembentukan Organisasi Tionghoa Kota Padang	Studi Pustaka awal sebagai proses pengumpulan Dokumen, telaah literatur berupa buku, artikel-artikel, dan laporan penelitian di perpustakaan organisasi Tionghoa Padang, perpustakaan Daerah Sumatera Barat, PDIKM Padang Panjang dan perpustakaan pribadi.
2	Arsip Organisasi Tionghoa Kota Padang, berupa : a. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Marga b. Laporan Tahunan Marga maupun perhimpunan sosial budaya Tionghoa Padang c. Catatan Harian Marga/Perhimpunan Keluarga	Studi Dokumen, Sumber tertulis berupa dokumen diperoleh di : a.Himpunan Tjinta Teman b.Himpunan Bersatu Teguh c.Santu Yusuf d.Perhimpunan sosial-budaya yang ada di Padang
3	Pembentukan Organisasi Tionghoa	Studi Dokumen yang diperoleh dari

[20]Max Travers mengatakan bahwa teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik pengumpulan data tertulis, observasi dan wawancara sekaligus dinamakan dengan teknik etnografi. Teknik ini membutuhkan keseriusan peneliti untuk mengamati sekelompok orang tertentu untuk mengetahui pandangan hidup (*way of life*) orang yang diteliti. Lihatlebihlanjut Max Travers, *Qualitative Research Through Case Studies*, London : Sage Publication, 2001, hlm. 3.

	Kota Padang	bahan publikasi dari surat kabar Sin Po, Harian Singgalang, Buletin ISDB, publikasi Klenteng, Bulletin Perhimpunan, majalah Sentora Himpunan Bersatu Teguh, dan dokumen lainnya, Observasi dan Wawancara terhadap Pengurus Organiasi, Anggota beserta keluarganya
4	Perkembangan serta Dinamika Organisasi Tionghoa Kota Padang	Studi Dokumen yang diperoleh dari bahan publikasi dari surat kabar Sin Po, Harian Singgalang, Buletin ISDB, publikasi Klenteng, Bulletin Perhimpunan, majalah Sentora Himpunan Bersatu Teguh, dan dokumen lainnya, Observasi dan Wawancara terhadap Pengurus Organiasi, Anggota beserta keluarganya

Observasi dan pengamatan dilakukan secara non-partisipan, yaitu peneliti berperan hanya sebagai pengamat fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang kondisi objektif dari masyarakat yang diamati, lingkungan sosial, serta perilaku subjek penelitian berkaitan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk mengkroscek kebenaran data, peneliti juga melakukan partisipasi lengkap, yaitu berinteraksi secara mendalam dengan relasi yang berasal dari kalangan etnis Tionghoa.

Selanjutnya, untuk mengisi kekurangan data yang tidak tercatat pada sumber tertulis, maka penelitian ini menggunakan sumber lisan. Sumber lisan dicapai dengan melakukan wawancara terhadap 50 orang informan berdasarkan kategorisasi usia dan profesi dengan harapan mendapatkan informasi sesuai

dengan zamannya. Topik yang ditanyakan dalam proses wawancara antara lain tentang kisah hidup informan dan hasil pengamatan informan tentang fenomena masa lalu.[21]

Wawancara dilakukan langsung kepada pelaku dan anggota keluarga (*family-tree interviewing*), sehingga dapat menjangkau dua generasi dalam satu keluarga yang sama.[22] Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *indepth interview* dengan pola *semi structured interview*. Wawancara juga dilaksanakan terhadap informan (kelompok-kelompok klan/suku, tokoh budaya dan agama) dan subjek penelitian (kelompok yang berbeda). Pada penelitian lapangan, data lisan yang diambil sangat tergantung pada ingatan pelaku sejarah ataupun anggota keluarganya.

---

[21] Nancy McKay, *Curating Oral Histories : from Interview to Archive*, California : Left Coast Press, 2007, hlm. 38.

[22]Hugo Slim and Paul Thompson, "Ways of Listening" dalam Robert Perks and Alistair Thomson" (eds), *The Oral History Reader*, New York:Ruutledge, 1998, hlm. 114-125.

JADWAL PENELITIAN

A. Jadwal Penelitian

Jenis kegiatan	Juli 2014				Agus 2014				Sept 2014				Okt 2014				Nov 2014				Des 2014			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan Proposal			X																					
2. Pengumuman							x																	
3. Penelitian awal									x	x	x	x												
4. Pengolahan data													x	x	x	x								
5. Penulisan																	x	x	x	x				
6. Laporan akhir																					x	x	x	x

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Padang Tempo Dulu

Setidaknya ada dua versi mengenai defenisi atau pengertian tentang Padang. Dua versi tersebut adalah versi Tambo dan versi Hofman (seorang *Opperkoopman* di Padang).[1] Versi Tambo mengatakan bahwa jauh sebelum orang pegunungan datang, Padang merupakan hutan lebat yang masih didiami oleh manusia liar (orang Rum*pit* dan orang *Tirau*) dari daerah pesisir. Konon Datuak Patiah Karsani, salah seorang pemuka masyarakat Minangkabau yang pertama datang ke Padang menemukan banyak benda berharga, seperti pisau, meriam kecil, dan serpihan porselin yang bertuliskan kalimat, *"la ilaha ilallah Moehammad rasoel Allah"* dalam huruf Arab dan sebilah pedang. Dari benda yang berbentuk pedang inilah munculnya nama Padang.[2]

Sementara itu, Hofman mengatakan bahwa asal kata Padang merupakan penggambaran daerah, dimana terdapat lapangan yang begitu luas dan dikelilingi oleh pegunungan yang tinggi. Lapangan yang luas tersebut merupakan sebuah dataran lepas yang terdiri dari dataran rendah rawa yang dikelilingi oleh bukit barisan di Pesisir Pantai Barat Sumatera. Dataran rendah tersebut diketahui sebagai tempat bermukimnya para penangkap ikan, pedagang, dan petani garam

---

[1] Hofman adalah pengarang *Adat dan Sejarah Minangkabau* terutama tentang adat matrilineal. Padang saat itu belum ditaklukkan oleh Belanda, sehingga pangkat Hofman disebut dengan *Opperkoopman*. Sebutan *Opperkoopman* merupakan pangkat yang diberikan untuk wakil Belanda yang ditempatkan di daerah jajahan, namun untuk daerah jajahan Belanda, seperti Ambon, Banda, Ternate dan Jawa penguasaannya dinamakan Gubernur. MD, Mansoer dkk, mengatakan bahwa *Koopmant* (coopmandeur)dalam bahasa minangkabaunya berarti tuanku kumendur) adalah pangkat yang diberikan kepada orang yang mengepalai *Het Opperhoofd Van Padang* dan bertugas mengatur strategi dagang dan pengamanan pos-pos niaga di Air Hadji, Batang Kapas, Pulau Tjingkuak di Pesisir, Ulakan, Pariaman, Tiku, Air Bangis, Singkil, dan Barus. Dalam menjalankan tugasnya *Koopman* dibantu oleh *Oonder-Koopman*, yaitu komandan pasukan dengan pangkat Letnan muda "*Vaandring*" . Koopman dan Onder-Koopman beserta pasukannya tinggal di dalam Benteng Muara di sebalah Sungai Batang Arau. Lihat Lebih lanjut E. Netscheer, *Padang Inthelast der XVIII*, Batavia: Batavia Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen.

[2] Tanpa Pengarang, *Padang Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia*, Padang: Sumatera Offset Padang, 1989, hlm. 21.

yang dikepalai oleh seorang pucuk adat yang bergelar *Mengkudum*. Perkampungan nelayan tersebut terletak di muara Sungai Batang Arau dan sekali lagi Hofman menegaskan inilah awal dari nama Padang tersebut.[3] Dari kedua versi tersebut, penulis lebih sepakat dengan defenisi Padang versi Hofman. Dimana sejarah Kota Padang berawal dari perkampungan nelayan kecil yang dalam prosesnya perkampungan kecil tersebut kemudian menjadi pusat perdagangan dan pusat administratif.[4]

Hal tersebut tidak terlepas dari perubahan pusat-pusat perdagangan, seperti bandar niaga Malaka dan kota-kota dagang di sepanjang Pantai Barat Sumatera.[5] Dilain pihak perkembangan Padang juga tidak dapat dipisahkan dari persaingan kekuatan-kekuatan dominan, seperti Aceh, Perusahaan dagang Hindia Belanda atau VOC (*Verenigde Oost-indhische Company*), Perusahaan dagang Inggris atau EIC *(East India Company*), dan Kolonial Belanda. Di bawah kekuasan Aceh, Padang kemudian berkembang menjadi bandar dagang yang ramai.[6] Banyak para pedagang dari pedalaman Minangkabau yang datang membawa barang dagangan mereka ke Padang. Para pedagang ini merupakan pedagang Minangkabau yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang keliling dan kemudian memilih untuk tinggal menetap dan membentuk pemukiman di selatan Sungai Batang Arau.[7]

---

[3] Tanpa Pengarang, *Padang Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia,* Padang: Sumatera Offset Padang, 1989, hlm. 21.

[4] Versi Hofman ini juga disetujui oleh Freek Colombijn.

[5] Kejatuhan Malaka di bawah kekuasaaan Portugis 1511 menyebabkan terjadinya perubahan jalur perdagangan ke Utara melewati Aceh. Akibatnya muara-muara di sepanjang Pantai Barat Sumatera seperti kepulauan Mentawai, Pulau Tello (Nias), Sibolga, Tiku, Natal, Barus, Air bangis, Pariaman, Padang, Painan, dan Indrapura berkembang menjadi pelabuhan. Lihat lebih lanjut Christine *Dobbin Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Pettani Yang Sedang Berubah : Sumatera Tengah*, Jakarta : INIS, 1992, hlm. 88-89

[6] Sebelum kejatuhan Malaka 1511 jalur perdagangan Minangkabau melalui tiga jalur sungai (Siak, Kampar, dan Indragiri) menuju Pantai Timur Sumatera. Christine Dobbine, *Ibid.*, hlm. 7-8.

[7] Para pedagang yang datang dan kembali ke kampung untuk mendapatkan barang dagangan sambil melihat keluarga termasuk ke dalam bentuk merantau keliling. Lihat Muchtar Naim, *Merantau dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan daerah Sumatera Barat*, Padang: Penelitian Minangkabau, 1972, hlm 35. Daerah Minangkabau asli disebut darek (daratan) yang terdiri dari tiga luhak, (Luhak Nantigo), yaitu luhak Agam, luhak Tanah Data, dan luhak Lima Puluah Kota. Sementara wilayah rantau Minangkabau merupakan wilayah perluasan berupa

Pendatang yang berasal dari pedalaman ini, terdiri dari berbagai macam suku yang kemudian membentuk perkampungan yang dikenal dengan nagari Padang. Sejak itu migrasi penduduk Minangkabau meningkat dan menjadikan Padang semakin berkembang sebagai salah satu rantaunya orang Minangkabau di wilayah pesisir Pantai Barat Sumatera.[8] Dari Selatan sampai Batang Arau penduduk bergerak ke arah Utara dan mendirikan kampung-kampung baru. Semua kampung tersebut tergabung ke dalam kenagarian Padang di bawah pimpinan Nan Delapan Suku (*Nan Salapan Suku*).[9] Selain daerah pedalaman atau *darek*, penduduk Padang juga ada yang berasal dari wilayah rantau Minangkabau.[10] Daerah Rantau tersebut adalah Solok, Pesisir, Painan, Pasaman, dan Tarusan yang membentuk perkampungan (Nagari) di sekitar daerah Koto Tangah (sekarang Tabing). Pauh (Mudik), dan XIII Koto (Lubuk Begalung).[11]

---

bentuk koloni dari setiap luhak. Ada dua wilayah rantau orang Minangkabau, yaitu daerah hilir dan daerah mudik. Rantau hilir adalah daerah sebelah timur luhak (di bagian timur Sumatera), mulai dari Muara Takung Hilia, Tanjung, Semaliru Mudiak, Pulau Punjuang, Siguntua, sungai Jambu, Lubuak Alung Aling, Duniang Suliang, Lubuak Gadang, Nangko, Aka Japang, Lubuak Malala Bidar Alam. Selanjutnya Rantau Mudiak, (menuju Samudra Hindia) adalah bagian barat pesisir panjang, yaitu (K) Lalua, Teluk, Labuhan mulai dari Indrapura sampai Banda Sapuluah, termasuk Padang. Lihat lebih lanjut Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* Jakarta: Gunung Agung, 1984, hlm 78-83.

[8] Nagari Padang adalah cerita Minangkabau dahulu kala, tetapi kotanya merupakan kreasi baru yang lahir dari campur tangan luar. Pusat nagari di Minangkabau identik dengan mesjid dan balai adat, sedangkan pusat kota bercirikan pasar dan benteng penjajah.

[9] Nan Delapan Suku (*Nan Salapan Suku*) merupakan suku-suku dan penghulu kaum yang ada di kenagarian Padang. Pembentukan sistem Kenagarian Padang disesuaikan dengan kelarasan yang ada di Luhak Nan Tigo, yaitu kelarasan Bodi Caniago meliputi Sumagek menjadi Caniago, Sumagek Mandaliko menjadi Caniago Mandaliko, Panyalai menjadi Caniago Panyalai, dan Jambak. Kedua kelarasan Koto Piliang meliputi Sikumbang menjadi Tanjuang Piliang, dan Melayu, Mansiang menjadi Tanjuang Balai Mansiang, Koto menjadi Tanjuang Piliang. Masing-masing kepala suku memimpin *wijk* sesuai dengan wilayah pemukiman kaumnya. Lebih lanjut lihat kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Padang, Leaflet KAN Kota Padang. Jl. Karia Kota Padang.

[10] Lihat Satu Abad Kabupaten Solok. Sebagai bagian Minangkabau Kabupaten Solok secara historis merupakan perantauan orang Tanah Datar dan memiliki rantau sendiri yaitu *Aso Solok duo salayo, ba Padang ba Ayie Haji, Pauh Limo Pauh Sambilan, Lubuak Bagaluang nan duo puluah.* Rusli Amran menjelaskan setelah kedatangan orang dari Agam, kedatangan terbesar selanjutnya datang dari Solok Selayo dan mereka menempati gurun atau Padang sebelah kiri Batang Arau yang dikenal dengan Seberang Padang. Mereka menempati sebuah gedung yang terkenal dengan sebutan '*rumah limo ruang*". Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*, Padang: CV. Yasaguna, 1988, hlm. 154-155.

[11] Freek Colombjin, *Poco-Poco (Kota) Padang : Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota,* Yogyakarta : Ombak, 2006, hlm 56

Berkembangnya penduduk dari Seberang Padang, menyebabkan pusat perdagangan secara berangsur-angsur bergeser ke arah muara sungai Batang Arau. Pergeseran pusat perdagangan ini disebabkan karena semakin ramainya pedagang yang datang dan membuka lahan, sehingga lahan terbuka menjadi semakin sempit. Sungai Batang Arau berfungsi sebagai sarana transportasi pengangkutan komoditi perdagangan (rempah-rempah, lada, dan emas) dari kawasan pedalaman sampai akhir abad ke 18.[12] Sarana angkutan yang digunakan oleh pedagang Minangkabau adalah perahu kecil yang dikenal dengan sampan.

Pada saat Padang berada di dalam kekuasaan Kesultanan Aceh, maka secara otomatis Padang berada di bawah kontrol Aceh, termasuk pedagang-pedagang asing yang melakukan aktivitas perdagangan di Padang. Aceh memperkuat pengawasan dengan menempatkan wakilnya di Padang. Semua barang yang diperdagangkan di kawasan muara sungai Batang Arau harus sepengetahuan raja atau wakil kerajaan Aceh seperti halnya di Pariaman, terutama perdagangan lada dan emas, semuanya berada di bawah monopoli Aceh. Akibat pengontrolan yang kuat dilakukan Aceh terhadap perdagangan di Padang. Perdagangan Aceh kemudian mendapat tantangan dari tujuh penghulu yang tergabung ke dalam Nan Delapan Suku di bawah pimpinan Rang Kayo Kaciek. Penghulu yang semula berfungsi sebagai pialang Padang kemudian bekerjasama dengan VOC menghadapi Aceh. Karena didukung oleh satu pialang saja, akhirnya Aceh berhasil diusir dari Padang pada tahun 1663. Sejak itu kekuasaan Padang beralih dari Aceh ke bangsa Belanda di bawah VOC.[13]

Sebelum mendirikan loji, pejabat VOC diberi pinjaman rumah oleh Rang Kayo Kaciek di daerah Seberang Padang. Setelah Yan Van Groenewegen datang pada tahun 1666, barulah VOC mendirikan loji (*fortress*) pertamanya di Muara

---

[12] W. Anwar Falah, Riza Mutia, Lisa Dwiyana, *Menyingkap Riwayat Dan Pesona Kota Padang Lama Yang Tersisa*, Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya, UPTD Museum Adityawarman, 2007, hlm 14.

[13] Para Pialang Padang yang berasal dari daratan Solok mempertahankan hubungan dengan Aceh yang telah menjadikan mereka makmur, akibatnya ketika tujuh suku yang bekerjasama dengan Belanda berhasil mengusir kekuasaan Aceh, maka akhirnya suku ini juga ikut menghilang setelah Aceh meninggalkan Padang. Christine Dobbine, *Op. cit.*, hlm. 96-97.

sungai Batang Arau (daerah Muara Padang sekarang ini).[14] Sejak saat itu Padang dijadikan oleh Belanda sebagai markas VOC untuk Pantai Barat Sumatera. Untuk memperlancar perdagangan setelah perang Aceh, tanggal 18 Agustus 1667 Rang Kayo Kaciak diangkat menjadi panglima (Raja Bandar) yang berfungsi sebagai pedagang perantara pialang pantai.[15] Secara berangsur-angsur Padang berkembang dengan cepat menjadi kota pelabuhan (*port city*) terpenting di Pantai Barat Sumatera. Sejak itu Padang ramai dikunjungi oleh saudagar asing, seperti: saudagar Inggris, Belanda, Arab, India, Jawa dan Bugis.[16]

Perubahan pesat terjadi sejak awal abad ke 20, terutama setelah Padang berada di bawah kekuasaan *Afdeeling Asisten Resident van Padang en Ommelanden* pada tahun 1905.[17] Reorganisasi ini memperlemah peranan kelompok *Nan Delapan Suku* sebagai *Primus Interpares*.[18] Perubahan Padang menjadi Kota Praja (*Gemeente Van Padang*) pada tanggal 1 Maret 1906, secara otomatis menyebabkan Padang resmi menjadi daerah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Residen.[19] Pada tahun 1913 kembali terjadi perubahan sistem

---

[14] Berdasarkan Perjanjian Painan. Pada tahun 1663 pedagang Minangkabau menawarkan monopoli lada dan emas sebagai imbalan atas perlindungan Belanda yang telah berhasil mengusir kekuasaan Aceh. Tujuh Keluarga pialang Padang diberi pangkat panglima menerima penghargaan dari Ratu Belanda pada tanggal 18 september 1667, sementara satu keluarga yang berasal dari daratan Solok yang mendukung Aceh diusir dari padang lihat lebih lanjut Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981, hlm 185. Mardans Syofwan, Ishaq Taher, dkk, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional 1987, hlm 30.

[15] Selama masa VOC, Padang bersama Barus dan Natal merupakan dua Pelabuhan yang oleh orang Belanda diharapkan mapu mengitensifkan perdagangan dengan Maluku dan menghambat perluasan aktivitas dagang Inggris dari Bengkulu ke Aceh, lihat lebih lanjut Ger Teitler, "de Marine en de Verenigde Oost – Indhische Companie", in *Gerrit Knaap en Ger Teitler, Oost – Indhische Companie*, Leiden : KITLV Press, 2002, hlm 30.

[16] Orang Bugis datang berniaga dengan perahu layar ke pantai Pariaman dan Padang. Orang Bugis terkenal giat mengarungi lautan, bahkan terkadang berbulan-bulan lamanya, lihat lebih lanjut S.M. Latif, *Moehamad Saleh Datuak Orang Kaya Besar*, (13 Rabi'ul awal 1257 - 8 Jumadi'l Ackir 1338), Bogor , hlm. 4.

[17] Pemerintah Kolonial Belanda membagi Sumatera Barat atas lima 5 daerah administrative (afdeeling) dan 19 onderafdeeling. Salah satu afdeeling adalah Padang (Zuid benenlanden) yang terbagi atas, onderafdeeling Padang, onderafdeeling kepulauan Indrapura, Onderafdeeling Painan, dan Onderafdeeling Kepulauan Mentawai, lebih lanjut lihat mMmori Van Overgrave Van De Aftremendende Resident Van Sumatera Westkust, (tanpa Judul), hlm 1; Algeemene Secretarie, hlm 254-255; Statblaad no 290 tahun 1905.

[18] Mardanas Sofyan, *Op. cit.*, hlm. 30.

[19] Gemeente Raad beranggotakan 17 orang yang terdiri dari 7 orang Pribumi, 5 orang Belanda, dan 5 orang Timur Asing yang diketuai oleh Residen. *Gemeente Raad* berlaku sejak

pemerintahan, dimana *Onder-afdeling* Padang disederhanakan menjadi tujuh distrik; yaitu Tanah Tinggi, Batang Arau, Binuang, Koto Tangah, Pauh IX Sungkai, Dan 7 Lurah Pauh V (lima).[20] Ketujuh distrik tersebut berada di atas Luhak yang dikepalai oleh Tuanku Luhak. Ketujuh distrik dibagi atas, Padang (Tanah Tinggi, Batang Arau, Binuang), Padang Luar (Koto Tangah, Pauh IX, Sungkai, dan Pauh V).[21] Kemudian pada tahap berikutnya terjadi lagi perubahan sistem pemerintahan yang sesuai dengan semangat desentralisasi. Hal tersebut direalisasikan dengan diangkatnya Walikota (*Burgemeenster*) pertama pada tanggal 7 Agustus 1928.

B. Kedatangan Berbagai Etnis di Padang.

Perkembangan Muara Padang dari Bandar menjadi pusat perdagangan dan pusat pemerintahan di Sumatera Barat menyebabkan daerah ini banyak dikunjungi oleh para pendatang terutama pedagang. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk menggeser status Padang dari kampung menjadi kota. Hal tersebut diiringi oleh pertumbuhan penduduk dari berbagai etnis yang berdatangan ke Padang hingga menetap dan membentuk komunitas di Padang.

Kedatangan berbagai etnis di Muara Padang didukung oleh letak Padang yang strategis dan perannya sebagai daerah pesisir. Berkembangnya Padang sebagai pusat perdagangan menjadikan daerah ini sebagai daerah rantau bagi orang Minangkabau dan pendatang lainnya, baik itu dari kepulauan di Nusantara, maupun bangsa asing lainnya, seperti Arab, India, Tiongkok, serta Eropa. Masuknya bangsa asing ke muara Padang, tidak terlepas dari peran Aceh sebagai Bandar dagang saat itu. Pedagang-pedagang muslim Arab singgah di Pantai Barat Sumatera setelah Malaka berhasil ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Hubungan dagang yang dijalin antara Aceh dengan bangsa Arab (Gujarat) dalam perdagangan menyebabkan pedagang-pedagang Arab menyinggahi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Aceh. Selain melalui Pantai Barat, kelompok Arab

---

tahun 1906 hingga Jepang menduduki Padang pada tahun 1942, kemudian berakhir pada tanggal 29 desember 1949 saat Belanda mengakui kedaulatan RI. *Stablaad no 151 tahun 1906.*

[20] Mardanas Sofyan, *Ibid.*, hlm. 31-32.

[21] Mardanas Sofyan, *Ibid.*, hlm. 32-33.

juga datang dari Pantai Timur Sumatera, yaitu melalui Kerajaan Siak. Dari segi jumlah, kelompok Arab tidak begitu banyak, mereka datang dari Pantai Timur ketika Padang sudah dikuasai VOC. Secara terperinci dapat diketahui bahwa diakhir abad ke 19 mulai terlihat keberagaman penghuni Padang dengan berbagai perbedaan dan karakteristiknya. Perbedaan terlihat pada karakteristik masyarakat yang tinggal di Padang tahun 1852 dimana kelompok Arab yang ada di Padang mencapai 3.230 orang. Kemudian menurun menjadi 666 orang di tahun 1880. Selanjutnya dari segi jumlah orang Arab yang datang ke Padang tidak begitu banyak sehingga di tahun 1905 hanya ditemukan 200 orang saja.[22] Jumlah yang sedikit tersebut membuat kelompok Arab tidak membentuk perkampungan sebagai tempat lokalitas mereka untuk berinteraksi dengan sesamanya. Orang Arab lebih memilih untuk berbaur dengan masyarakat setempat dan dalam kehidupan sehari-hari kehidupan masyarakat Arab tidak begitu menonjol, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi.

Bangsa asing selanjutnya yang datang ke Padang adalah bangsa India. Bangsa India pada mulanya dibawa oleh tentara Inggris sewaktu menduduki Padang. Orang-orang India ini umumnya merupakan etnis Tamil yang menjadi tentara Sepoy. Selain itu, mereka juga merupakan pedagang rempah-rempah yang singgah di Padang. Sama seperti orang Arab, orang India juga tidak begitu menonjol. Hal ini disebabkan karena etnis India umumnya beragama Islam, seperti kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Kondisi ini mempermudah terintegrasinya masyarakat India dengan masyarakat pribumi. Meskipun secara agama etnis India sama dengan masyarakat Minangkabau, namun tempat tinggal mereka terlokalisasi pada satu kawasan yang dikenal dengan nama kampung Kelling.[23]

Pendatang asing selanjutnya adalah etnis Tionghoa yang telah hadir di Kota Padang jauh sebelum kedatangan bangsa Barat. Sebagai kelompok minoritas, etnis Tionghoa cukup menonjol baik dari segi jumlah maupun

---

[22] Encyclopaedie III tahun 1919,hlm. 235.

[23] Pembentukan kampung Keling dilatarbelakangi oleh sistem perkampungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

aktivitasnya.[24] Dalam struktur masyarakat Kolonial kelompok etnis Tionghoa statusnya berada di bawah strata orang Eropa. Orang-orang Eropa sendiri memiliki status teratas dalam strata sosial saat itu. Berdasarkan penghitungan jumlah penduduk yang dicatat pada tahun 1852 jumlah etnis Tionghoa yang menghuni Padang mencapai 1.140 orang. Jumlah etnis Tionghoa semakin meningkat seiring dengan berkembangnya Muara Padang sebagai kota dan pusat ekonomi melalui pelabuhan *Emmahaven*. Hal ini terbukti jika di tahun 1865 jumlah etnis Tionghoa mencapai 2.973 orang, maka di tahun-tahun berikutnya dengan keberadaan pelabuhan dan meningkatnya volume perdagangan serta banyaknya perubahan kota seperti perubahan infrastruktur, jalan, bangunan pertokoan, perkantoran, menjadikan Kota Padang semakin berkembang. Di tahun 1905 jumlah etnis Tionghoa meningkat menjadi 5.000 orang dan mencapai 8.000 orang di tahun 1930.[25]

Bangsa asing lainnya yang terdapat di Kota Padang adalah bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang menghuni Padang sudah ditemukan semenjak tahun 1871, mereka berjumlah sekitar 154 orang, terdiri dari 19 orang Pegawai Sipil, 87 tentara sewaan dan awak kapal dari berbagai negara seperti, bangsa Belgia, Jerman, Perancis, dan Swiss. Selain itu juga terdapat 48 tentara Belanda yang berasal dari kelompok bumi putra yaitu berasal dari Bugis dan Moor (orang Keling dari India selatan). Selain berprofesi sebagai tentara, ada juga orang Eropa yang bekerja sebagai Tukang.[26] Setelah perang Padri banyak tentara bayaran Belanda yang dipensiunkan, sebagian dari mereka tidak memilih untuk pulang ke negara asal mereka. Para pensiunan ini membentuk kelompok yang dikenal dengan Mardykers.

---

[24] Ada keterangan yang menyebutkan bahwa para pedagang Tionghoa ini telah menjadi pedagang perantara dalam perdagangan produk hutan sepanjang Pesisir Barat Sumatera. Dan meramaikan pelabuhan Sibolga, Barus Nias, Padang , bahkan Bengkulu. Mereka bisa menjadi penghubung antara Pantai Barat dan Semenanjung Malaya. Lihat lebih jauh Jane Drakard A Malay Fronteir: *Unity And Duality In A Sumatera Kingdom*, Ithaca: Coronel Southeast Asian program, 2004, hlm 27-28.

[25] Elizabeth. E. Grave, *The Minangkabau respons to Dutch Colonial Rule in The Nineteenth Century* (Monografi) New York : Cornell University Press, 1981, hlm. 44.

[26] Mardanas Sofyan, *Op. cit.*, hlm. 27.

Sementara untuk kelompok pribumi yang terdiri dari berbagai etnis, antara lain Minangkabau, Jawa, Nias, Batak, dan etnis yang berasal dari daerah lainnya di Nusantara. Etnis Minangkabau merupakan kelompok yang datang dari berbagai daerah pedalaman di Sumatera Barat.[27] Menurut Rusli Amran dalam *Padang Riwayatmu* dulu, penduduk asli Padang merupakan orang-orang pedalaman yang datang dari Solok Selayo dan Luhak Agam. Mereka menyusuri Bukit Barisan dan secara bertahap berkembang sampai di Padang. Arah persebaran orang Solok Selayo, menyusuri hutan kemudian Bukit Karang Putih, Pauh hingga sampai di Muara Batang Arau dan mendirikan pemukiman, sedangkan persebaran orang Agam terlebih dahulu datang dari pedalaman Bukit Barisan hingga sampai di Batang Arau dan mendirikan pemukiman yang terkenal dengan *Rumah Limo Ruang.* Kedatangan orang Solok Selayo jumlahnya lebih besar dengan beragam suku yang kemudian menetap di *Pauh* dan *Lubuk Begalung.*[28]

Selanjutnya keberadaan orang Nias di Padang yang dibawa oleh VOC pada awal abad ke 17. Orang Nias dibawa VOC sebagai budak dan menetap di daerah Purus sebagai migran kemudian membentuk perkampungan yang dinamakan kampung Nias. Selanjutnya pada abad ke 19 orang Nias datang secara berkesinambungan ke Kota Padang. Tahun 1837 tercatat jumlah orang Nias sekitar 1.800 orang, namun pada Abad ke 20 jumlahnya semakin berkurang karena melakukan perkawinan campuran baik dengan orang Tionghoa maupun dengan orang Minangkabau. Akibat dari perkawinan tersebut, identitas orang Nias semakin memudar.

Kelompok pribumi berikutnya yang menetap di Kota Padang adalah etnis Jawa yang merupakan kelompok etnis pribumi kedua terbesar di Padang. Kedatangan etnis Jawa ke Padang berkaitan dengan hubungan kerajaan Majapahit dan kerajaan Minangkabau serta peran etnis Jawa dalam perang Padri, yakni

---

[27] Pencatatan yang dilakukan 1852 mencatat jumlah orang pribumi hanya 35.126 orang, akan tetapi pada tahun 1878 meningkat menjadi 359.400 kemudian jumlahnya stabil hingga tahun 1940 sekitar 407.000 orang. Lebih lanjut Regeling Almanak tahun 1865, Elizabeth E.Graves, *Op. Cit.*, hlm.44.

[28] Rusli Amran, *Op. Cit.*, hlm. 154-156

ketika Sentot Alibasya membawa orang-orang Jawa membantu Imam Bonjol dalam perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Di akhir abad ke 20 orang Jawa dibawa oleh pemerintah Kolonial Belanda sebagai serdadu dan kuli untuk tambang batu bara Ombilin (TBO) di Sawah Lunto, serta kuli perkebunan kopi di Kabupaten 50 Kota.[29]

C. Etnis Tionghoa Padang

1. Terbentuknya Komunitas Tionghoa Padang

Terbentuknya Kampung Pondok tidak terlepas dari perilaku dan kebiasaan orang Tionghoa yang cenderung untuk hidup secara berkelompok. Sebelum kedatangan bangsa Barat di tahun 1663 sudah ditemukan beberapa orang Tionghoa yang tinggal mengelompok di salah satu kawasan di sekitar pinggiran sungai Batang Arau. Bahkan di tahun 1673 sudah ada seorang Nakhoda Banten Tionghoa yang membeli tanah kepada Panglima Padang untuk membangun usaha dan rumah tinggal di sekitar muara sungai Batang Arau yang pada waktu itu masih berupa Bandar.[30] Mereka diketahui telah tinggal di rumah-rumah yang lebih mapan dibandingkan dengan rumah penduduk lainnya dan melayani kompeni, seperti yang mereka lakukan di Batavia.[31]

Freek Colombijn mengatakan bahwa kecendrungan etnis Tionghoa untuk tinggal berkelompok merupakan suatu kebiasaan, bukanlah suatu keharusan. Berbagai sistem pemukiman yang berdasarkan pembagian etnis tidak menimbulkan pemisahan rasial yang absolut seperti halnya dengan nama yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak VOC hingga pemerintahan Hindia Belanda, meskipun setiap kampung diberi nama dengan tegas, namun masing-masing etnis tersebut tidak menetap secara eksklusif. Sistem pemukiman

---

[29] Rusli Amran, *Ibid.*, hlm 249-250, W. Anwar Fallah, dkk, *Op. Cit*, hlm 21.

[30] Christine Dobbin, *loc. cit.*, hlm. 104-106.

[31] Menurut kesaksian seorang pegawai VOC, pada saat orang Belanda tiba di Padang, terdapat sekitar 2000 rumah dengan 15 ribu penduduk, termasuk sudah ditemukan pemukiman orang Cina di sana, Orang-orang Eropa kemudian membangun sendiri pemukimannya. Lihat lebih lanjut William Harrison Du Puy, *Encyclopedia Britannica: a Dictionary of Art, Science and General Literature, Volume 22*, Chicago: Werner Co., 1893, hlm.639-640; Lihat juga Christine Dobbin, *Loc. Cit.*, hlm. 105.

terlihat longgar, bahkan sebelum Perang Dunia II terjadi perpindahan penduduk yang disebabkan oleh berbagai faktor.[32] Melalui pandangan Freek Colombijn, maka dapat direfleksikan fenomena masa lalu, dimana orang Tionghoa bisa tinggal secara bebas berdampingan dengan penduduk setempat hingga ke perkampungan. Perubahan terjadi setelah peristiwa pembantaian etnis Tionghoa di Batavia pada tahun 1740.[33]

Proses pembentukan pemukiman secara alami ini berlangsung secara berkesinambungan hingga pemerintah Hindia Belanda memulai penataan dengan pemberlakuan *passenstelsel (*surat ijin keluar dari pemukiman*)* di tahun 1816. Tahun 1820 Pemerintah Hindia Belanda melanjutkan aturannya dengan memberlakukan sistem pemukiman terpusat pada satu tempat (*wijkenstelsel*) bagi penduduk pendatang.[34] Proses pembentukan pemukiman yang secara alamiah ini berlangsung secara berkesinambungan hingga pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan terhadap penduduk di seluruh wilayah Hindia Belanda berdasarkan kepada Staatsblad no.37 tahun 1835 dan dipertegas kembali dengan pasal 73 konstitusi tahun 1854 dan dilaksanakan dengan peraturan pemukiman dalam Staatsblad, no. 57 tahun 1866.[35] Berdasarkan peraturan ini Pemerintah Hindia Belanda memaksa orang asing (Arab, Tionghoa, Melayu, Keling dan Timur asing lainnya) untuk tinggal di pemukiman khusus.

---

[32] Freeck Colombijn, *Op. Cit.*, hlm 294.

[33] Peristiwa tahun 1740 di Batavia dipicu oleh penderitaan yang dialami oleh etnis Tionghoa akibat kebijakan VOC yang memungut pajak tinggi untuk mengatasi kemunduran pendapatan Batavia. Pajak yang tinggi serta kekejaman VOC melakukan penangkapan saat etnis Tionghoa merayakan Imlek menyebabkan etnis Tionghoa di Batavia marah. Di bawah pimpinan Kapiten Tionghoa kemudian dilakukan demonstrasi pada bulan September 1740. Sebagai balasan atas demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 1740. Belanda melakukan pembantaian secara masal sebanyak 500 orang Tionghoa di Stadthuys (sekarang Museum Jakarta). Lihat lebih lanjut Daradjadi, *Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa- Jawa Melawan VOC*, Jakarta: Kompas, 2013, hlm.27-39.

[34] Sistem ini pertama kali diterapkan pada tahun 1818. Awalnya percobaan dilakukan di Jawa, tetapi kemudian menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Belanda di luar Jawa. P. Tjiook Liem, *De Rechtspositie der Chinezen in Nederlands Indie 1848-1942*, Amsterdam: Leiden Univ.Press, 2009, hlm. 306. Sistem ini pertama kali diterapkan pada tahun 1818. Awalnya percobaan dilakukan di Jawa, tetapi kemudian menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Belanda di luar Jawa.

[35] Erniwati, *Asap Hio di Ranah Min*ang: Komunitas Tionghoa Di Sumatera Barat, Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 65.

Pembatasan pemukiman ini mulai dilaksanakan di Sumatera Barat pada tahun 1854. Sejak itu Pemerintah Hindia Belanda mengharuskan orang Tionghoa untuk tinggal di daerah dan kota-kota tertentu.[36] Pembentukan perkampungan ini dilakukan karena adanya ketakutan Pemerintah Hindia Belanda akan terjadinya percampuran dan kerjasama antara orang Tionghoa dengan Bumiputera.[37] Menurut Furnivall terbentuknya sistem perkampungan juga disebabkan karena adanya stratifikasi penduduk berdasarkan kepada pengelompokan golongan Eropa, Timur Asing, dan Pribumi. Pembagian penduduk ini menimbulkan terjadi jurang pemisah antara pribumi dan etnis lainnya, termasuk dengan etnis Tionghoa yang termasuk ke dalam kelompok Timur Asing.[38] Berdasarkan peraturan tersebut, pemukiman etnis Tionghoa Padang dibangun secara linear di salah satu sisi di sekitar sungai Batang Arau. Pemukiman etnis Tionghoa berbatasan langsung dengan gudang-gudang milik Pemerintah Hindia Belanda, perusahaan swasta, dan gudang-gudang milik orang Tionghoa. (lihat peta I.I)

Peta. 1

Kampung Tionghoa (Kampung Pondok)

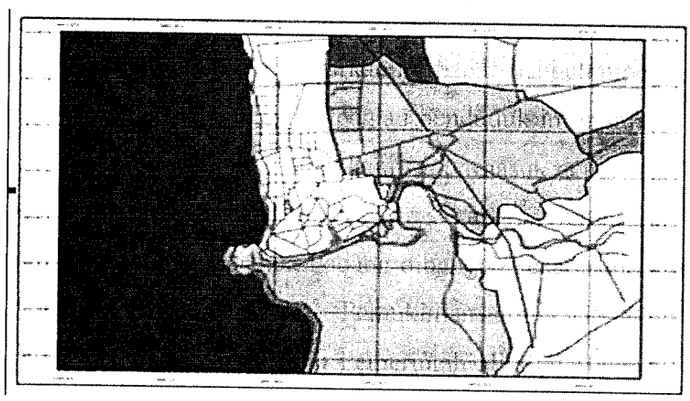

Sumber: Pemerintah Kota Padang

---

[36] *Wijkenstelsel* merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda membentuk perkampungan berdasarkan etnis pendatang. Pemisahan perkampungan ini sebetulnya ditujukan khusus untuk etnis Tionghoa dengan tujuan untuk menghindari adanya percampuran (*almagatie*) dengan penduduk setempat (*pribumi*). Lihat lebih lanjut Staatsblad tahun 1835 No. 37. Erniwati, *ibid,* hlm 67.

[37] Onghokham, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Depok : Komunitas Bambu, 2009, hlm. 32-33.

[38] Charles A. Chopel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 38.

Warna Hijau di dalam peta I.1 menunjukkan lokasi Kampung Tionghoa di Kota Padang. Kawasan Kampung Tionghoa berada tidak jauh dari muara sungai Batang Arau. Etnis Tionghoa memilih tempat tinggal di sekitar muara dengan tujuan supaya dekat dengan akses transportasi sungai dan laut yang merupakan sarana utama dalam perdagangan ekspor dan impor pada waktu itu. Kampung Tionghoa yang terletak di Kecamatan Padang Selatan, memiliki akses laut, sungai, dan darat. Akses laut dan sungai berjarak dekat sekali, bahkan beberapa gudang penyimpanan hasil bumi dan rumah Major Lie Saay halamannya berhadapan langsung ke sungai Batang Arau. Sementara itu akses darat juga terletak pada jarak yang dekat, sekitar 50 m menuju stasiun kereta api Pulau Air. Tahun 1824 orang Tionghoa Padang digambarkan sebagai orang yang tergolong kaya dan mendiami rumah-rumah yang lebih baik dari penduduk lainnya di Kampung Tionghoa. Selain di Padang, Kampung Tionghoa juga terdapat di Solok, Pariaman, Payakumbuh, dan Bayang (Painan).

Jika dibandingkan dengan perkampungan etnis lainnya yang juga ditemukan di Padang, perkampungan etnis Tionghoa memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik ke Tionghoa-an sangat jelas terlihat di sekitar Kampung Tionghoa. Orientasi rumah Tionghoa di Padang dilatar belakangi oleh Feng Sui menghadap ke sungai, gunung atau bukit dan laut. Posisi Kampung Tionghoa menghadap ke sungai Batang Arau, Bukit Gado-gado dan Gunung Padang, serta laut Samudera Indonesia memiliki makna yang dalam. Pratiwo mengatakan bahwa orang Tionghoa selalu memiliki pola tata ruang pemukiman yang strategis, karena itu perkampungan Tionghoa (*Pecinan*) cenderung merupakan area perdagangan yang ideal jika dikaitkan dengan letak dan pola jalannya.[39] Hal ini juga ditemukan di Padang, lengkapnya perkampungan Tionghoa dengan sarana transportasi dan pasar menyebabkan aktivitas kehidupan masyarakatnya pun lebih banyak berkaitan dengan perdagangan.

Bangunan yang ada di sekitar Kampung Tionghoa berbentuk toko berjejer mengikuti alur jalan. Pada umumnya toko-toko tersebut bertingkat dua dan

---

[39] Pratiwo, *Arsitektur Tradisional Cina dan Perkembangan Kota*, Yogyakarta : Ombak, 2010, hlm.49-50.

memiliki fungsi ganda, yaitu lantai dasar untuk toko (usaha) dan lantai dua untuk tempat tinggal. Ciri-ciri rumah toko seperti Padang sebetulnya juga ditemukan di kota-kota besar yang banyak dihuni oleh etnis Tionghoa, seperti di Batavia (Jakarta), Semarang, Surabaya dan kota lainnya. Selain itu, di perkampungan etnis Tionghoa Padang, masih banyak ditemukan bangunan ibadah berupa rumah marga, klenteng, perkumpulan sosial, budaya dan kematian berarsitektur Tiongkok.[40] Di samping rumah yang sekaligus berfungsi untuk tempat usaha, di kawasan Kampung Tionghoa juga ditemukan bangunan-bangunan besar yang digunakan untuk gudang penyimpanan sementara hasil bumi sebelum dibeli oleh pedagang asing.[41]

Setelah menerapkan sistem *Passelstelsel* dan *Wijkenstelsel*, Pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan pembagian masyarakat berdasarkan kepada ras, suku bangsa atau warna kulit. Pembagian seperti ini telah disahkan oleh undang-undang (art. 163 *Indische Staatsregeling*).[42] Belanda di Indonesia menetapkan status etnis Tionghoa perantauan dengan meletakkan landasan "*semi apartheid*" dan membagi warga Negara menjadi tiga bagian: yakni Eropa, Timur Asing (Arab, India, Tionghoa) dan Pribumi.[43] (Lihat bagan 1).

---

[40] Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa akar budaya yang mendasari pertumbuhan budaya dan tradisi Cina sangat kuat tertanam oleh sejarahnya. Kesamaan satu teritorial dan nilai-nilai leluhur yang tercermin dalam ajaran Tao dan Konfusius menjaga kelestarian adat dan tradisi Cina di perantauan termasuk di Asia Tenggara. Lihat lebih lanjut Yin Cheong Cheng, *New Paradigm for Reengineering Education: Globalization, Localization and Individualization*, Dordrecht : Springer, 2005, hlm.79.

[41] Bagi orang Cina, pembangunan rumah –toko (ruko) dan rumah-usaha (rusa) yang mulai marak pada akhir 1980-an di Indonesia bukan merupakan hal baru. Selama ini mereka menyatukan tempat tinggal dan tempat usaha di kedai-kedai, warung dan kios. Sementara itu fungsi loteng sebagai tempat tinggal dan bagian bawah sebagai toko telah dikenal dalam budaya kota Funnan. Lihat lebih lanjut Bernard Phillipe Groslier, *Indocina:Persilangan Kebudayaan*, Jakarta : KPG, 2007, hlm.80.

[42] Onghokham, *Op. Cit.*, hlm. 146.

[43] Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan landasan *semi apartheid* dengan memilah-milah warga negara menjadi tiga bagian, yaitu pertama, golongan Eropa (*onderdaanschap*) dengan kewarganegaraan Staatsburgerschap, dan sistem hukum Eropa *Staadsgemeente (niet-Nederlandsch onderdanen)*. Kedua golongan kelompok Timur Asing dengan kewarganegaraan Vreemde Oosterlingen dengan sistem perkampungan dan perwira sebagai kawula Belanda (*onderdanen*). Ketiga, golongan pribumi yang tinggal di perkampungan yang memiliki hukum adat dengan sistem *Inlandsche Gemeente*. Lihat lebih lanjut Soewarsono, "Surabaya : Kota, Penduduk dan Hubungan Antar Kelompok", Thung Ju Lan (ed), *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia : Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : PMB-LIPI, 2000, hlm. 145-148.

Bagan 1

Penggolongan Masyarakat di Hindia Belanda

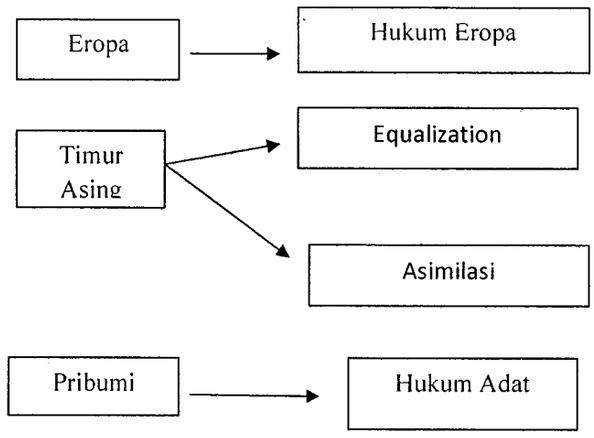

Sumber: Thung Ju Lan, *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia : Sebuah Bunga Rampai,*
Jakarta : PMB-LIPI, 2000, hlm. 145-148.

Penggolongan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di atas sekilas bersifat horizontal, yakni masing-masing golongan etnis mempunyai kekhususan sendiri, baik secara hukum maupun secara sosial. Bagan di atas menunjukkan bahwa golongan Timur Asing (*Vreemde Ossterlingen*) dan pribumi (*Inlanders*) dapat menaikkan status diri melalui proses hukum *equalization* dan modernisasi dengan pendidikan barat dan Kristen, sedangkan untuk melebur ke dalam kelompok masyarakat yang lebih bawah dilakukan melalui proses asimilasi. Bagan di atas menunjukkan bahwa telah terjadi diskriminasi secara terstruktur oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap kelompok Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) termasuk etnis Tionghoa dan pribumi.[44] Khusus untuk kelompok Timur Asing dari kalangan etnis Tionghoa,

[44] Theodorson & Theodorson mengatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategori atau atribut-atribut yang khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, dan keanggotaan kelas-kelas sosial. Lihat lebih lanjut Goerge Theodorson & Achilles G. Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology*, New York, Hagerstown, San Fransisco, London : Bernes & Noble Books, 1979, hlm. 115-116. Latar belakang munculnya diskriminasi rasial bisa sangat

Pemerintah Hindia Belanda menggunakan kelompok ini sebagai perantara (*middleman*) antara pemerintah dengan masyarakat pribumi, terutama dalam perdagangan dan pemungutan pajak.

Sejalan dengan penerapan peraturan di atas, maka untuk memudahkan pemerintah Hindia Belanda mengontrol penduduk asing, kembali diberlakukan sistem pemerintahan berdasarkan kelompok masyarakat. Sistem tersebut dinamakan dengan *Chinese Besture* untuk kelompok Tionghoa yang tergolong ke dalam kelompok Timur Asing. Sistem *Chinese Besture* di Singapore dan Malaya dibangun berdasarkan kepada kekuatan komunitas di dalam kelompok itu sendiri, sedangkan di Hindia Belanda *Chinese Besture* didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bagian dari administrasi di Hindia Belanda.[45] Di dalam struktur *Chinese Besture*, jabatan Kapiten Tionghoa dan Mayor bertugas untuk memberikan kontribusi berupa peningkatan pemasukan dari pungutan pajak bagi Pemerintah Hindia Belanda. Kompensasi dari pekerjaan Kapiten atau Mayor ini adalah pembebasan pajak dan akses-akses di bidang pertanian bagi mereka karena selama menjabat mereka tidak selalu diberi gaji oleh pemerintah Hindia Belanda.[46]

Letnan merupakan pemimpin yang langsung berhubungan dengan masyarakatnya dan lebih banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan pemerintahannya, letnan dibantu oleh *wijkmeester* (kepala kampung). Di kalangan masyarakat kampung Tionghoa, kepala kampung dipanggil dengan sebutan *Incek Wijk*. Letnan bertugas menjadi pemimpin yang paling sering berhubungan dengan masyarakat

---

beragam, tergantung pada banyak faktor, diantaranya faktor ekonomis, faktor politis, faktor sosio-kultural, faktor psikologis, faktor religius, faktor biologis. Lihat juga Dicky Lopulalan, *Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial*, Jakarta : LSPP, 1999, hlm. 15-18. Lihat juga dalam Nasrul Hamdani, *Komunita Cina di Medan : Dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*, LIPI Press : Jakarta, 2012, hlm. 5. Ketentuan Yuridis mengenai pembagian masyarakat oleh pemerintahan Hindia Belanda yakni Eropa, Timur Asing dan Pribumi dalam *Regering Reglement* (RR) 1885 pasal 270 dan dalam *Nederlandsch Onderdanschap van niet Nederlanders* 1910 pasal 126 dan *Indische Staatreglement* (IS) 1925.

[45] Mona Lohanda, *The Kapitan Cina Of Batavia 1837-1942*, Indonesia : Djambatan,2001 hlm. 73.

[46] Mona Lohanda, *Ibid.*, hlm. 97.

sebangsanya. Letnan bertugas mengawasi *wijkmeesters* atau *wardmeeters* di wilayah kekuasaannya.[47]

Setiap permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan diselesaikan secara hierarki dimulai oleh *wardmasteus*, lalu wardmasters akan melanjutkan laporan kepada Letnan. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan oleh Letnan, maka harus langsung dilaporkan kepada Major sebagai pimpinan tertinggi. Kapten adalah opsir menengah yang tugasnya bersifat protokoler dan lebih banyak memposisikan diri sebagai wakil major dalam hal tertentu. Sementara itu, major merupakan posisi yang paling bergengsi, bukan saja karena merupakan jenjang kepemimpinan yang tertinggi, tetapi juga karena posisi dengan kewenangan yang lebih tinggi terhadap komunitasnya. Pentingnya jabatan major terlihat dari kesempatan ekonomi dan keberpihakan Pemerintah Hindia Belanda.[48]

Dari pengertian masing-masing opsir di atas, terlihat bahwa secara implisit, opsir-opsir tersebut pada dasarnya adalah bagian dari struktur Pemerintah Hindia Belanda yang bertugas sebagai polisi bagi bangsa mereka sendiri. Meskipun tidak termasuk dalam struktur Pemerintah Hindia Belanda secara formal, namun opsir-opsir tersebut secara tidak langsung menjadi agen-agen bagi pelaksanaan pemerintahan di Hindia Belanda. Mulanya para opsir-opsir tersebut tidak mendapat gaji, namun setelah kinerja opsir dilihat menurun, masing-masing opsir kemudian mendapatkan gaji dengan ketentuan gaji kapten f 100 per bulan, sedangkan letnan tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah mendapatkan gaji atau tidak.[49]

Opsir ditunjuk dan diangkat oleh komunitasnya berdasarkan kekayaan dan posisinya di dalam komunitas tersebut. Jabatan opsir dapat diteruskan kepada keturunannya. Oleh karena itu, jabatan opsir sering ditemukan memiliki ikatan

---

[47] Wijkmeester bertugas, pertama mengatur orang-orang dan bertanggungjawab menerangkan peraturan-peraturan dan undang-undang pemerintah kepada masyarakat. Kedua untuk mengumpulkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat di kampung tempat kekuasaannya. Natasya Yunita Sugiastuti, *Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)*, Disertasi, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 244-245.

[48] Natasya Yunita, *Ibid.*, hlm. 248-250.

[49] Gaji major dan letnan tidak diketahui. Lihat lebih lanjut Besluit van Commisaries Generaal no 1 tanggal 24 November 1826.

persaudaraan dari generasi ke generasi. Masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap opsir-opsir yang telah mereka pilih. Adanya harapan akan perlindungan dan bantuan ekonomi, menempatkan jabatan sebagai opsir memiliki posisi yang sangat penting untuk prestise. Kedekatan hubungan dengan pemerintah membuat posisi sebagai opsir menjadi strategis secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Posisi sebagai opsir menjadi jabatan bergengsi yang diminati oleh siapa saja, sehingga menimbulkan kompetisi, bahkan konflik untuk mendapatkan jabatan tersebut.[50]

Sebagai status sosial, keluarga-keluarga opsir cenderung berusaha mempertahankan identitas diri mereka melalui lambang-lambang yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai lambang kekayaan dan identitas mereka, terkadang opsir menggabungkan lambang-lambang yang bercirikan ke-Tionghoa-an dengan ciri ke-Belanda-Belandaan. Hal ini terlihat dari lambang-lambang status sosial yang digunakan Major Lie Saay. Major Lie Saay memiliki barang-barang yang bergengsi, seperti kereta kuda bergaya bangsawan Eropa, teropong bintang yang kemudian disumbangkan cucunya Lie Sim Tjoan kepada observatorium Bosccha Lembang Bandung pada tahun 1926, dan benda-benda mewah lainnya.[51]

2. Kebudayaan Kampung Pondok

Kampung Pondok merupakan sebuah kawasan Kampung Tionghoa (*Chinese Camp).* Kampung Pondok memiliki karakter yang kuat dengan karakteristik etnis Tionghoa. Daerah ini merupakan wilayah kecil yang terpisah dengan kepadatan penduduk mayoritas. Kampung Pondok merupakan salah satu bagian dari sudut Kota Padang yang pola pemukimannya mirip dengan pola

---

[50] Jabatan para opsir ini sudah ada di Jawa sejak awal pemerintahan VOC. Ketika efektivitas jabatan ini terbukti, VOC dan Pemerintah Hindia Belanda penggantinya meneruskan dan memperluas penggunaannya sehingga terbentuk sebagai suatu struktur. Ketika dinamisasi terjadi pada struktur ini, mereka menyebutnya sebagai *Chineezen Officieren system.* Lihat lebih lanjut James C. Rush, *Opium to Java : Revenue Farming and Chinese Entreprise in Colonial Indonesia 1860-1910*, Singapore : Equinox Publ., 2007, hlm. 86.

[51] Dr.J. Voute civ.ing, *Annalen V.D Bosscha- Sterrenwacht Lembang* (Java), Volume 1, Bandung : Gbrs Kleijne & Co.N.V, 1933.

pemukiman kota-kota lainnya di Indonesia. Setelah *destuuer* memberikan sertifikat kepada siapa saja yang membuka lahan, banyak orang Eropa yang membangun rumah di sepanjang jalan-jalan utama. Selanjutnya rumah kediaman Eropa tersebut disewa oleh orang Tionghoa atau Indo-Eropa. [52]

Sebagai sebuah perkampungan yang dihuni oleh mayoritas etnis Tionghoa, maka Kampung Pondok memiliki ciri spesifik yang sesuai dengan etnis yang menghuninya. Di Kampung Pondok berkembang sebuah kebudayaan yang menjadi ciri etnis Tionghoa Padang. Etnis Tionghoa memiliki kebudayaan yang hanya dapat ditemukan di kawasan Pondok seperti Barongsai, upacara kematian, Tjap Go Meh dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena di kawasan pondoklah terdapat sarana dan prasarana yang disediakan baik itu oleh Klenteng, Rumah Duka yang dimiliki oleh Himpunan Tjnta Teman (HTT) dan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Krematorium yang menunjang segala aktivitas sosial, budaya dan kematian di Pondok.

Sebagai bagian dari penduduk kota Padang etnis Tionghoa melestarikan kebudayaan leluhur yang mereka bawa dari daratan Tiongkok. Namun, di dalam perkembangan sejarah, kebudayaan yang mereka lakukan di Padang tidak sama lagi dengan kebudayaan yang mereka lakukan di Tiongkok. Hal ini dikarenakan kebudayaan itu telah mengalami segregasi seiring dengan perjalanan waktu. Dalam perkembangannya diketahui bahwa etnis Tionghoa yang tinggal di Kampung Pondok mengembangkan sebuah kebudayaan, yaitu tradisi sembahyang kepada leluhur. Tradisi sembahyang kepada leluhur ini berkembang menjadi identitas bagi etnis Tionghoa yang ada di Padang.

Kampung Pondok dilengkapi oleh klenteng Sie Hien Kiong yang didirikan pada tahun 1841. Pembangunan klenteng diperoleh dari bantuan seluruh etnis Tionghoa dan Chinese Besture (Kapiten dan letnan Tionghoa). Bentuk bangunan klenteng pada awalnya terbuat dari bambu sehingg dikenal dengan Klenteng Bambu. Pada tahun 1861, Klenteng Sie Hien Kiong pernah mengalami kebakaran.

---

[52] Freek Colombijn, *Loc. Cit.*, hlm. 293.

Proses perbaikan Klenteng membutuhkan waktu yang cukup panjang karena membutuhkan dana yang besar serta orang yang ahli dalam pembangunan Klenteng. Pada tahun 1891 Kapiten Lie Saay mengutus anaknya Lie Khong Teek untuk mencari tukang ke Tiongkok. Pendanaan untuk membangun kembali klenteng didapatkan dari menyewakan kios-kios bambu di depan klenteng kepada masyarakat Tionghoa. Selain itu, pendanaan untuk renovasi klenteng juga didapatkan dari beberapa orang donatur yang bernama: Lie Tje Tai (menyumbangkan dana sebesar 300 gulden), Lie Yu Ting, merupakan salah satu anak dari pendiri Hok Tek Tong yang bernama Lie Kauw Keng (menyumbangkan dana sebesar 60 gulden).[53] Klenteng baru direnovasi pada tahun 1894 dengan kepala tukangnya yang bernama Lim Tjin Kuan. Proses renovasi ini dipimpin oleh Lie Ma Say (1894) dan selesai pada tahun 1897.[54]

Sebagai satu-satunya klenteng di Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh agama Taoisme, Budhis, dan Konfusius (Kong Hu Cu) yang dikenal dengan Tri Dharma atau Sam Kauw Hwee.[55] Klenteng Sie Hien Kiong memiliki beberapa dewa seperti Dewi Kwan Im, Dewa Bumi Ho Tek Tjeng Sin, Sian Tjo Kong serta dewa-dewa lainnya. Klenteng Sie Hien Kiong memiliki Genta[56] atau tambur yang dibunyikan sebagai pertanda pelaksanakan ritual sembahyang. Fungsi lainnya dari klenteng adalah sebagai benteng pertahanan. Hal ini dapat dilihat dari posisi klenteng Padang yang menghadap ke laut. Unsur Taoisme pada Klenteng sangat kuat, sedangkan unsur Budhisme terlihat dari simbol-simbol Budhisme yang kuat

---

[53] Monumen di depan Klenteng Sie Hien Kiong lama Padang.

[54] *Terjemahan*, Genta di Klenteng Sie Hien Kiong Padang.

[55] Ajaran Sam Kauw Hwee dipelopori oleh Kwee Tek Hoay yang mengajarkan bahwa ajaran Tao, Budha, dan Kong Hu Cu tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Lihat lebih lanjut Leo Suryadinata, *Mencari Identitas Nasional : Dari Tjoe Baou San Sampai Yap Thiam Hien*, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 70.

[56] Genta di Klenteng Sie Hien Kiong di buat di kota Fuchouw oleh kepala tukang yang bernama Lim Tjin Kuan sebagai pimpinan renovasi yang ke dua pada tahun 1894 atas perintah Kapiten Lie Ma Say. Setelah selesainya proses pembangunan klentang, barulah pada tahun 1897, klenteng diresmikan penggunaannya sebagai tempat ibadah dan berkumpulanya komunitas Tionghoa Padang.

terlihat di bangunan klenteng Sie Hien Kiong. Klenteng Sie Hien Kiong memiliki 5 unsur yakni, kebijaksanaan, integritas, keadilan, tata karma dan kemanusiaan.[57]

Kampung Pondok juga dilengkapi dengan komponen-komponen sosial lainnya, seperti rumah marga dan himpunan sosial, kebudayaan, dan kematian. Secara berkelompok di sekitar klenteng terdapat rumah-rumah marga, yaitu di sebelah Timur klenteng terdapat rumah marga Tan, rumah marga Oei, dan rumah marga Choa, sedangkan di sebelah barat klenteng terdapat rumah marga Lie&Kwee. Rumah marga Gho, Lim, dan Ong terletak di sekitar daerah Pulau Karam. Sementara itu rumah marga Kho belum didirikan karena marga Kho baru ada beberapa tahun belakangan.[58] Selanjutnya di Gang Hok Tek berdiri Himpunan Tjinta Teman (1863) dan Himpunan Bersatu Teguh (1876) di depan klenteng Sie Hien Kiong yang baru di jl. Klenteng Pondok Padang.

D. Organisasi Tionghoa Padang

1. Berakar dari Tradisi Hung dan Kongsi

Proses pindahnya orang Tionghoa dari kampung halamannya di Tiongkok ke tempat tinggal yang baru, salah satunya ke Padang merupakan konsep yang berbeda dengan konsep merantau yang dianut oleh orang Minangkabau atau konsep trasmigrasi bagi orang Jawa, Meskipun ketiga konsep di atas memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan perpindahan secara geografis, namun makna yang terkandung di dalam masing-masingnya berbeda jika digunakan di dalam teks.

Migrasi berdampak luas bagi pelaku, bagi daerah yang ditinggalkan, maupun bagi tempat tujuan yang baru. Bagaiman proses migrasi dilakukan akan berdampak bagi pembentukan karakter migran di tempat yang baru. Untuk

---

[57] Ajaran Taoisme masih kaya akan mistik-mistik dan ritual, sedangkan budhisme merupakan ajaran mengenai alam dan Konfusius adalah ajaran mengenai budi pekerti. Ardian Cangianto, *Wawancara*, 7 November 2014. Padang.

[58] Bersama Klenteng , rumah abu juga menjadi bagian dari ciri fisik dan institusi agama Konghucu. Lihat lebih lanjut Abdulah Dahana dan Nusron Wahid, *Telapak Sejarah Sam Po Kong: Menelusuri Perang Cina Dalam Penyebaran Islam di Indonesia*, Jakarta: DPP Golkar dan Suara Karya, 2005, hlm.57.

menjaga karakteristik diri agar tidak kehilangan identitas, para migran cenderung membentuk wadah untuk menjaga eksistensi diri mereka di tempat yang baru. Oleh karena itu wadah menjadi media yang penting bagi seseorang atau sekelompok migrant di manapun mereka berada.

Secara harfiah wadah merupakan tempat, sarana, atau ruang. Jika dikaitkan dengan definisi wadah pendatang baru, maka dapat dirumuskan sebagai sarana bagi para pedatang untuk berkumpul dan bekerjasama. Dalam sejarah Tiongkok, berkumpul dan bekerjasama sudah menjadi tradisi yang dikenal dengan "*Serikat* (*Hui*) dan *Kongsi*". Serikat (Hui) berkembang sebagai tradisi perlawanan masyarakat Tionghoa menentang kekuasaan kaisar Manchu yang dianggap sebagai bangsa asing. Melalui ide dan nilai-nilai patriotisme serta nasionalisme yang tertanam kuat muncul serikat-serikat pejuang di kalangan masyarakat Tiongkok. Krisis politik di akhir kekuasaan Manchu menjadi puncak aktivitas serikat-serikat tersebut melalui gerakan *Fan Ching Fu Min*g (hancurkan Ching, bangkitkan Ming).[59] Setelah berhasil mewujudkan cita-cita dan perjuangan kebangkitan Ming dengan membentuk Republik Tiongkok, serikat-serikat yang berada di bawah koordinasi Kuo Min Tang (KMT) mengalami segregasi dan kehilangan arah.[60]

Kegagalan KMT mengkoordinir serikat-serikat yang ada menyebabkan serikat-serikat yang semula merupakan pejuang Nasionalis Tiongkok mengalami trasformasi secara sosial, ekonomi, maupun politik menjadi serikat-serikat yang berjuang untuk kepentingan kelompok mereka. Akibatnya serikat-serikat yang ada saling berkompetisi dan bersaing untuk mempertahankan eksisitensi kelompok mereka masing-masing. Fenomena ini berdampak negatife, karena masing-masing serikat berjuang dengan segala cara untuk menjaga keberlangsungan hidup dan eksistensi kelompok mereka. Bahkan sebagian dari serikat Tionghoa ada yang kemudian memperjuangkan masyarakat kelas bawah, seperti melakukan perjuangan kaum buruh dan bergerak di bidang kriminalitas seperti sebagai

---

[59] Comber Leon, *The Triads: Chinese Secret Societies in 1950's*, Singapore: Singapore Heritage Society, 2009, hlm. 23-26.

[60] Jean Chesneaux, *Serikat Rahasia Cina*, Jakarta : Grafiti, 1991, hlm. 192.

tukang pukul, pornografi, buruh, perdagangan manusia, korupsi dan aktivitas lainnya. Perubahan aktivitas ini menjadikan serikat dari kaum garis keras (reaksioner) ke kaum *gangsterisme* menyebabkan serikat berubah menjadi organisasi yang berkonotasi negatif dan dianggap berbahaya, sehingga di akhir abad 19 serikat-serikat tersebut kemudian dinyatakan pemerintah Tiongkok sebagai organisasi terlarang. Selain pemerintah Tiongkok, pemerintah kerajaan Inggris juga pernah menyatakan bahwa perkumpulan rahasia etnis Tionghoa yang ada di Singapura dan Malaya, yaitu Ngee Hieng atau Ngee Hin (M. Yixing), dinyatakan sebagai organisasi yang berbahaya sehingga dilarang untuk ada di kedua wilayah tersebut.[61]

Pengaruh serikat rahasia ini juga ditemukan di Kota Padang. Pada musim semi tahun 1863 polisi menemukan buku yang berisikan anggaran dasar, hukum, sumpah, misteri inisiasi, katekisme (*catechism),* bendera (*flags description*), simbol-simbol, dan tanda-tanda rahasia di rumah seorang etnis Tionghoa yang dicurigai sebagai maling. Saat melakukan penggeledahan, polisi tersebut juga menemukan catatan 200 anggota serikat rahasia yang ada di Padang.[62] Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun dilarang secara resmi oleh pemerintah yang berkuasa, namun adanya orang Tionghoa yang ditemukan memiliki atribut dan simbol-simbol yang dimiliki oleh serikat rahasia menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata anggota serikat rahasia telah menyebar hingga ke berbagai tempat di mana etnis Tionghoa tersebut melakukan migrasi.

Selain serikat, kongsi juga merupakan tradisi yang dibawa oleh etnis Tionghoa hingga ke perantauan termasuk ke Padang. Kongsi berawal dari adanya kerjasama sekelompok orang untuk melakukan usaha.[63] Tradisi bekerjasama ini

---

[61] Jeans Chesneux, *ibid.*; Nasrul Hamdani, *Op. Cit.*, hlm. 72.

[62] Peristiwa yang sama juga ditemukan di Jepara pada tahun 1851dimana saat menggeledah rumah seorang Tionghoa, polisi menemukan sebuah buku milik seorang Tionghoa yang penuh dengan tulisan atau gambar serta berisi UU atau Anggaran Dasar organisasi dari cabang Shantung. Lihat lebih lanjut Schlegel Gustave, *Thian Ti Hwui. The Hung Leagueoe, Heaven-Earth League: A Secret Society With The Chinese in China and India*, Batavia: Jakarta, 1866, hlm. 5.

[63] Kongsi memiliki arti yang sama dengan kerjasama. Kata kongsi sering digunakan dalam aktivitas perdagangan, karena orang cenderung berusaha secara bekerjasama atau yang

berdampak terhadap perekonomian Tiongkok yang tidak pernah menggunakan bank dalam menjalankan usaha hingga tahun 1912. Kongsi menjadi sarana untuk memproduksi uang tabungan tanpa membiarkan uang itu berbunga dan menjadi motivasi bagi orang Tionghoa untuk mendirikan kongsi dagang dan industri. Pada dasarnya kongsi hampir sama dengan bank, namun kongsi tidak memiliki ketentuan hukum seperti halnya dengan bank. Di kalangan orang Tionghoa kongsi memainkan peranan sebagai tabungan yang dapat dijadikan sebagai modal usaha yang bergerak dalam bentuk firma.[64]

J.L Vleming J.r (1989) mengatakan bahwa kongsi adalah organisasi modal usaha etnis Tionghoa. Kong-si merupakan penggabungan dari kata *kong* yakni usaha dan *si* yakni pengelolaan. Dari arti kata ini diketahui bahwa kongsi merupakan pengelolaan hak milik bersama yang disertai dengan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha. Kongsi bersifat legal dan non legal. Untuk menjadi sebuah kongsi yang legal, biasanya harus mendapatkan status NV (Perseroan terbatas), CV (Persekutuan Komanditer) atau *firma* yang bergantung kepada modal dan jenis usaha yang dijalankan.[65] Di Asia Tenggara kongsi adalah firma, klub dan perseroan terbatas (PT). Pertama kali anggota kelompok dibentuk dari yang terkecil, memiliki pemimpin sendiri, dan membuat pembagian hasil kepada para anggota. Bentuk usaha bersama semacam ini sudah menjadi tradisi bagi pedagang terutama untuk modal, mengelola tenaga kerja dengan pembagian keuntungan sesuai dengan porsi masing-masing.[66]

Tradisi berserikat dan berkongsi di atas menggambarkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari etnis Tionghoa cenderung untuk bekerjasama dalam

---

biasa dikenal dengan perkongsian. Kata kongsi bagi etnis Cina Padang tidak saja digunakan dalam aktivitas ekonomi, namun dalam kehidupan sosial kata-kata kongsi sering ditujukan untuk menunjukkan tempat yang berkaitan dengan adanya kegiatan kerjasama, dan sosial, seperti untuk rumah marga dan himpunan sosial, budaya, dan kematian. Lihat J.L. Vleming, "The Chinese Business Community in Netherlands India", dalam M.R. Fernando, *Chinese Economic Activity in Netherlands India : Selected Translation from the Dutch,* Singapore : Institute of Southeast Asia Studies, 1992, hlm. 119.

[64] J.L Vleming, *Kongsi dan Spekulasi: Jaringan Bisnis Cina*, Jakarta: Pustaka Utama, 1988, hlm. 60-62.

[65] Nasrul Hamdan, *Loc. Cit.*, hlm. 70; J.L Vleming, *Ibid.*, hlm. 59-84.

[66] Heidhues Sooners Mary, *Penambang Emas, Petani, Pedagang di Distrik Tionghoa* Kalimantan Barat, Jakarta : Nabil, 2008, hlm 43.

menjalani kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Tradisi ini kemudian menjadi falsafah hidup dan sarana atau wadah bagi etnis Tionghoa untuk melakukan aktivitas dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kecenderungan etnis Tionghoa untuk berserikat dan berkongsi ini juga menjadi tradisi yang terbawa hingga ke tempat migran. Hal ini terlihat dari kecenderungan etnis Tionghoa untuk mencari tempat atau wadah setelah sampai di tempat yang baru.

Di Padang, istilah serikat dan kongsi digunakan secara bersamaan untuk menunjukkan tempat atau wadah. Akibatnya definisi kedua tradisi ini menjadi tumpang tindih, di mana di satu pihak etnis Tionghoa sebetulnya melakukan serikat saat mereka membentuk perkumpulan yang didalamnya juga terjadi kegiatan kerjasama, namun pengertian kedua tradisi tersebut bercampur aduk dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Istilah serikat mengalami segregasi ke dalam istilah kongsi melalui aktivitas mereka di dalam suatu wadah yang dinamakan dengan kongsi.

Pandangan di atas menunjukkan bahwa definisi kongsi menurut Tionghoa Padang adalah wadah atau sarana tempat mereka berkumpul dan beraktivitas. Pada dasarnya kongsi dibutuhkan oleh setiap orang untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan membangun relasi sebagai wujud eksistensi diri. Kongsi pada dasarnya telah terbentuk ketika etnis Tionghoa datang ke Padang. Diawali dari kecenderungan perantau untuk mencari orang yang berasal dari daerah yang sama untuk mendapatkan informasi tentang daerah yang baru didatngai, maka lama kelamaan imigran Tionghoa yang berasal dari berbagai propinsi dan suku yang berbeda bersatu meskipun mereka pada dasarnya memiliki banyak perbedaan, mulai dari perbedaan daerah asal, bahasa, pola hidup, budaya, stratifikasi sosial, dan perbedaan lainnya. Berbagai perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang migrant pertama untuk membentuk kerjasama di antara etnis Tionghoa, karena dasar pembentukan kongsi merupakan penyatuan etnisitas, yaitu yang sama-sama berasal dari daratan Tiongkok.[67]

---

[67] Heidhues Sooners Mary, *Penambang Emas, Petani, Pedagang di Distrik Tionghoa Kalimantan Barat*, Jakarta: Nabil, 2008, hlm.45.

Kebutuhan untuk bekerjasama berdasarkan kesamaan asal dari Tiongkok menjadi awal yang menyatukan etnis Tionghoa Padang. Proses pembentukan kongsi etnis Tionghoa di Padang semakin spesifik seiring dengan meningkatnya jumlah etnis Tionghoa yang datang ke Padang. Keberagaman komposisi pendatang Tionghoa yang semakin banyak ikut mempengaruhi munculnya keberagaman bentuk kongsi etnis Tionghoa yang ada di Padang. Mulai dari pembentukan kongsi berdasarkan ikatan darah (clan) sampai ke kongsi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kepentingan etnis Tionghoa dalam menjaga eksistensi mereka sebagai bagian dari penduduk Kota Padang. Dalam kebudayaan etnis Tionghoa, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting, baik sebagai kerabat maupun sebagai rekan usaha. Bentuk hubungan keluarga sering dijadikan sebagai dasar untuk menjalin hubungan sosial dan ekonomi di dalam komunitas Tionghoa.[68] Pembentukan kongsi berdasarkan marga mulai ada di Padang sekitar akhir abad 19 sampai awal abad 20. Masing-masing marga memiliki leluhur yang berbeda, sehingga setiap marga akan memiliki karakteristik, pelindung, dan leluhur yang berbeda, meskipun ada di antara mereka yang juga melakukan sembahyang terhadap dewa-dewi yang sama.[69]

Dasar pembentukan kongsi juga dapat dikelompokkan berdasarkan propinsi asal di Tiongkok yang lebih dikenal dengan dialek bahasa, yaitu orang Tionghoa yang berdialek bahasa Hokkian (*Hokki*en), orang Tionghoa yang berdialek bahasa Hakka (*Ghek),* orang Tionghoa yang berdialek bahasa Kanton, dan orang Tionghoa yang berdialek bahasa Tiocu.[70] Kongsi berdasarkan dialek bahasa ini tidak berkembang di Padang, karena meskipun secara kuantitas jumlah mereka banyak, namun mereka pada umumnya sudah terkelompok ke dalam kongsi berdasarkan kepada marga dan dua perhimpunan sosial, budaya, dan kematian Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh.

---

[68] David CL Ch'ng, *Sukses Bisnis Cina Perantauan: Latar Belakang, Praktek Bisnis, dan Jaringan Internasional,* terj., Jakarta: PT. Grafiti, 1995, hlm. 45.

[69] Heidhues Sooners Mary,. "*Penambang Emas, Petani, Pedagang di Distrik Tionghoa" Kalbar,* Jakarta : Nabil, 2008, hlm 47. Lihat juga H.Ran Dewall, " Opstand der Chinezen van Monteradoe, Weskust-Borneo 1853-54", *Manuskrip koleksi KITLV H.83.*

[70] Soewarsono, *Orang Cina di Bandung: Sebuah Keterputusan Sejarah, Mely G. Tan (ed), Etnisitas dan Konflik Sosial,* Jakarta: PMB-LIPI, 1999, hlm. 40-41.

Etnis Tionghoa memiliki banyak kongsi yang bergerak dalam berbagai aktivitas kehidupan, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Kongsi-kongsi yang berbagai jenis dan fungsi ini didirikan atas dasar kepentingan untuk menjadi wadah mereka menjaga eksisitensi diri. Dasar dari pembentukan kongsi tersebut berangkat dari kesamaan tujuan yang diikat dengan penanaman ikatan persaudaraan sebagai orang yang sama-sama berasal dari satu suku, satu bangsa, dan satu Negara.[71] Contoh kongsi ini adalah kongsi Lam An Hwe Koan yang terbentuk berdasarkan hubungan kerjasama antara orang-orang yang berasal dari daerah Lam An. Lam An hwe Koan merupakan kongsi Tionghoa yang bergerak di bidang penguburan, penyelenggaraan upacara perkawinan, dan kegiatan sosial untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama bagi pendatang baru yang mengalami kesulitan.[72] Kongsi yang dibentuk untuk keperluan pemakaman, penyelengaraan upacara perkawinan, sosial, dan budaya lainnya adalah Hok Tek Tong yang didirikan oleh Lie Kauw Keng pada tahun 1863, Heng Beng Tong yang didirikan oleh Oei A King pada tahun 1876, Koei Thong Tie Koean yang didirikan oleh Yong A Soe pada tahun 1895. Pada dasarnya ke empat kongsi tersebut memiliki tujuan dan peranan yang sama, namun disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik dan leluhur yang disembah, maka ke empat kongsi di atas menjalankan aktivitas mereka secara masing-masing.[73]

Pada mulanya setiap kongsi yang telah berdiri menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan tujuan pendiriannya, namun semakin kompleknya persoalan yang dihadapi, maka kongsi-kongsi tersebut pun menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan kebutuhan. Bahkan dalam beraktivitas, etnis Tionghoa Padang

---

[71] Mohd. Gede Ismail, *Konflik Antara Kongsi Thay Kong dan Sekutu-Sekutunya dengan Pemerintah Hindia Belanda di Kesultanan Sambas Tahun 1850*, Yogyakarta: UGM Press, 1981, hlm. 91.

[72] Erniwati, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*, Yogyakarta: Ombak, 2007, hlm. 136.

[73] Desi Ratna Wulan Sari, *Konstruksi Gender Berbasis Etnik Kajian Feminis Multikultural Studi Kasus: Perkumpulan Tionghoa di Padang Sumatera Barat*, *Tesis*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011, hlm. 75.

banyak yang menjadi anggota lebih dari satu kongsi. Hal ini terjadi kembali disebabkan karena kebutuhan dan tuntutan lingkungan.[74]

Selain itu, di Padang juga didirikan kongsi yang mengelola masalah kredit untuk etnis Tionghoa. Hwee memiliki arti "*julo-julo*" yang merupakan sistem arisan yang sangat khas di Tiongkok. Kongsi Hwee mengadakan pertemuan yang diatur bulanan, tiap dua pekan, tiga bulan, bahkan ada yang tiap tahun. Sistem Hwee merupakan sistem khas Kanton. Kongsi Hwee yang masih berskala kecil akan menjadi anggota kongsi Hwe yang lebih besar dan akan menjadi anggota Hwe lainnya. Sistem Hwe menyerupai perjudian, namun dalam dunia bisnis Tiongkok, kongsi terkenal dengan nama "*Kong Siong Hwee*", yang artinya "perkumpulan kemakmuran yang meluas". Kongsi Hwe terdapat juga di Jawa dan di kota-kota besar lainnya di Hindia Belanda.[75]

Selanjutnya juga ditemukan kongsi Kim Lam Tong yang didirikan dengan tujuan mengelola sistem perburuhan di pelabuhan Muara Padang. Kim Lam Tong merupakan kongsi yang anggotanya terdiri dari kuli-kuli angkut (kuli pedati) yang menjalankan pekerjaannya sebagai kuli angkut di sekitar pelabuhan Muara Padang. Sampai tahun 1941 diketahui ada 16 kongsi etnis Tionghoa yang ditemukan di Padang, namun tidak diketahui nama dan aktivitas perkumpulan tersebut secara jelas.[76]

2. Organisasi Tionghoa Padang

a. Organisasi Marga

Marga (She) atau nama keluarga adalah pertanda dari keluarga mana seseorang berasal. Sebagai pertanda, marga menjadi identitas genetik dalam silsilah keturunan. Oleh karena itu dalam membuat nama sering kali nama marga menjadi penting untuk dibuatkan, nama marga dalam kebudayaan Barat berada di belakang nama kecil, kebalikannya budaya Tionghoa dan Asia Timur lainnya

---

[74] Jennifer Cushman&Wang Gungwu, Perubahan *Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: PT. Temprin, 1991,hlm 400.

[75] J.L.Vleming Jr, *Kongsi & Spekulasi: Jaringan Kerja Bisnis Cina*, PT. Pustaka Grafiti Press : Jakarta, 1988, hlm. 145.

[76] *Sumatera Bode*, 19 Desember 1941.

meletakkan nama marga di depan. Marga menjadi identitas di dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya (*patriakat*). Marga lebih sering digunakan sebagai identitas diri, sehingga dalam pergaulan sehari-hari marga sering dijadikan sebagai panggilan, sedangkan nama sering disingkat, seperti Gho Tjeng Li menjadi Charli Gunawan.

Dalam perkembangannya kemudian orang-orang yang berasal dari satu marga membentuk organisasi marga yang berasal dari satu suku (*clan*). Organisasi marga berperan sebagai tempat berkumpul dan bekerjasama bagi ornag-orang yang berasal dari satu keluarga. Secara kekerabatan satu marga merupakan satu garis keturunan, namun bagi etnis Tionghoa satu marga belum tentu berasal dari satu daerah di Tiongkok. Meskipun begitu organisasi marga kemudian menjadi tempat berkumpul bagi orang-orang yang berasal dari suku yang sama dan membentuk ikatan persaudaraan meskipun secara silsilah mereka berasal dari propinsi yang berbeda di Tiongkok, seperti marga Lie yang ada di Provinsi Fujien juga akan ada ditemukan di Provinsi Kanton. Oleh karena itu ikatan marga ini mengikat persaudaraan para migran Tionghoa yang tersebar di seluruh penjuru dunia termasuk mereka yang tinggal di Padang. Organisasi marga pertama sekali akan dicari oleh para migran saat datang ke suatu tempat.[77]

Sebagai organisasi yang didasarkan oleh ikatan kekeluargaan, maka aktivitas utama organisasi marga adalah membantu sesama anggota, menyelenggarakan sembahyang kepada leluhur dan dewa-dewa yang diyakini sebagai pelindung, merayakan hari-hari besar Tionghoa, serta mengadakan pertemuan berkala untuk membina hubungan kekerabatan di antara sesama anggota. Selain itu, organisasi marga juga berperan dalam melestarikan kebudayaan dan tradisi leluhur, termasuk menyelenggarakan upacara-upacara yang bersifat kekeluargaan, seperti menyediakan sarana untuk pesta perkawinan. Berikut kegiatan rutin yang dilakukan oleh kongsi marga, di antaranya :

---

[77] Yerry Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar Dari Abad ke 17 Hingga Ke-20*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2013, hlm 115-116. Di Makassar bahkan mereka mendirikan perkumpulan *"New Life Movement"* yakni Sien Seng Ho Djuen Tung Thjoh Tjing Hwee di Tiongkok pada 1934. Perkumpulan ini masih berjalan di Taiwan dengan tujuan untuk memberikan kehidupan baru bagi etnis Tionghoa Makassar. hlm 150-151.

1. Upacara sembahyang Ciap Cu-it
2. Cap Go di gedung pertemuan masing-masing rumah marga
3. Rapat rutin (bulanan atau sesuai keperluan marga)
4. Penerimaan dan pelantikan anggota baru
5. Ritual sembahyang sesuai tradisi
6. Ciak Ciu (makan bersama) dengan waktu yang ditetapkan
7. Malam pertemuan secara bergilir antara satu rumah marga dengan rumah marga yang lainnya
8. Perayaan-perayaan hari besar
9. Kegiatan sosial.[78]

Dari pendataan yang dilakukan secara acak maka ditemukan lebih dari 100 jenis marga etnis Tionghoa di Padang. Jumlah ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa Padang adalah komunitas yang heterogen. Heterogenitas ini akan terlihat mencolok jika masing-masing marga mendirikan organisasi marganya, namun organisasi marga yang ditemukan di Padang hanya delapan marga. Pendirian organisasi marga atau yang familiar disebut dengan kongsi dilatar belakangi oleh jumlah anggota mereka. Hingga saat ini ada delapan organisasi marga yang jumlah anggotanya cukup banyak, yaitu marga Lie yang organisasi marganya bergabung dengan marga Kweek, marga Tan, marga Oei, marga Lim, marga Gho, marga Ong, dan marga Huang.

Marga Lie, adalah salah satu dari sekian banyak marga orang Tionghoa. Marga Lie merupakan marga yang paling banyak dimiliki oleh orang Hakka dan marga yang terbesar di dunia. Marga Lie (*Long Se Tong*) di Padang mendirikan organisasi marga (kongsi Lie) pada tahun 1870. Dipelopori oleh beberapa orang toloh marga Lie yang terdiri dari *Lie Lian Seng, Lie Sim Tjoan, dan Lie Pang Ko*, maka secara resmi kemudian pemerintah Hindia Belanda mengijinkan organisasi

---

[78] Pada dasarnya kegiatan di atas menjadi kegiatan rutin bagi hampir semua rumah marga. Hal ini juga berkaitan erat dengan sistem patrimonial yang berlaku dalam masyarakat Tionghoa, yaitu anak laki-laki sebagai penerus marga. Mengenai dewa yang digunakan sebagai pelindung, biasanya hal itu dikaitkan dengan tokoh yang diagungkan dan dianggap telah berjasa oleh marga tersebut. Lihat lebih lanjut Pax Benedanto, *Kesusastraan Melayu dan Kebangsaan Indonesia, Jilid 10,* Jakarta : KGP, 2007, hlm. 52.

ini untuk beraktivitas. Ketiga tokoh tersebut kemudian menjabat sebagai presiden, Vice Presiden dan Sekretaris. Dengan mengajukan surat pendirian kepada sekretaris Gubernur Jendral Hindia Belanda de Graeff, maka pada tanggal 21 September 1909 organisasi ini diresmikan berdiri dengan presiden pertamanya Lie Lian Seng.[79]

Marga Tan (*Chen*) merupakan marga terbesar ke lima di daratan Tiongkok. Marga Tan berasal dari proses penghargaan yang diberikan oleh Kaisar Zhou Wu Wang (1.066 SM) berupa lahan yang diberi nama Chen (Kabupaten Huaiyang Propinsi Henan) atas jasa-jasa yang diberikan oleh pejabat dalam mengalahkan Dynasti Shang. Pejabat tersebut bernama Guiman lalu mendirikan Negara adipati kerajaan Chen dengan gelar Cheng Hou. Orang-orang yang bermarga Tan di Padang kemudian mendirikan organisasi marga Tan (*Eng Cuan Ton*) pada tanggal 22 Maret 1888 dengan Tuako pertama Tan Siang. Organisasi marga Tan diresmikan pemerintah kolonial Belanda berdasarkan Besluit no. 2, 26 Agustus 1918. Sama halnya dengan organisasi lainnya, organisasi marga Tan juga terdiri dari para kaum laki-laki yang telah berumur di atas 17 tahun. Organisasi marga Tan menghormati leluhur yang bernama Tan Goan Kong yang bergelar Kai Tjiangg Seng Ong. Untuk membantu kegiatan organisasi marga Tan juga membentuk Wanita Himpunan Keluarga Tan (*Ko So Ci Mei Hwee*).[80]

Marga Oei atau yang juga dikenal dengan marga Huang (Ng) menempati urutan kedelapan tersebesar di daratan Tiongkok dan terbesar ketika di Taiwan. Marga Ng dalam dialek Hokkian dan Teociu, sedangkan menurut dialek Cantonis disebut Wong. Asal usul marga Huang dapat ditelusuri dari marga Yin dan marga Jin Tian. Berikutnya adalah Marga Ong (marga Wang dalam bahasa Mandarin) adalah marga terbesar di daratan Tiongkok dan menduduki urutan ke enam di Tiongkok. Kata Ong atau Wang memiliki arti Raja, yang berasal dari sebagian besar marga Ong adalah keluarga kerajaan yang berkuasa. Marga Ong dapat

---

[79] Besluit no. 38 tanggal 21 September 1909 ; Statuten dan Huishoudelijk Reglement (Reglement Ketjil) dari Vereeniging Long Se Tong Padang, De Volharding Padang, 1932.

[80] Lihat lebih lanjut *Buku Kenangan 120 Tahun Himpunan Keluarga Tan Padang*, Padang 29 Maret 2008.

ditelusuri dari asal utama, yaitu marga Ji, marga Zi, dan marga Gui. Sejarah marga Ong di Padang tidak diketahui secara pasti. Marga Ong diketahui pada mulanya dibentuk oleh Ong Kong Kiat yang merupakan seorang pedagang dari Singapura. Ong Kong Kiat menjadikan rumah pribadinya sebagai tempat berkumpul bagi etnis Tionghoa yang berasal dari marga Ong. Marga Ong menyembah leluhur *Ong Shien Tie*. Ong Shien Tie adalah leluhur yang menjadi Raja dari Thai Kuan (Tiongkok) yang anak dari raja ini menyebar dan ada yang sampai ke Medan. Perkumpulan Marga Ong di Padang memiliki perbedaan dengan marga lainnya dimana perkumpulan ini menerima bagi seluruh keluarga yang bermarga Ong untuk masuk ke dalam Perhimpunan Keluarga Marga Ong. Struktur organisasi marga Ong pertama dibentuk pada tahun 1983 dengan Tuakonya Ong Seng Hwat dan Jiko Ong Tji Min. Seperti organisasi marga lainnya, marga Ong juga memiliki organisasi wanita dengan nama Wanita Himpunan Keluarga Ong (WHO) pada tanggal 17 Oktober 2014 yang diketuai oleh Ong Keng Soan.[81]

Marga Lim atau dalam bahasa Mandarin disebut Lin merupakan marga terbesar ke dua di Taiwan dan menduduki urutan ke 17 di daratan Tiongkok. Asal usul marga Lim dari marga Zi dapat ditelusuri hingga Dinasti Shang, Leluhur marga Lim adalah Bi Gan yang juga merupakan paman Raja Shang Zhou Wang, sedangkan marga Bi Gan adalah marga Zi. Bi Gan merupakan penasehat yang kharismatik dan setia memberikan nasehat kepada Raja Shang. Karena tidak menerima kritikan dan masukannya Raja Shang Zhou Wang lalu membunuh Bi Gan. Setelah Raja Shang Zhou Wang digulingkan oleh pendiri Dinasty Zhou (Raja Zhou Wang), Putra Bi Gan yang bernama Jian dianugrahi marga Lin. Marga Liem di Padang berperan untuk membina hubungan persaudaraan dari orang-orang yang berasal dari keturunan Lim. Marga Lim yang memiliki organisasi marga di Indonesia hanya ada 8, salah satunya terdapat di Padang. Secara tidak berkala, masing-masing organisasi marga yang ada di Indonesia (Surabaya, Medan, Pekan Baru, Makasar, Pontianak, Batam, Semarang dan Padang) mengadakan pertemuan tidak rutin sesuai dengan kebutuhan. Organisasi marga

[81] Wawancara dengan pengurus marga Ong, Padang 17 November 2014.

Lim di Padang menjadikan Ma Cho (Ma Zu), yaitu dewi laut sebagai leluhur yang mereka sembah. Setiap tahun akan diadakan arak-arakan kio keliling Kampung Pondok. Organisasi marga Lim Padang berdiri pada tahun 1870 dan meresmikan gedung pertemuan mereka di jalan Pulau Karam pada tahaun 1994.[82]

Marga Gho merupakan marga 10 terbesar di dunia dan dikenal dengan The Big Ten. Marga Gho dikenal karena banyak memegang tampuk kekuasaan dan pemerintahan di berbagai negara, salah satunya di Singapura. Hal ini menyebabkan marga Gho terkenal sebagai orang yang pintar, paling hebat, dan menepati janji dengan baik, bahkan Kong Hu Tzu pernah memuji orang bermarga Gho dengan predikat baik. Contoh keturunan marga Gho lainnya adalah Hwang Tie dan Ibu Raja Jepang. Salah seorang marga Gho yang pernah menjadi dokter pribadi kepercayaan Raja yang diberi gelar: Ho Seng Thay Tee, memiliki nama asli Gho Chin Djin. Ia merupakan keturunan ke-19 dari Gho Kui Cak, anak dari Gho Tiong Yong, anak kedua keturunan Raja yang termasyur. Biasa diberi gelar: Lauco atau cukong atau U Ci.

Raja memiliki anak laki-laki bernama: Gho Thay Pek dan Gho Tiong Yong. Keturunan Gho Tiong Yong ini menempati daerah yang dikenal dengan nama Yan Leng (Provinsi Jiang Xu, Tiongkok), dekat Su Chow, dan Wu Shi di dekat Shanghai. Daerah Wu Shi sendiri dibagi menjadi empat bagian yakni: Kwangtung, Anchoi, Senghauw dan Mingchun. Yan Leng Tong Padang berdiri sejak tanggal 14 Desember 1917, atau 2468 Imlek, bertepatan dengan hari lahir, Shejit Toapekongnya (Gho Kui Cak). Toapekong tanah yang ada di gedung She Gho bernama Hok Tek Peng Djin juga ada Kuan Tek Ya (Kuan Kong), keturunan She Gho terkenal juga dengan wanita-wanita yang cantik jelita di daerah asalnya Su Chow.[83]

---

[82] Wawancara dengan pengurus marga Lim, Padang 15 November 2014.

[83] Padang 21 April 1997 (Shangwee Capgo, 2548 Imlek), disusun oleh Gho Tjeng Lie, berdasarkan kepada penuturan Lauw Tuako Gho Hun Tjeng kepada pengurus dan anggota perkumpulan keluarga Gho.

Organisasi marga Gho (*Jan Leng Tong)* Padang berdiri sejak 14 Januari 1888 (tahun Imlek 2439) dengan ketua pertama bernama Gho Tjong,[84] Kongsi marga tidak diikuti oleh kaum prianya saja, namun juga oleh kaum wanitanya yang bernama Wanita Himpunan Keluarga Gho. Kegiatan Wanita Himpunan Keluarga Gho antara lain seperti demo masak-memasak, penyuluhan informasi, dan kegiatan organisasi wanita Gho lainnya. Anggota wanita Gho mencapai 300 orang, akan tetapi yang hadir pada pertemuan bulanan sekitar 40 orang. Penerimaan anggota baru Wanita Gho berlangsung setahun sekali, saat bulan tiga hari 15 (*Sha Gwee Cap Go*). Kalangan pengurus mengadakan pertemuan dua kali sebulan, pada hari pertama dan kelima belas.[85]

b. Organisasi Sosial, Budaya dan Kematian

Selain organisasi marga, etnis Tionghoa Padang juga tergabung ke dalam organisasi sosial, budaya, dan kematian yang bersifat heterogen, yaitu Hok Teek Tong (HTT) yang berdiri sejak tahun 1863 dengan Tuako pertama Lee Kauw Keng[86] dan Heng Beng Tong (HBT) yang berdiri sejak tahun 1873 dengan Tuako

---

[84] Marga Gho menghormati leluhur *Gho Kui Cak* dengan Tua Pe Kong tanah Hok Tek Peng Djin dan Kuan Tek Ya (Kuan Kong). Setiap Sha Gwee Cap Go diadakan perayaan dan penyembahan kepada para Tua Pe Kong dan dewa-dewa yang disembah. Gho Tjeng Li, Wawancara, Padang tanggal 6 Maret 2009; ANRI, Besluit, 21 Juli 1918, no. 41, bundle Alg. Secretarie.

[85] Kiriman dari Cinang Gho Ing Tiong.

[86] Hok Tek Tjeng Sin merupakan Tua Pek Kong yang disembah oleh orang yang menjadi anggota HTT. Tua Pek Kong di zaman dahulu adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Lihat lebih lanjut Sejarah Hok Tek Tjeng Sin (Dewa Bumi), diterjemahkan dari terbitan bahasa Mandarin pada tahun 1866 dan Anggaran Dasar HTT yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1987. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman Padang,* Padang : Pengurus Himpunan Tjinta Teman Padang, 12 Juni 1987, hlm. 3. Tokoh dan tahun kepengurusan HTT diketahui melalui foto yang ada di sekretariat HTT Padang. Ditemukan perbedaan cara penulisan nama Hok Tek Tong pada HTT Padang dengan HTT Penang. HTT Padang penulisannya dimulai dari kanan ke kiri, sedangkan HTT Penang ditulis dari kiri ke kanan. Arti tulisannya pada dasarnya sama. Perbedaan hanya pada arah penulisannya saja. Prof A. Dahana mengatakan bahwa perbedaan arah pada penulisan huruf disebabkan karena tulisan HTT yang dimulai dari kanan ke kiri masih merupakan tulisan kuno, sedangkan tulisan HTT yang dimulai dari kiri ke kanan sudah dipengaruhi oleh modernisasi akibat pengaruh dari Barat.

pertama Oei A King.[87] Meskipun sudah berdiri sejak lama, namun secara administrasi kedua organisasi ini baru resmi terdaftar sebagai organisasi/perkumpulan yang modern sejak tahun 1895 saat pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan terhadap perkumpulan-perkumpulan Tionghoa.[88]

Anggota HTT dan HBT adalah para laki-laki Cina (*Hiati*) yang telah berusia di atas 17 tahun.[89] Pemilihan untuk menjadi anggota HTT atau HBT didasari oleh pilihan hati nurani dengan konsekuensi mengikuti aturan budaya, yaitu penyembahan terhadap roh leluhur yang berbeda. Hal ini merupakan konsensus yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang telah melakukan pilihan perkumpulan HTT atau HBT. Bagi seseorang yang sudah masuk menjadi anggota HTT, maka orang tersebut tidak akan bisa pindah ke organisasi HBT. Begitu juga sebaliknya jika seseorang sudah masuk HBT, orang tersebut juga tidak akan diterima di HTT. Aturan ini berjalan sesuai dengan kesepakatan lisan antara kedua organisasi tersebut dan hingga saat ini ditaati oleh etnis Tionghoa yang tinggal di Padang. Selain di Padang, HTT dan HBT juga memiliki cabang di beberapa daerah di pedalaman Sumatera Barat, yaitu di Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, bahkan sampai ke Pekanbaru dan Sibolga.

Kegiatan utama dari kedua organisasi ini adalah pertama secara budaya, menyelengarakan upacara sembahyang kepada leluhur atau dewa pelindung, menyelenggarakan upacara-upacara yang berhubungan dengan ritual-ritual tradisi leluhur, seperti perayaan Cap Go, perayaan tahun baru Imlek, dan makan bersama (*Ciat Ciu*). Kedua kematian, yaitu penyediakan perlengkapan, melaksanakan upacara penghormatan jenazah, dan menyelenggarakan prosesi pemakaman secara

---

[87] Heng Beng Tong memiliki Tua Pek Kong Kwan Tee Koen dan dewa pelindung lainnya yang belum bisa diungkapkan. Menurut Statuta kepengurusan HBT periode 1895-1901 diketahui bahwa Tuako pertama HBT bernama Lim A King, namun setelah dilakukan perbandingan data dengan *Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong*, Padang, 4 Juni 1924, Reglement Peratoeran dari Kongtie Heng Beng Tong, Fort de Kock 17 April 1899, dan *Besluit*, tanggal 31 December 1895, nomor 62 diketahui bahwa President (Tuako) pertama HBT bernama Oei A King.

[88] Staatsblad no. 79 tahun 1895; Staatsblad no. 129 tahun 1917.

[89] Aturan usia untuk menjadi anggota HTT atau HBT tercantum dengan jelas dalam pasal di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HTT dan HBT. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman*, Padang 12 Juni 1987; *Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong*, Padang 4 Juni 1924.

tradisional. Ketiga kegiatan sosial, yaitu menyelenggarakan kegiatan sosial, baik untuk kalangan sendiri maupun untuk bakti sosial di daerah yang terkena bencana dalam berbagai bentuk kegiatan (donor darah, bantuan ke panti jompo, sumbangan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, pengembangan pendidikan, dan sebagainya).

Kebutuhan terhadap adanya organisasi kematian disebabkan oleh faktor budaya dan adat istiadat tradisional yang dianut etnis Tionghoa Padang. Adanya dorongan dan kebutuhan tersebut, maka jika mati harus memiliki peti mati dan membutuhkan biaya, ritual, serta tenaga yang banyak untuk mengurus pemakaman menyebabkan kebersamaan dalam organisasi pemakaman sangat penting. Kebutuhan ritual setelah kematian menyebabkan setiap laki-laki yang sudah berumur di atas 17 tahun, merasa perlu untuk memilih masuk ke salah satu dari organisasi pemakaman budaya yang ada di Padang. Pada dasarnya HTT dan HBT adalah organisasi kematian yang memiliki aktivitas yang sama, namun kedua organisasi tersebut dibedakan oleh *Tua Pek Kong* yang mereka sembah. Perbedaan Tua Pek Kong yang disembah mempengaruhi sistem yang dianut dan terbentuknya karakter yang berbeda dari keanggotaan masing-masing organisasi. Bahkan di antara anggota HTT dan HBT terdapat benang merah yang seakan memisahkan kedua kelompok organisasi tersebut.

E. Peranan Organisasi Tionghoa Padang

1. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Penataan pemerintah kolonial Belanda terhadap organisasi Tionghoa yang ada di Padang terjadi karena adanya kekhawatiran terhadap akibat peristiwa perang kongsi yang terjadi antara kongsi Gee Hin dan Gee Hok pada tahun 1854 di Singapura. Konflik antar kongsi tersebut berdampak luas terhadap keberadaan organisasi Tionghoa, tidak saja di Malaka dan Singapura, tetapi juga mempengaruhi keberadaan organisasi atau yang biasa disebut kongsi-kongsi yang ada di Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Inggris yang melakukan pendataan dan strukturisasi terhadap kongsi-kongsi Tionghoa yang ada di Malaya dan

Singapura juga diikuti oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda melalui Staatsblad No. 79 tahun 1855 dan Staatsblad No. 129 tahun 1917.[90] Kebijakan pemerintah kolonial Belanda ini merupakan antisipasi terhadap meluasnya peristiwa perang kongsi yang terjadi di Singapura karena disinyalir pasca perang kongsi tersebut banyak anggota kongsi yang melarikan diri ke wilayah pantai Timur Sumatera. Oleh karena itu, berdasarkan Staatblad tahun 1855 pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan penataan terhadap organisasi-organisasi Tionghoa yang ada di Hindia Belanda.

Meskipun Staatblad tentang penataan organisasi Tionghoa sudah dikeluarkan sejak tahun 1855, penataan terhadap organisasi Tionghoa yang ada di Padang baru dilakukan pada tahun 1894. Hal ini disebabkan karena pada umumnya organisasi Tionghoa yang ada di Padang beraktivitas secara kondusif dan tidak menimbulkan huru-hara dan konflik seperti halnya di Malaya dan Singapura. Hal ini juga terjadi karena jumlah komunitas Tionghoa yang sedikit serta peran etnis Tionghoa dalam perekonomian Padang tidak begitu mencolok. Selain itu, konsentrasi pemukiman Tionghoa melalui kebijakan *wijkensteel* dan *passelstelsel* yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda sudah membatasi aktivitas organisasi Tionghoa tersebut. Di samping itu, masyarakat dan adat Minangkabau juga ikut menjadi salah satu faktor mengapa di Padang gejolak dan persaingan antar organisasi Tionghoa tidak terjadi.

Meskipun secara politik organisasi Tionghoa di Padang dapat dikatakan aman, namun ternyata peristiwa konflik antar kongsi di Singapura ikut menjadi pendorong pemerintah kolonial Belanda menata organisasi yang ada di Padang. Penataan organisasi dilakukan pertama kali melalui proses pendaftaran ke Departement van Justice Gubernur Pantai Barat Sumatra.[91] Setelah itu pemerintah kolonial Belanda melalui Departement van Justice akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi berupa reglement organisasi dan dokumen tokoh yang mendaftar. Untuk memenuhi syarat-syarat administrasi tersebut, maka Heng Beng Tong untuk pertama kalinya membuat aturan kongsi (*Reglement*) yang

---

[90] JL. Vleming Jr, *Kongsi dan Spekulasi: Jaringan Kerja Bisnis Cina*, Jakarta: PT. Temprin, 1989, hlm.10.

[91] Departement van Justitie, Ochtendrapport van 5 September 1895 No.1.

sekaligus berfungsi sebagai aturan hukum bagi anggotanya. Selain menyiapkan reglement Heng Beng Tong juga secara administrative harus menyiapkan struktur organisasi sebagai langkah awal menjadikan Heng Beng Tong sebagai organisasi modern. Di dalam struktur Oei A King diangkat sebagai President pertama Heng Beng Tong untuk periode 1895-1901.[92]

Proses pendaftaran Heng Beng Tong sebagai organisasi resmi ternyata tertunda sampai tahun 1895. Hal ini disebabkan karena Oei A King sebagai President dicurigai terlibat atau merupakan bagian dari kongsi Gee Hin yang ada di Malaka. Berdasarkan kepada Brief Gouvernements Sekretaris No. 2775 Buitenzorg tanggal 31 Desember 1895 dibahas mengenai persetujuan peraturan baru tentang Heng Beng Tong sebagai sebuah yayasan yang diakui sebagai badan hukum. Keputusan ini diambil atas nasehat juru bahasa Tiongkok di Pantai Barat Sumatera tuan A. E. Moll mengenai dugaan bahwa organisasi ini merupakan bentuk dari organisasi rahasia kongsi Gee Hin yang disamarkan. A.E. Moll meragukan keberadaan Heng Beng Tong karena dianggap sama dengan Gee Hin yang banyak menimbulkan persoalan di Karesidenan Pantai Timur Sumatera (mengenai pemeriksaan Kongsi Gee Hin) di muat dalam Javasche Courant 8 dan 9 Juni 1885. Di dalam Javasche Courant tidak disebut namanya tetapi Gubernur berpendapat bahwa sifat organisasi rahasia Tionghoa menurut penilaian guru besar Leiden, Dr. J.J.M.D. Groot biasanya tidak lebih berbahaya dibandingkan apa yang diduga orang berdasarkan pendapat para penulis sebelumnya (kongsi di Borneo). Oleh karena itu keberadaan organisasi Tionghoa bisa berbeda antara yang berada di Pantai Timur Sumatera dengan yang di Pantai Barat Sumatera.

Perbedaan lainnya juga akan terlihat dari segi jumlahnya yang lebih banyak di Pantai Timur Sumatera dibandingkan dengan jumlah etnis Tionghoa yang di Pantai Barat Sumatera. Tuan A.E. Moll mulanya menduga organisasi Heng Beng Tong akan memberikan kesulitan bagi aparat keamanan namun untuk memudahkan pemerintah Hindia Belanda mengontrol kegiatannya dan menghindari Heng Beng Tong agar tidak bekerja secara diam-diam, maka Heng Beng Tong diizinkan berdiri. Setelah melalui proses pemeriksaan dokumen yang

[92] Periode masa bakti Heng Beng Tong, mulai tahun 1895-1995.

panjang akhirnya Oei A King dinyatakan bersih oleh Departement van Justice dan A.E.Moll pun akhirnya menyatakan bahwa organisasi Heng Beng Tong tidak berbahaya bagi ketertiban umum dan bersedia sebagai penjaminnya. Sejak itu Heng Beng Tong disahkan sebagai organisasi Tionghoa yang legal dan dapat menjalankan aktivitasnya. Pendirian Heng Beng Tong juga diterima oleh wali nagari sebagai perwakilan dari penduduk Minangkabau. Setelah mendapatkan pengakuan dari pemerintah kolonial Belanda, dengan mengatur pendirian organisasi (kongsi) dalam Staatsblad No. 79 tahun 1855 dan Staatsblad No. 129 tahun 1917.[93] Sejak itu Heng Beng Tong mulai membuka diri dan berani untuk tampil di muka umum.[94]

Peresmian Heng Beng Tong sebagai organisasi resmi berdampak terhadap interen organisasi, di mana perkumpulan yang semula dikelola secara sederhana, tetapi setelah tahun 1895 perkumpulan ini mulai terkoordinir dengan adanya pembentukan susunan badan pengurus berdasarkan buku AD/ART dan keputusan rapat pada tanggal 31 Desember 1895. Dalam perkembangannya, di masa pemerintahan kolonial Belanda, Heng Beng Tong mengalami transformasi dari kongsi atau perkumpulan yang dijalankan secara konvensional menjadi organisasi modern dengan aktivitas yang terstruktur dan terkontrol. Sebagai akibat penyesuaian dengan modernisasi AD/ART Heng Beng Tong juga menggunakan istilah-istilah Tionghoa dan Belanda untuk nama jabatan masing-masing kepengurusan. Organisasi Heng Beng Tong di masa pemerintahan kolonial Belanda tidak mengalami perkembangan yang signifikan, karena pada masa itu Heng Beng Tong memfokuskan kegiatannya di bidang sosial, budaya, dan kematian.

Selain organisasi Heng Beng Tong, sistem pemerintah kolonial Belanda ini juga mengakibatkan Hok Tek Tong menjadi organisasi yang legal dan seluruh aktivitasnya, baik kegiatan intern maupun ekstern berada di bawah kontrol pemerintah kolonial Belanda. Tuako pertama dari Hok Tek Tong setelah distrukturisasi adalah Lim Tai Tjiang. Sebagai organisasi yang mewadahi etnis

---

[93] JL.Vleming Jr, *Op. Cit.*, hlm.10.
[94] Brief Gouvernements Secretaris no 2775 Buitenzorg 31 Desember 1895.

Tionghoa untuk berkumpul, berinteraksi dan menjalin relasi di antara sesama anggota maupun dengan pihak di luar organisasi, maka Hok Tek Tong memiliki peranan penting sebagai tempat perantau baru untuk mendapatkan pertolongan, baik tempat tinggal, pekerjaan, bersosialisasi, dan bantuan sosial lainnya. Untuk periode awal tahun 1894 Hok Tek Tong berperan besar terhadap pendatang baru dengan memberikan surat pengantar (*introductie*) selama satu bulan.[95] Wewenang ini diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada Hok Tek Tong agar setiap pendatang baru mudah didata dan dikontrol oleh pemerintah kolonial Belanda.

Setelah pemerintah kolonial Belannda melakukan penataan secara administrasi aktivitas Heng Beng Tong menjadi terbatas dan harus seijin pemerintah kolonial Belanda. Aktivitas perhimpunan pada masa ini sangat terbatas di sekitar Kampung Pondok saja. Akan tetapi aktivitas rutin Heng Beng Tong sebagai organisasi sosial, budaya, dan kematian tetap berjalan secara normal. Aktivitas rutin Heng Beng Tong antara lain menyelenggarakan upacara kematian bagi anggotanya yang meninggal, menyelenggarakan arak-arakan Sipasan untuk memperingati Tjap Go Meh dan ulang tahun Heng Beng Tong meskipun hanya untuk di kawasan Kampung Pondok saja. Jika melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, maka akan dianggap sebagai pengkhianat dan organisasi terancam ditutup.

Aktivitas organisasi lainnya seperti rapat diselenggarakan secara rutin setiap bulannya berdasarkan kebutuhan membahas mengenai hutang-hutang anggota dan pergantian pengurus, persiapan acara Tjap Go Meh, dan acara-acara penting bagi etnis Tionghoa dalam hal sosial dan budaya. Rapat harus dilaporkan kepada pemerintah dan dihadiri oleh Chinese Bestuur. Selain itu Heng Beng Tong juga ikut berperan dalam sidang bestuur Tionghoa Hoa Hwe Koan dan beberapa anggota organisasi yang berasal dari organisasi lainnya (*Siang Hwe*) membahas mengenai pengurus dari Ay Kok Koan yang pada saat itu akan dilaksanakan pada Rabu 11 Agustus 1915 di gedung Tiong Hoa Hwe Koan.[96]

---

[95] Statuten Van de Vereniging Hok Tek Tong Padang Sumatra Weskust, Pasal 8 tahun 1894.

[96] *Hoa Po*, no 033 tanggal 14 Agustus 1915 *"Chabar THHK Padang Ay Kok Koan"*.

Jika ditinjau dari segi kegiatan yang telah dilakukan, Heng Beng Tong memiliki kegiatan utama yakni, pertama secara budaya, menyelengarakan upacara sembahyang kepada leluhur atau dewa pelindung, menyelenggarakan upacara-upacara yang berhubungan dengan ritual-ritual tradisi leluhur, seperti perayaan Cap Go, perayaan tahun baru Imlek, dan makan bersama (*Ciat Ciu*). Kedua kematian, yaitu penyediakan perlengkapan, melaksanakan upacara penghormatan jenazah, dan menyelenggarakan prosesi pemakaman secara tradisional. Ketiga kegiatan sosial, yaitu menyelenggarakan kegiatan sosial, baik untuk kalangan sendiri maupun untuk bakti sosial di daerah yang terkena bencana dalam berbagai bentuk kegiatan (donor darah, bantuan ke panti jompo, sumbangan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, pengembangan pendidikan, dan sebagainya).

Tidak jauh berbeda dari Heng Beng Tong, Hok Tek Tong juga memiliki aktivitas yang hampir sama, yakni menyelenggaraan ritual kematian yang diatur sedemikian rupa di dalam Reglement Kecil Hok Tek Tong yang diterbitkan pada tahun 1894. Hok Tek Tong memiliki aturan yang tegas untuk persoalan yang berkaitan dengan upacara kematian. Setiap anggota yang tidak memiliki kelainan jiwa dan berumur di bawah 60 tahun, maka akan mendapat *Pek Toa* sebagai panggilan untuk menghadiri upacara kematian (*Songsu*). Jika anggota yang mendapat *Pek Toa* tidak hadir di dalam upacara kematian anggota atau keluarga yang meninggal, maka anggota tersebut akan dikenakan denda yang harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku.[97]

Prosedur yang harus diikuti jika ada anggota atau keluarga anggota yang meninggal dunia adalah dengan mengantarkan lilin ke organisasi sebagai pemberitahuan bahwa anggota keluarganya ada yang meninggal. Organisasi memutuskan mengenai pelaksanaan upacara kematian, mengikuti aturan lama seperti yang tertulis di dalam Reglement Kecil Pasal 21.[98] Terdapat berbagai

---

[97] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, tanggal 27 juni 1930.

[98] Jika dalam waktu bersamaan ada lebih dari satu orang anggota Hok Tek Tong yang meninggal, maka pelaksanaan upacara akan didahulukan bagi anggota keluarga yang mengantar lilin pertama. Untuk jadwal pemakaman pertama dilakukan pada jam 10.00 WIB dan yang kedua pada jam 14.00 WIB. Semua pengurus dan anggota diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan tersebut. Lihat lebih lanjut Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 4 Februari 1939.

jenjang fasilitas dan penghormatan yang diberikan kepada anggota Hok Tek Tong, terutama bagi yang menduduki posisi sebagai pengurus atau pejabat *Chinese Bestuure.*[99]

Foto 1

Arak-arakan Pemakaman Tempo Dulu

Sumber: Himpunan Tjinta Teman Padang

Selain melaksanakan sembahyang kepada leluhur dan upacara kematian, Hok Tek Tong juga secara rutin merayakan hari-hari besar Tionghoa, seperti *Imlek* dan *Tjap Go Meh.* Untuk memeriahkan perayaan Imlek, Hok Tek Tong menyelenggarakan permainan-permainan dan keramaian-keramaian sebagai ungkapan kegembiraan menyambut pergantian tahun. Pada saat Tjap Go Meh, perayaan ditutup dengan menyelenggarakan atraksi budaya Tionghoa seperti arak-arakan Tuapekong, Sipasan, Liong, dan Barongsai.[100] Perayaan diselenggarakan tergantung sepenuhnya kepada keputusan para pengurus dalam rapat yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pemerintahan saat itu.[101]

Untuk menegakkan peraturan dan menjalankan disiplin organisasi tidak saja mengatur anggotanya secara organisatoris, tetapi juga ikut dalam persoalan pribadi sekalipun seperti ke dalam persoalan rumah tangga. Ketika akan melakukan pernikahan anggota Hok Tek Tong diwajibkan melapor terlebih dahulu kepada organisasi dengan membawa sepasang lilin dan menjamin kalau

[99] Reglement Kecil Hok Tek Tong, Pasal 33 tahun 1894.

[100] Permainan dan keramaian yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Hok Tek Tong tidak selalu sama, tergantung kepada hasil rapat pengurus dan situasi politik negara saat itu. Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 20 Februari 1931.

[101] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 21 September 1933.

calon istrinya adalah orang yang baik tanpa membedakan suku Tionghoa atau tidak.[102] Hal ini dilakukan karena meskipun yang menjadi anggota organisasi adalah laki-laki (*Hiati*), namun para istri dan anak-anak anggota sepenuhnya dilindungi oleh organisasi.

2. Masa Pendudukan Jepang

Kekalahan Belanda atas Jepang menyebabkan terjadi perubahan politik di Indonesia. Pendudukan Jepang berdampak pada gangguan secara politik, ekonomi dan sosial tidak saja terhadap masyarakat pribumi namun juga dialami oleh etnis Tionghoa. Meskipun kondisi politik tidak mendukung, organisasi Tionghoa Padang seperti Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong masih berlangsung meskipun hanya melakukan upacara sembahyang dan penyelengaraan upacara kematian. Sementara aktivitas sosial dan budaya lainnya yang membutuhkan perayaan tidak terlihat dan sulit untuk dilacak lebih jauh karena persoalan data yang tidak mendukung penulisan pada bab ini. Meskipun pada masa ini gerakan Tiong Hwa Hwe Koan sebagai gerakan Nasionalis Tiongkok juga turut ikut andil mengkoordinir situasi di Kampung Pondok, namun situasi keamanan sangat tidak kondusif. Banyak pengungsian dan pelarian etnis Tionghoa disinyalir banyak yang kemudian menjadi anggota Heng Tong dan Hok Tek Tong.

Transisi antara Belanda dengan Jepang menyebabkan posisi Heng Beng Tong dan Hok Tek Tong mengalami pasang surut dengan adanya Perang Tiongkok dan Jepang pada tahun 1942 dan 1943. Ketika terjadi bencana alam dan kekalahan Tiongkok terhadap Jepang menyebabkan banyak perantauan memberikan bantuan. Gerakan yang diberikan termasuk di Sumatera Barat tidak terorganisir dengan lembaga secara teratur. Tetapi, tingginya rasa cinta terhadap leluhur dapat dilihat dari banyaknya bantuan yang diberikan oleh etnis Tionghoa baik berupa dana (uang) yang dikumpulkan oleh kedua organisasi sosial, budaya, dan kematian. Selain memberikan bantuan berupa moril dan materil, organisasi Heng Beng Tong dan Hok Tek Tong juga ikut dalam gerakan politik Tiongkok,

---

[102] Reglement Ketjil Hok Tek Tong Padang, Pasal 20 tahun 1894.

seperti memberikan perlindungan terhadap spionase Tiongkok yakni Yu Ta Fu yang berada di Payakumbuh dengan bekerja sebagai penerjemah bagi Jepang serta memberikan bantuan berupa uang untuk Tiongkok.[103] Yu Ta Fu merupakan orang yang mengumpulkan uang pada tahun 1942-1943 untuk pemerintah Tiongkok.[104]

Yu Ta Fu adalah seorang tokoh asal Tiongkok daratan yang menjadi pahlawan bagi etnis Tionghoa di Payakumbuh dan juga masyarakat Payakumbuh. Pertengahan tahun 1945 Yu Ta Fu hilang, ia dibunuh oleh tentara Jepang di Padang Hijau (Bukittinggi). Yu Ta Fu datang ke Payakumbuh melalui jalur Tiongkok-Singapura-Riau-Payakumbuh pada tahun 1937. Ia bekerja sebagai penerjemah bagi Jepang ketika Jepang masuk ke Indonesia dan bekerja di pabrik Sophie (minuman). Ia juga merupakan salah satu agen Tiong Hoa Hwe Koan.[105]

Pada tahun 1942, terjadi perubahan yang signifikan terhadap Hok Tek Tong sebagai sebuah organisasi etnis Tionghoa. Notulen rapat pada periode ini menyesuaikan diri dengan penanggalan dan aturan yang diberlakukan oleh Jepang, bahkan selama tahun ini Hok Tek Tong hanya menyelenggarakan pertemuan pengurus sebanyak empat kali.[106] Kegiatan rutin yang masih dilakukan hanya terbatas kepada penyelenggaraan upacara kematian (*songsu)*[107] dan Tjiat Tjioe meskipun diselenggarakan secara sangat sederhana. Hal ini terlihat dari dibatasinya jumlah meja untuk anggota dan pengurus yang menghadiri Tjiat Tjioe dikarenakan harga kebutuhan pokok yang mahal pada saat itu.[108]

---

[103] Tuako, Jiko, Sekretaris, *Wawancara*, 23 November 2013, HBT Payakumbuh.

[104] Sinshe, Sekretaris, *Wawancara*, 14 Juni 2014, HBT Padang.

[105] Anggota Heng Beng Tong Payakumbuh pernah mengunjungi Nantong dan disambut oleh pemerintah Tiongkok khususnya pemerintahan Nantong Tiongkok serta di Nan tong juga terdapat sekolah Yu Ta Fu. Pintu masuk ke Payakumbuh dulunya adalah di Bukit Ngalau (kuburan banyak terdapat di sana) yang memiliki mitos ketika Jepang akan menyerang Payakumbuh, namun di bukit Ngalau ada api besar yang menyebabkan Jepang tidak berani untuk datang ke Payakumbuh. Wawancara 23 November 2013 dengan HBT Payakumbuh.

[106] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, Senin tanggal 8 Nichi, 2 Gatsu Sjowa 18/2603= 4 Tjhia Gweek 2494, Senin 14 Djeen Sjowa 18/2603=12 Gogweek 2494, 14 Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiagweek 2494), dan 14 Jumat Sjowa 19/2604= 19 Tjap Dji Gweei 2494.

[107] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 14 Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiatgweek 2494)

[108] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 14 Jumat Sjowa 19/2604= 19 tjap dji gweei 2494 dan Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 8 Nichi 2 Gatsu Sjowa 18/2603= 4 tjhia gweek 2494.

Meskipun secara politik hubungan antara Tiongkok dengan Jepang tidak harmonis pasca Jepang menduduki Tiongkok, namun secara politik di Indonesia, Tiong Hwa Hwe Koan sebagai sebuah organisasi Nasionalis Tiongkok masih eksis untuk menjalankan misinya. Atas pengawasan dari pemerintahan Jepang melalui Kikuchi dari Jkari Butai, maka Hok Tek Tong diminta untuk mengirimkan lima orang utusan menghadiri pertemuan di gedung Tiong Hwa Hwe Koan Padang. Utusan Hok Tek Tong terdiri dari Te Sek Thim, Lie Tjhoam Goan, Kho Sim Kong, Tjoa Bin Eng dan Tan Goam Siai.[109] Dengan berafiliasi bersama Tiong Hwa Hwe Koan, Hok Tek Tong masih bisa menjalankan aktivitasnya meskipun situasi politik tidak mendukung. Berikut adalah struktur pengurus Hok Tek Tong pada masa pendudukan Jepang:

President	: Te Sek Thim
Vice President	: Kho Sim Kong
Hoofd Komisaris	: The Se Tjay
Angkoen	: Kho Tjik Tjoan
Komisaris	: Tan Goan Sioe
Bescheemheer	: Lie Sim Hong

Kondisi politik menyebabkan bidang kematian Hok Tek Tong tidak menjalankan perannya sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, pengurus di bidang ini dibubarkan dan dibentuk aturan baru khusus mengenai upacara kematian sebagai berikut:[110]

a. Mengenai upacara kematian bagi laki-laki yang belum menikah sampai umur 21 tahun dapat meminjam ***pemikad hiong*** atas tanggungan pemiliknya dengan surat bertanda tangan mengenai umurnya.

b. Perempuan yang masih gadis mendapatkan pinjaman ***pemikad hiong***.[111]

---

[109] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 14 djeen sjowa 18/2603=12 gogweek 2494.

[110] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 14 Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiatgweek 2494).

[111] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 14 (Djeen Sjowa 18/2603= 12 Gogweek 2494).

c. Mengenai *Songsu*, anggota yang mendapat karcis putih (Pekthoa) artinya harus menolong untuk memikul secara bergantian dan mengantar peti mati sampai di makam dengan tertib dan sopan tidak boleh membuat keributan.

d. Bagi Tethao, Pengurus, dan Anggota yang telah merasa lelah memikul boleh digantikan oleh anggota lain yang belum memikul, tapi tidak boleh berjauhan dari peti mati. Tidak diizinkan membawa sepeda atau jalan memutus di Gang Klenteng, tidak dibolehkan menunggu di jenjang Bukit Sinthiong, sampai dimakam sebagaimana biasa dan pemikul Liong serta benda lainnya harus dibawa turun.

e. Jika anggota dipanggil menghadap rapat tetapi tidak datang atau mendapat Pekthoa (karcis putih), tapi tidak pergi *songsu*, maka untuk pertama dan kedua akan didenda. Jika sampai tiga kali, maka anggota tersebut diberhentikan (ditoeh), namun jika pengurus yang tidak hadir atau datang saat mendapat Pekthoa (karcis putih) dan tidak pergi songsu, maka untuk pertama dan kedua akan didenda, sedangkan yang ketiga diberhentikan dari pengurus kemudian diturunkan menjadi anggota biasa berdasarkan putusan rapat pengurus.

f. Saat ada pengurus yang meninggal, dihari berkuburnya semua pengurus dan Tethao yang kena dienst harus memakai roiuwband (kain hitam) di lengan sebelah kiri, dari rumah yang meninggal sampai dikuburnya baru boleh dikembalikan band tersebut kepada pegawai yang menjaga rumah perkumpulan.[112]

Perubahan aturan ini dilakukan untuk menyederhanakan penyelenggaran upacara kematian, karena secara politik keamanan Kota Padang tidak stabil.

3. Setelah Kemerdekaan

a. Periode (1945-1950)

Saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Secara *egocentris*

---

[112] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 14 (Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiatgweek 2494).

masyarakat Indonesia meraih kemerdekaan dan melepaskan diri dari penjajahan. Sebaliknya etnis Tionghoa berada pada posisi yang dilematis. Hal ini dikarenakan karena pada masa pemerintah kolonial Belanda etnis Tionghoa termasuk ke dalam masyarakat kelompok Timur Asing yang di dalam struktur masyarakat kolonial berada di atas pribumi. Kondisi ini secara psikologis menimbulkan perubahan yang signifikan bagi etnis Tionghoa yang tinggal di Hindia Belanda, termasuk yang tinggal di Padang. Sebagai organisasi etnis Tionghoa yang telah berdiri sejak pemerintahan Hindia Belanda, perubahan ini tentu juga dialami oleh organisasi Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong. Kedua organisasi ini secara struktural harus menyesuaikan diri dengan perubahan politik Negara Indonesia, meskipun secara keamanan kondisi Padang saat itu dapat dikatakan belum kondusif.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II mengakibatkan Padang berada di bawah pengawasan Sekutu. Sekutu dengan tentara Inggris yang berasal dari serdadu *Gurkha*[113] mendarat di Padang dan melakukan perlindungan terhadap etnis Tionghoa yang tinggal di kawasan kampung Pondok. Perlindungan terhadap etnis Tionghoa hampir dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. Seperti halnya dengan kota-kota lainnya, Kampung Pondok dijaga dan mendapat bantuan makanan serta kebutuhan sehari-hari dari Sekutu. Perlindungan Sekutu terhadap etnis Tionghoa Padang, boleh jadi disebabkan karena kedekatan etnis Tionghoa Padang selama ini dengan pemerintah kolonial Belanda.[114] Di balik keistimewaan yang diperoleh, sebetulnya etnis Tionghoa berada pada posisi yang sangat terjepit. Perlindungan yang diberikan oleh Sekutu menyebabkan etnis Tionghoa terlihat seakan berpihak terhadap kekuasaan Sekutu. Perlindungan ini tentu saja

---

[113] Tentara Gurkha adalah tentara Inggris yang berasal dari Nepal. Tentara Gurkha sangat patuh kepada Ratu Inggris. Tentara Gurkha memiliki ciri-ciri fisik berkulit hitam, tinggi, sebagian memiliki rambut ikal. Lihat lebih lanjut Mestika Zed, "Kota Padang Pada Masa Revolusi 1945-1950", *Hasil Penelitian*, Kerjasama Pemerintah TK. II Kodya Padang dengan DHD 45 Sumatera Barat, Padang, 1998, hlm. 101-102.

[114] Pendudukan Sekutu di Sumatera Barat berakhir pada bulan Oktober 1946 dan tentara Belanda mengambil alih posisi yang ditinggalkan tentara Sekutu. Lihat lebih lanjut Koesalah Soebagyo Toer, *Kronik Revolusi Indonesia, Volume 2,* Jakarta : KPG, 1999, hlm. 421.

menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat luas, apalagi kemudian diketahui bahwa Sekutu juga diboncengi oleh Belanda.

Pandangan orang Indonesia tentang etnis Tionghoa Padang tentunya tidak lahir seketika itu juga, tetapi merupakan penilaian yang sudah berlangsung lama sejak keberadaan mereka dan keberpihakan mereka terhadap pemerintah kolonial Belanda, serta hak-hak istimewa yang mereka peroleh sebelumnya. Bagi sejumlah etnis Tionghoa ada yang mencoba mengambil keuntungan dari keadaan yang kacau. Mereka menjual bahan makanan kepada tentara Sekutu dan Belanda serta bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan Belanda yang terbengkalai saat Jepang masuk.[115] Sebuah perspektif melekat dalam benak orang Indonesia bahwa etnis Tionghoa adalah pendukung pemerintah kolonial Belanda. Fenomena ini menjadi pandangan umum yang berlaku di berbagai daerah lain di Indonesia.

Satu minggu pasca kedatangan Sekutu, keamanan Kota Padang mulai menunjukkan suasana yang menegangkan. Melalui beberapa orang etnis Tionghoa, Sekutu dengan mudah memperoleh berbagai informasi tentang situasi politik di luar dan di dalam kota dari etnis Tionghoa yang mengharapkan Belanda kembali berkuasa. Informasi penting yang dibutuhkan oleh Sekutu adalah tentang orang-orang yang dianggap berbahaya dan dianggap akan menganggu proses kembalinya Belanda ke Indonesia.[116]

Tokoh-tokoh Tionghoa masih sulit memprediksi perkembangan politik dari konflik antara Indonesia dengan Belanda. Karena tidak ada kejelasan tentang arah dan kondisi politik, etnis Tionghoa Padang lebih memilih untuk tidak ikut campur. Selanjutnya etnis Tionghoa Padang juga tidak menunjukkan sikap tegas apakah berpihak kepada Indonesia atau memilih berkolaborasi dengan Belanda. Sikap apolitik yang ditunjukkan etnis Tionghoa Padang ini lebih bertujuan untuk mencari posisi aman dan menunggu perkembangan politik berikutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa tokoh Tionghoa berkoordinasi dengan Chung

---

[115] Staf Umum Angkatan Darat-I, *Masalah Cina Di Indonesia*, Djakarta : Angkatan Darat, 1961, hlm. 14.

[116] *Ibid.*

Hua Hui (CHH) pusat untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat tentang kondisi yang terjadi pada waktu itu, namun ternyata juga tidak ada kejelasan bagaimana kondisi politik yang sebenarnya di Indonesia.[117]

Di tengah sikap bimbang etnis Tionghoa Padang atas situasi politik yang kacau, sekelompok etnis Tionghoa melakukan antisipasi dengan gerakan menulis setiap rumah milik mereka dengan tulisan "*Chinese House*" di sekitar Kampung Pondok. Tulisan ini mengidentifikasikan bahwa mereka adalah etnis Tionghoa, bukan bagian dari Belanda dan juga tidak secara tegas mendukung kemerdekaan Indonesia. Seorang tokoh Tionghoa, Kwa Po An dalam koran Masyarakat mengatakan, bahwa walaupun ada tulisan "*Chinese House*" di setiap rumah milik Tionghoa, namun mereka tidak menentang kemerdekaan Indonesia. Tulisan "*Chinese House*" dilakukan karena mereka cemas dengan kondisi yang ada pada saat itu.[118]

Tulisan "*Chinese House*" ternyata tidak begitu ampuh untuk menciptakan rasa aman dan tidak dapat menghindarkan diri dari kekerasan terhadap etnis Tionghoa Padang. Nampak suasana di Kampung Pondok cukup mencekam. Jika ada orang masuk ke kawasan Kampung Pondok, etnis Tionghoa Padang selalu harus bersikap waspada. Setiap orang berada pada suasana "*siap siaga*" terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kondisi seperti ini dikenal dengan "*zaman siap*" oleh etnis Tionghoa Padang.[119]

Kekhawatiran akan kemungkinan buruk terjadi disebabkan oleh kondisi suasana yang tidak menentu. Apalagi ketika kemudian berkembang suatu gerakan

---

[117] Chung Hua Hui yang berdiri pada tahun 1917 merupakan organisasi Tionghoa peranakan yang mendapat pendidikan Belanda. Chung Hua Hui pada dasarnya adalah organisasi yang memperjuangkan dan membela kepentingan etnis Tionghoa peranakan melalui Dewan-Dewan kota dan Volksraad serta menentang keberadaan Tionghoa totok sebagai anggota.

[118] *Masyarakat*, no. 5 tahun ke 2, Selasa Pn 16 April 1946.

[119] Zaman siap adalah bahwa setiap orang selalu berada dalam keadaan siap siaga dengan segala kemungkinan. Kondisi tidak ini terjadi karena masyarakat merasa tidak aman sehingga selalu mempersiapkan perbekalan.

yang bernama *Gerakan Kambuik.*[120] Gerakan Kambuik merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh massa yang berasal dari luar kota dengan membawa karung sebagai tempat menyimpan barang ketika mereka melakukan penjarahan. Gerakan Kambuik terjadi dengan tiba-tiba dan dilakukan secara serentak oleh segerombolan orang yang tidak dikenal. Secara brutal massa masuk ke kota lalu menjarah serta merampok toko-toko milik etnis Tionghoa. Selain toko-toko milik etnis Tionghoa, massa juga masuk dan menjarah isi rumah beberapa orang Tiongkok yang biasanya terletak di lantai dua toko mereka. Gerakan Kambuik terjadi sebagai akibat blokade ekonomi (*economische omsingeling*) yang dilakukan secara keras oleh angkatan laut Belanda. Angkatan laut Belanda memblokir pantai Indonesia termasuk Samudera Hindia yang pantainya langsung berada di pantai barat Sumatera. Blokade ekonomi ini dilakukan Belanda agar hubungan perdagangan tentara Republik dengan dunia luar terputus.[121]

Oleh keadaan ini, maka Panitia komite Badan Keamanan Tionghoa Padang sepakat untuk menyelenggarakan penjagaan seperti biasa, sampai Badan keamanan Tionghoa disusun dengan resmi. Mengingat untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat Tionghoa, diputuskan dengan suara penuh keputusan para pengurus dan anggota harus melakukan tugas penjagaan secara bergiliran.[122]

Pada masa Revolusi yang mengkoordinir Tionghoa Padang pada masa itu adalah Chung Hua Chung Hui (kalau pedagang istilahnya Shung Hua, Shung Hui) yang sama-sama berdiri dengan THHK.[123] Untuk menjaga keamanan kampung Pondok yang semakin meningkat jumlah penduduknya, etnis Tionghoa Padang atas dukungan Sekutu kemudian membentuk barisan Pao An Tui (Poh An Tui) yang dipimpin oleh Yen Liem. Poh An Tui (PAT) didirikan hampir diseluruh kota

---

[120] Dinamakan gerakan Kambuik karena dalam melakukan aksi, massa membawa kambuik (buntilan yang terbuat dari anyaman dedaunan). Lihat lebih lanjut Mestika Zed, *loc. cit, hlm.* 124-125.

[121] Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil, *Op. Cit.*, hlm 291.

[122] Notulen Rapat Hok Tek Tok Padang, En, 9 April 1946

[123] *Wawancara* dengan Laushe 10 Maret 2014, di Era Tekhnika

di Indonesia antara pertengahan tahun 1947-1949.[124] Poh An Tui bertujuan melindungi etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah pendudukan Belanda. Markas besar Poh An Tui di Padang terletak di gedung sekolah INSI di Persimpangan kampung Pondok. Keanggotaan Poh An Tui terdiri dari pemuda-pemuda Tionghoa yang kemudian diberi senjata oleh Sekutu.

Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong ikut bergabung dengan organisasi lainnya membentuk Po An Tui. Masing-masing organisasi Tionghoa akan mengirimkan perwakilannya dan secara bergiliran melakukan penjagaan terhadap pemukiman Tionghoa.[125] Po An Tui bermarkas di rumah tuan Ko Tjik Dian di Kampung Nias. Meskipun perdagangan banyak yang tutup, namun Ko Tjik Dian menyediakan dan mengurus seluruh kebutuhan makanan dari pasukan gerakan Pao An Tui. Gerakan ini juga mendapatkan bantuan dari Chung Hwa Chung Hui (CHCH) yang disalurkan melalui Hok Tek Tong Padang, namun bantuan tersebut ditolak oleh Hok Tek Tong dengan alasan menjaga hubungan dan sikap netral dengan Indonesia.[126]

Walaupun Hok Tek Tong melakukan penolakan bantuan dana dari Chung Hwa Chung Hui, namun organisasi ini tetap mengirim perwakilan mereka untuk ikut dalam kepengurusan Chung Hwa Chung Hui.[127] Selain memiliki perwakilan dari masing-masing organisasi Tionghoa yang ada di Padang, Chung Hwa Chung Hui juga memainkan peranan dalam menyelesaikan perkara tanah pemakaman antara Chung Hwa Chung Hui, Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong.[128] Selain itu juga permasalahan mengenai penyewaan sampan untuk jenazah serta biaya untuk *Sang Song* (pemakaman) juga diselesaikan secara musyawarah oleh ketiga organisasi tersebut.[129]

---

[124] Twan Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia*, Hangar Kreatoe : Yogyakarta, 2004, hlm 192, lihat juga didalam , Memoar Ang Yan Goan : SINPO " *Tokoh Pers Tionghoa Yang Peduli Pembangunan Bangsa*, Yayasan Nabil : Jakarta, 2009, hlm. 187.

[125] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 9 April 1946

[126] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 15 Juni 1946.

[127] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 21 September 1947.

[128] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang , 12 Januari 1947.

[129] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 12 Mei 1948.

Karena situasi keamanan yang tidak kondusif, etnis Tionghoa kemudian diamankan ke pengungsian yang dikawal oleh Sekutu. Salah satu lokasi pengungsian adalah di bioskop Newrek yang terletak di kampung Pondok. Karena banyaknya pengungsi yang datang dari berbagai daerah terutama daerah Pesisir, yaitu dari Pariaman, Tiku, Painan, serta Muko-Muko tidak semua etnis Tioghoa bisa ditampung di pengungsian tersebut. Pengungsi-pengungsi lainnya juga dikoordinir secara swadaya oleh beberapa orang tokoh organisasi Tionghoa yang memiliki sarana dan jalur keamanan.[130]

Pada masa pergolakan daerah menentang tentara pusat, masyarakat etnis Tionghoa kembali berada dalam masa yang sulit karena harus memilih mendukung tentara daerah atau tentara nasional. Hanya saja dari aktivitas yang dilakukan oleh etnis Tionghoa dapat dilihat bahwa mereka lebih mendukung tentara daerah. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadi peristiwa PDRI di Padang, pemerintah PDRI membentuk suatu badan yang dinamakan dengan Pusat Perbekalan Perjuangan PDRI (P3-PDRI). Melalui P3-PDRI lah peranan pedagang perantara Tionghoa Padang semakin penting. Perdagangan dari daerah Riau menuju Sumatera Barat berada hampir sepenuhnya di tangan pedagang Tionghoa, di antara yang terbesar adalah Ang Tjie, Lim Beng Pie, Go Goan, dan Tan Pok. Para pedagang Tionghoa ini bekerjasama dengan keluarga dan relasi dagang mereka yang tinggal di Riau atau bahkan yang tinggal di Malaka dan Singapura. Pada umumnya selama Revolusi kemerdekaan RI para pedagang besar berkedudukan di Bagan si Api-api dan berhubungan dengan PDRI melalui jalan setapak di daerah pedalaman Sumatera Barat.[131]

Perdagangan dengan daerah Riau dapat dilakukan disebabkan karena dalam menjalankan tugasnya perwakilan P3-PDRI mendapat hak istimewa dari wakil Gubernur Militer Riau Utara, Mayor Akil. Dengan adanya hak monopoli yang diberikan oleh Mayor Akil, P3-PDRI dapat menguasai seluruh perdagangan

---

[130] Wawancara dengan Mama Kristine Hakim, Padang 19 Desember 2014.
[131] Ahmad Husein, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 234-235.

di Riau Utara.[132] Sebelum Agresi Belanda II, perdagangan di daerah Riau Utara hampir seluruhnya berada di tangan pedagang Tionghoa yang berkedudukan di Bagan Siapi-api. Baru setelah P3-PDRI melakukan monopoli terhadap perdagangan Riau-Sumatera Barat, maka pedagang Tionghoa terpaksa berhubungan dengan P3-PDRI. Akibatnya P3-PDRI menjadi satu-satunya jalur perdagangan menuju seluruh daerah pedalaman. Kuatnya posisi P3-PDRI dalam menguasai jalur perdagangan Riau-Sumatera Barat menyebabkan pihak P3-PDRI juga berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan pedagang Tionghoa. Terutama setelah Bagan Siapi-api jatuh ke tangan Belanda dan hanya pedagang Tionghoa yang mampu menembus jalur penyelundupan dan blokkade Belanda.

Kuatnya posisi P3-PDRI dalam menguasai jalur perdagangan Riau-Sumatera Barat menyebabkan pihak P3-PDRI juga berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan pedagang Tionghoa. Terutama setelah Bagan Siapi-api jatuh ke tangan Belanda dan hanya pedagang Tionghoa yang mampu menembus jalur penyelundupan dan blockade Belanda. kondisi ini menjadi penyebab semakin intensifnya hubungan antara tentara P3-PDRI dengan pedagang-pedagang Tionghoa. Perdagangan senjata sangat menguntungkan bagi pedagang Tionghoa Padang. Tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga atas kemampuan mereka menembus jaringan militer dapat dikatakan bahwa periode revolusi menjadi awal hubungan militer Indonesia dengan etnis Tionghoa untuk masa selanjutnya. Hubungan tersebut dapat dilihat dari pihak Teritorial Devisi 9 (Dewan Banteng) yang kemudian menggunakan pedagang Tionghoa Padang untuk memperoleh senjata.

Situasi kacau pada masa Revolusi sebetulnya tidak selamanya menjadi hal buruk bagi etnis Tionghoa di Padang. Meskipun aktivitas organisasi tidak berjalan

---

[132] Hal istimewa diberikan kepada perwakilan P3/PDRI berdasarkan Surat Ketetapam Gubernur Militer Nomor 008/KDM/49 dan Surat Kuasa No. 003/KDM/49 tanggal 26 Januari 1949. Berdasarkan hak-hak luar biasa yang ada pada pada badan itu, maka perwakilan P3/PDRI Riau Utara atas nama Gubernur Militer Riau Utara mengeluarkan berbagai peraturan dalam bidang perdagangan, antara lain; a) monopoli pembelian getah, b) mengadakan peraturan-peraturan tentang lalulintas di air, c) mengadakan peraturan tentang hasil bumi (hutan) ke luar daerah Wakil Gubernur Militer Riau Utara, d) penukaran barang-barang, e) pendaftaran alat-alat perhubungan air, f) memberi ketetapan tentang pemindahan pegawai sipil.

sebagaimana yang diharapkan, namun secara individu etnis Tionghoa memiliki peranan yang penting pada periode ini. Situasi ini oleh sebagian etnis Tionghoa justru menjadi salah satu momen penting untuk membangun bisnis mereka. Dalam situasi perang, kebutuhan bahan pokok meningkat dan kebutuhan senjata menjadi hal yang sangat mutlak. Perang selalu membutuhkan persenjataan serta kebutuhan logistic lainnya. Keadaan ini kemudian dilihat oleh beberapa orang etnis Tionghoa untuk membangun bisnis mereka. Etnis Tionghoa Padang bahkan memanfaatkan kemampuan mereka yang dapat menembus blokade Belanda untuk mendapatkan bahan makanan dan senjata. Beberapa pedagang Tionghoa dan pedagang Minangkabau kemudian membantu pejuang untuk mendapatkan senjata melalui pantai timur. Melalui Singapura dan Malaya usaha dilakukan oleh pedagang Minangkabau, yaitu oleh Anwar Sutan Saidi dan pedagang Tionghoa Lian Tjin Tek dan Oei Ho Tjeng yang memiliki perusahaan transportasi juga banyak membantu pergerakan dengan cara menyelundupkan senjata yang dibeli dari perdagangan gelap di Singapura.

Selain perdagangan senjata, pedagang Tionghoa Padang juga melakukan perdagangan bahan makanan untuk kebutuhan logistik tentara. Pedagang Tionghoa menggunakan truk-truk mereka untuk mengangkut buah-buahan, sayuran, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Etnis Tionghoa di Padang pada periode revolusi memperlihatkan upaya mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di tengah situasi perang. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa perilaku ekonomi etnis Tionghoa di Padang pada periode ini dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang situasi dan kondisi politik yang sedang berlangsung. Terlepas dari pengukuran masyarakat umum bahwa orang Tionghoa Padang berjiwa Nasionalis atau bukan, hal ini berkaitan dengan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu menyangkut keamanan dan keselamatan individu maupun kelompok. Pada perkembangannya kemudian terlihat bahwa telah terjadi hubungan yang saling mengisi dan saling menguntungkan. Hubungan simbiotik mutualisme ini berkembang hingga saat ini.

Melihat perkembangan serta situasi Indonesia pada masa itu, otomatis memberikan dampak terhadap organisasi etnis Tionghoa yang ada di Padang. Heng Beng Tong sebagai salah satu organisasi Tionghoa pada periode 1945-1950 dapat dikatakan tidak memiliki aktivitas yang signifikan. Organisasi Heng Beng Tong hanya menjalankan kegiatan rutin seperti melaksanakan ritual pemakaman bagi anggota yang meninggal dunia dan yang berhubungan dengan prosesi pemakaman. Salah satunya adalah mengurus tanah pekuburan yang dimiliki oleh kedua organisasi yang ada di Padang yaitu Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong. Mengenai tanah ini Heng Beng Tong yang diwakili oleh Tjoa Ang Khen yang merupakan sekretaris Heng Beng Tong melakukan pertemuan dengan organisasi Hok Tek Tong. Hasil dari rapat pertemuan antara kedua organisasi tersebut adalah bahwa Hok Tek Tong mendapatkan berbagai macam argument dan pendapat yakni salah satunya dari Tuan Tjoa Ang Kheng mengemukakan supaya tanah Hok Tek Tong dibagi dua bagian, satu bagian sebelah kiri Hok Tek Tong dan sebelah kanan Heng Beng Tong.[133]

Masih berhubungan dengan permasalahan pemakaman, Pada tanggal 12 Januari 1947 telah diadakan satu pertemuan antara pengurus Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong di gedung organisasi Hok Tek Tong. Dalam pertemuan ini dibicarakan masalah pekuburan antara CHCH, Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong.[134] Dalam pertemuan tersebut diminta Oei Soei Ho mewakili komunitas Tionghoa untuk berdiskusi dengan Gho Soen Tong yang waktu itu berperan sebagai Kapiten der Chineezen sekaligus ketua dari Se Hin Kiong. Pertemuan membicarakan tentang sewa sampan untuk membawa orang mati dan mengambil kesepakatan tentang tarifnya.[135] Jadi, dapat dilihat, bahwa kegiatan organisasi Heng Beng Tong dan Hok Tek Tong pada masa Revolusi fisik ini hanya sebatas masalah pemakaman saja. Aktivitas rutin ini tidak terganggu oleh situasi plitik saat itu, karena pada prinsipnya kedua organisasi ini masih berjalan sebagai mana

---

[133] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, En 12 Juni 1947
[134] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, En, 12 Januari 1947
[135] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, En, 12 Mei 1948.

mestinya, namun untuk kegiatan sosial lainnya Heng Beng Tong dan Hok Tek Tong tidak terlihat menunjukkan ada kegiatannya.

Secara sederhana Hok Tek Tong pada masa ini juga masih mengadakan pemilihan pengurus yang diresmikan pada Januari tahun 1946 jam 10.00 WIB sambil mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan organisasi.[136] Aktivitas budaya baru bisa dilaksanakan pada tahun 1948. Meskipun situasi keamanan kurang kondusif, namun Hok Tek Tong masih mengadakan arak-arakan Sipasan pada sore hari mulai jam 4 sore pada hari Sabtu-Senin tanggal 12-14 Tjia Gweek.[137] Pada tahun 1948 ini, organisasi Hok Tek Tong juga membantu Chung Hwa Chung Hui dengan memberikan sumbangan untuk biaya komite perayaan dan penobatan kerajaan.[138] Aktivitas budaya seperti sembahyang juga tidak dihentikan seperti halnya aktivitas perdagangan. Hal ini terlihat dari tetap diadakannya sembahyang setiap tanggal 15 Tjia Gweek kepada *Lauwtjho* dan *Sintjoe* pada siang hari, namun Tjiak Tjioe dan arak-arakan tidak diadakan, sebab keadaan belum kondusif.[139]

Karena situasi Negara yang masih belum aman saat itu, banyak anggota Hok Tek Tong yang kehilangan rumah mereka akibat pengrusakan yang terjadi di Kampung Pondok. Para anggota Hok Tek Tong yang kehilangan rumah karena mengalami kerusakan, banyak yang mengungsi tinggal di organisasi.[140] Oleh sebab itu untuk menjaga kebersihan rumah organisasi dan kesehatan umum, maka dikeluarkan aturan kepada semua anggota yang menumpang di rumah organisasi agar bersama-sama membersihkannya pada hari-hari yang telah ditentukan secara bergotong royong. Pada periode ini diangkat Ko Tjik Tjoan sebagai ketua di Hok Tek Tong.[141] Aktivitas Hok Tek Tong pada tahun 1949 sampai 1950 kembali tidak dapat ditemukan karena situasi dan kondisi politik pada masa Revolusi.

---

[136] Notulen Hok Tek Tong Padang, 23 Agustus 1945
[137] Notulen Hok Tek Tong Padang, 13 Februari 1948
[138] Notulen Hok Tek Tong Padang, 13 Juli 1948.
[139] Notulen Hok Tek Tong Padang, 8 Februari 1946
[140] Notulen Hok Tek Tong Padang, 3 November 1946.
[141] Notulen Hok Tek Tong Padang, 15 Juni 1946.

b. Periode 1950-1965

Periode 1950-1965 dalam sejarah Indonesia merupakan periode yang penuh gejolak. Gerakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang disertai dengan pengiriman kembali orang-orang asing ke negeri asalnya menjadi fenomena umum yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Bersamaan dengan gerakan protes di berbagai daerah seperti, DI/TII, Permesta, PRRI yang menuntut ketidakadilan dari segi politik dan ekonomi menjadi fenomena yang tidak dapat dilepaskan jika membicarakan periode 1950-1965. Pada periode yang sama persoalan kewarganegaraan bagi orang-orang asing juga memperoleh perhatian dari pemerintah Orde Lama.

Sebagai Negara yang baru merdeka, Indonesia mulai menata kehidupan masyarakatnya dari berbagai aspek kehidupan. Begitu juga halnya dengan penduduk Indonesia dari kelompok etnis Tionghoa. Persoalan pelik yang dihadapi oleh penduudk Indonesia dari etnis Tionghoa adalah persoalan status kewarganegaraan. Meskipun persoalan ini sudah berlangsung jauh ketika masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, namun ketika ketika pemerintah Tiongkok yang menganut status kewarganegaraan berdasarkan azas ius sanguinis menyatakan bahwa kelompok totok maupun kelompok peranakan adalah warga Negara Tiongkok.[142] Sampai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan ketika pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berhasil menggantikan pemerintah Republik Tiongkok (Kuomintang) pada tanggal 1 Oktober 1949, masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa peranakan di Indonesia belum terselesaikan.

Bulan Juli 1950, Duta besar Peking yang pertama, Wang Ren-Shu diangkat menjadi duta di Indonesia. Ia tidak langsung melaksanakan tugasnya dengan mengusir pengaruh Kuomintang terhadap etnis Tionghoa di Indonesia.

---

[142] Azaz ius soli adalah system kewarganegaraan berdasarkan kepada tempat kelahiran, sedangkan azas ius sangiunis adalah status kewarganegaraan berdasarkan kepada garis darah meskipun tinggal tidak di daratan Tiongkok. Lihat lebih lanjut Junus Jahja, *Garis Rasial Garis Usang: Liku-Liku Pembaharuan,* Jakarta: Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB), hlm. 26.

Duta besar Wang Jen–Shu memulai negosiasi dengan pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 1950. Persetujuan akhirnya dicapai pada bulan Maret 1951 dengan dibukanya konsulat CPR tersebut di Jakarta (Jawa), Medan (Sumatera), Bandjarmasin (Indonesia, Borneo) dan Makassar (Celebes).[143] Kesuksesan diplomasinya menjadikan *Bank of China* di Jakarta menjadi setia kepada Peking.[144] Terbentuknya hubungan perekonomian yang baik antara Tiongkok dan Indonesia menjadikan pemerintah Ali Sastroamidjojo menangani issu yang kontroversial dan sensitif tentang status sipil orang Tionghoa di Indonesia dengan cara yang logis.

Tugas pertama duta besar Mononutu adalah mendekati pemerintah Tiongkok untuk menyelesaikan issu kewarganegaraan orang Tionghoa. Pemerintah Tiongkok menerimanya dengan tangan terbuka karena menganggap besarnya biaya politik dan percabangan diplomatik jika terus bertahan dengan asas *ius sanguinis*. Pada bulan desember 1954, sebuah komunike bersama Tiongkok–Indonesia dikeluarkan pada pembahasan pendahuluan status kewarganegaraan Tionghoa. Dalam bulan April 1955, pada Konfrensi Asia-Afrika di Bandung, ditandatanganilah Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Tiongkok Indonesia. Perjanjian ini menetapkan bahwa orang Tionghoa perantauan harus menetapkan kewarganegaraannya dalam waktu dua tahun, jika gagal maka kewarganegaraan mereka mengikuti kewarganegaraan bapak mereka.[145]

Seiring dengan membaiknya kondisi politik dan keamanan kota Padang setelah Revolusi, suasana kampung Pondok pun kembali bergejolak ketika pemerintah Orde Lama mengumumkan tentang keharusan etnis Tionghoa di Indonesia untuk memilih status kewarganegaraan mereka. Tiga pilihan status kewarganegaraan tersebut adalah; pertama, menjadi warganegara Belanda; kedua,

---

[143] David Mozinga, *Chinese Policy Toward Indonesia 1949-1967*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1976, hlm 92, tapi di footnote nya ada tulisan Pengumuman Kementrian Luar Negri (Announcement of the Ministry of Foreign Affairs), March 16, 1951. Indonesia did not open a consulate in China until 1957. Lihat NCNA (Peking), Agustus 21, 1957.

[144] John Wong, *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*, Aksara: Jakarta,1987, hlm 54.

[145] John Wong, *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*, Jakarta : Aksara, 1987, hlm 55

menjadi warganegara Indonesia; atau ketiga menjadi warganegara RRT. Dengan adanya tiga pilihan status kewarganegaraan tersebut, beberapa keluarga memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan pilihan status kewarganegaraan ini terjadi sebagai akibat perbedaan orientasi dan kepentingan. Konsekuensi dari pilihan yang berbeda menyebabkan banyak keluarga-keluarga dari etnis Tionghoa di Indonesia termasuk yang tinggal di Padang terpisah-pisah.

Dalam perkembangannya kemudian ternyata pilihan ketiga status kewarganegaraan di atas belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Etnis Tionghoa yang tidak memilih kewarganegaraan Belanda kemudian dinyatakan pemerintah RI secara langsung sebagai warganegaranya.[146] Tahun 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan mengenai pelarangan bagi etnis Tionghoa yang telah memilih kewarganegaraan Indonesia untuk memasuki sekolah-sekolah "asing" dan pada tahun berikutnya sekolah yang pro-Kuomintang ditutup.[147] Persoalan status kewarganegaraan etnis Tionghoa menjadi permasalahan yang berkepanjangan hingga pemerintah RI mengeluarkan UU Kewarganegaraan tahun 1958.[148]

Setelah pecahnya pemberontakan terhadap Soekarno tahun 1958 yang diboncengi oleh Amerika untuk menekan komunis di Indonesia. Soekarno pun segera mengeluarkan aturan larangan perdagangan oleh asing di daerah pedesaan. Peraturan tersebut dikukuhkan melalui PP-10/1959. Hal ini menjadikan isu anti-Tiongkok dan menimbulkan kekacauan di kalangan etnis Tionghoa. Tiongkok yang dalam keadaan terdesak kemudian mengungsikan etnis Tionghoa yang memilih menjadi warganegara Tiongkok, tanpa membedakan antara kelompok totok ataupun peranakan pada bulan Desember 1959. Lebih dari 100.000 orang Tionghoa dari Indonesia kemudian diungsikan ke Tiongkok dan ini merupakan

---

[146] G. William Skrinner, "Golongan Minoritas Cina" dalam Mely G. Tan, *Golongan Etnis Cina di Indonesia,* Jakarta: PT. Gramedia, 1981, hlm. 17.

[147] Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 43.

[148] Siauw Giok Tjhan (ed), *Renungan Seorang Patriot Indonesia,* Jakarta: Lembaga Kajian Sinergi Indonesia, 2010, hlm. 339.

operasi paling mahal yang harus dibayar oleh Peking.[149] Pemberitaan mengenai kepulangan warga Tionghoa ke Tiongkok diberitakan oleh salah satu media pers yakni *Antara* dari *Suarabay* pada pertengahan bulan Juni 1959.[150]

Pada 10 Desember 1959, Peking mengkampanyekan untuk memanggil seluruh warga Tionghoa di dunia untuk kembali ke tanah air dengan menyatakan bahwa sebuah kesempatan yang bagus untuk menjadi bagian dalam pembangunan atau konstruksi sosialis.[151] Fang-Fung sebagai wakil ketua komisi hubungan luar negri menyatakan akan menerima semua warga Negara Tiongkok di luar negri untuk kembali ke CPR (*Chinese People Republik*) jika tidak ingin tinggal di luar negri, bahkan jutaan dan beberapa juta. Panggilan untuk kembali ke tanah air tersebut tidak terbatas pada kalangan totok saja namun juga untuk kalangan peranakan.[152]

Pada masa Orde Lama ini organisasi etnis Tionghoa di Kota Padang, seperti Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong mulai membentuk penjagaan ronda kampung disamping pekerjaan polisi. Pembentukan ini didasari oleh hasil pertemuan pada tanggal 7 April 1953, dimana semua organisasi diundang oleh Wedana ke Kantor Balai Kota dan diberikan keterangan mengenai keadaan Kota Padang pada saat itu dan waktu yang akan datang. Kepada kedua organisasi ini dianjurkan agar di empat penjuru kampung, yaitu Kampung Nias, Pondok, Pasar Gadang, dan Kampung Jawa diadakan penjagaan ronda kampung disamping penjagaan pihak kepolisian. Oleh sebab itu, untuk mengurus masalah ini telah disusun satu panitia sementara.[153]

---

[149] John Wong, *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: Aksara, 1987, hlm 59-61.

[150] Pramoedia Ananta Toer, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta : Bintang Press, 1998, hlm.132.

[151] David Mozinga, *Chinese Policy Toward Indonesia 1949-1967*, Cornell University Press, Ithaca and London, 1976, hlm 171, lihat juga dalam siaran Radio Peking di Indonesia, Desember 10, 1959. Ini merupakan himbauan kepada seluruh Tionghoa perantauan untuk kembali ke Tiongkok dalam waktu 2 minggu.

[152] David Mozinga, *Op. Vit.*, hlm 171-172. Lihat juga dalam Laporan dari perwakilan hubungan cina perantauan dan panggilan dari komite untuk semua federasi cina agar kembali ke Cina. "Ta Kung Pao, Desember 20, 1959, trans in survey of China Mainland Press (SCMP), No 2164 (Desember 18, 1959) 13-15.

[153] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 21 Mei 1953.

Hok Tek Tong juga ikut serta dalam melaksanakan perayaan ulang tahun pertama dari Dewan Banteng 20 Desember 1957 akan diselenggarakan semeriah mungkin sebagai ulang tahun pertama dari Dewan Banteng dengan diadakan arakan-arakan dari segala lapisan masyarakat dari Sumatera Tengah. Diminta dari pihak etnis Tionghoa Padang juga suka turut serta dengan memakai pakaian tradisional dari etnis Tionghoa. Cung Hua Chung Hui menghadiri acara ini yang juga diiringi dengan mengeluarkan dua Barongsai dan dua sepasan.[154]

Tahun 1954-1970 organisasi Tionghoa Heng Beng Tong mengalami kefakuman, sehingga kegiatan yang dilakukan hanya di bidang kematian saja.[155] Bahkan cabang Heng Beng Tong yang ada di Padang Panjang baru memiliki Tuako pertama Tjiang Soei Weng (1952, 1965, dan tahun 1964). Pada tahun 1950 Heng Beng Tong cabang Medan telah memiliki konsulat Tiongkok, sedangkan Heng Beng Tong Padang belum ada.[156] Tahun 1958 Heng Beng Tong, membantu anggota yang kekurangan dana untuk mengurus kewarganegaraannya, baik yang ingin memilih kewarganegaraan Tiongkok maupun Warga Negara Indonesia. Hanya saja pengurus Heng Beng Tong pada periode 1954-1970 tidak ditemukan.[157] Ada kemungkinan pada masa itu kepengurusan Heng Beng Tong tidak ada sebagai akibat pengaruh kondisi politik setelah peristiwa G 30 S PKI 1965.

c. Periode 1965-1998

Perubahan kondisi politik Indonesia pasca G 30/S 1965 berakibat terhadap kebijakan Orde baru. Pada dasarnya Orde Baru melakukan diskriminasi terhadap masyarakat sipil tidak hanya kepada etnis Tionghoa, namun juga terhadap masyarakat Indonesia lainnya. Militer menjadi kekuatan untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga dalam perkembangannya masyarakat tidak bisa secara

---

[154] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 2 Desember 1957

[155] Data berupa Prasasti yang tertulis di Gedung Perhimpunan Heng Beng Tong di Jalan Pondo Padang. Kegiatan kematian ini pun dilaksanakan tanpa koordinir dari perhimpunan, tetapi partisipasi dari orang Tionghoa yang menjadi Anggota Heng Beng Tong.

[156] Wawancara, Laushe Hok Tek Tong, 10 Maret 2014, di Era Tekhnika.

[157] Daftar-Pelindung-Ketua-Kehormatan-Penasehat-Toako-Jiko-Shako Heng Beng Tong Pusat Padang periode 1989-1995, Padang 24 April 1991

bebas menyampaikan aspirasinya. Kondisi ini juga terjadi di kalangan masyarakat Tionghoa di mana akibat dari peristiwa G 30/S pada tahun 1965 terjadi pemutusan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok. Pemutusan hubungan diplomatik ini berdampak luas baik secara sosial, budaya, ekonomi maupun politik bagi kehidupan etnis Tionghoa selanjutnya di Indonesia, termasuk bagietnis Tionghoa yang tinggal di Padang.

Politik penghilangan identitas oleh pemerintah Orde Baru dengan mengeluarkan peraturan tahun 1967 mengenai pergantian nama, pelarangan pemakaian aksara Tionghoa[158] kemudian pelarangan sekolah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan yang namanya identitas Tionghoa menyebabkan sekolah-sekolah Tionghoa ditutup dan mereka terpaksa pindah ke sekolah Katolik ataupun sekolah swasta dan sekolah negeri. Peraturan ini menyebabkan bahasa dan tulisan Mandarin tidak boleh lagi digunakan dan etnis Tionghoa. Selanjutnya etnis Tionghoa diwajibkan untuk mengganti nama Tionghoa dengan nama Indonesia ataupun memakai nama baptis. Organisasi Tionghoa juga tidak terlepas dari proses transformasi politik tersebut. Banyak penyesuaian yang harus dilakukan oleh organisasi Tionghoa Padang, mulai dari perubahan nama sampai ke perubahan ke Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Penyesuaian ini merupakan bagian dari proses Indonesianisasi, dimana Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong kemudian melakukan perubahan nama menjadi Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh.[159] Pada dasarnya penggantian nama organisasi menjadi nama Indonesia tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya nama tersebut, karena organisasi berusaha untuk mencari nama yang memiliki keterkaitan dan kesamaan makna dan arti dengan nama yang lama. Selain itu, tulisan-tulisan yang menggunakan aksara Tionghoa yang ada di

---

[158] Justian Suhandinata, *WNI Keturunan Tionghoa: Dalam Stabilitas Ekonomi& Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm.143. Presidium Kabinet No.127/U/KRP/1968 tentang penggantian nama, Instruksi Presiden No.14/1967 mengenai kebijakan utama yang berkaitan dengan warga Negara keturunan asing dan Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/1967 tentang kebijakan utama penyelesaian masalah Tionghoa.

[159] Misalnya perubahan nama dari pabrik *Kim Long Guan* menjadi *Kilang Lima Gunung*. Hal ini dilakukan agar mempermudah stempel perusahaan lama dan mencocokkan saja nama perusahaan yang baru dengan yang lama, namun tetap dengan singkatan yang sama "KLG". Wawancara, 14 Juni 2014 di HBT Padang.

organisasi juga dihilangkan dan diganti dengan nama-nama Indonesia. Ini pada dasarnya menghilangkan sumber-sumber sejarah yang berharga pada periodesasinya. Penggantian ini menyebabkan terjadi sebuah dilema ketika ketakutan dituduh secara politik terlibat dalam G 30/S menyebabkan etnis Tionghoa kemudian secara berbondong-bondong masuk kedalam kongsi dan melakukan pembakaran terhadap dokumen-dokumen yang lama.

Kondisi negara berada dalam keadaan yang tidak menentu, turut mempengaruhi aktivitas Hok Tek Tong. Mulai dari peristiwa Gestapu sampai berhasilnya Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum tahun 1971, tidak ditemukan adanya aktivitas yang dilakukan oleh perkumpulan Hok Tek Tong. Tuako Gan Kheng Siang melakukan rapat pengurus harian di ruang Laoco untuk membicarakan upacara sembahyang Pek Gwee Cap Go (tahun Imlek 2528) dan Ciak Ciu yang pertama setelah pergolakan G 30 September 1965.[160] Disamping membicarakan kegiatan rutin sembahyang dan perayaan hari besar Tionghoa, Tuako Gan Kheng Siang juga memimpin rapat-rapat yang berkaitan dengan usaha menyesuaikan diri dengan kondisi politik negara yang baru. Mulai dari persoalan iuran (terkait dengan perubahan mata uang), persoalan cabang-cabang Himpunan Tjinta Teman dan permasalahan intern lainnya terkait dengan perubahan peraturan Negara.

Tindakan ini merupakan salah satu kejahatan dan penghilangan identitas maupun sumber-sumber sejarah. Selain penghilangan identitas dalam bentuk perubahan nama, penutupan sekolah dan tindakan lainnya. Orde Baru juga melakukan pemaksaan akulturasi dan asimilasi secara total agar etnis Tionghoa menjadi Indonesia seutuhnya dengan meninggalkan budaya-budaya yang berkaitan dengan budaya Tiongkok. Padahal, sebetulnya etnis Tionghoa Padang tidak akan bisa meninggalkan budaya Tiongkok karena mereka tidak akan mungkin menggunakan nilai-nilai lokal atau budaya lokal sebagai budaya mereka yang mereka sudah menganut hal itu dalam jangka waktu yang panjang dan tidak bisa diputus dalam waktu sekejap. Peraturan-peraturan inilah menjadi sarana atau

---

[160] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 14 September 1977.

pemutus hubungan antara budaya Tionghoa yang kemudian mengalami segregasi dalam waktu yang panjang. Kekuasaan Orde Baru yang panjang selama 32 tahun berdampak luas terhadap kebudayaan Tionghoa Indonesia hingga saat ini. Sehingga terjadilah perubahan identitas dimana yang muncul adalah identitas-identitas tidak jelas yang kemudian menyebabkan etnis Tionghoa berada dalam keadaan terombang-ambing. Keuntungan bagi Tionghoa Padang adalah politik lokal yang tidak melakukan segregasi dengan ketat seperti halnya dengan negara.

Meskipun negara melakukan penekanan secara politik melalui peraturan dan Undang-undang namun pemerintah lokal memberikan peluang kepada etnis Tionghoa ini untuk mengekspresikan budayanya sebagai identitas diri mereka kembali dan kembali ke penggunaan istilah "*Tidak mungkin mereka menjadi orang Minang atau orang Padang karena tidak mungkin mereka menggunakan identitas Padang sebagai jati diri mereka, karena orang Padang identik dengan orang Minang*". Hal inilah yang menjadi nilai plus bagi etnis Tionghoa Padang termasuk oleh Himpunan Bersatu Teguh. Karena itu selama periodesasi Orde Baru, Himpunan Bersatu Teguh sebagai sebuah lembaga atau perkumpulan etnis masih mendapat kesempatan untuk melaksanakan aktivitas mereka meskipun mereka berada dibawah kontrol negara dan polisi baik dari segi sosial, budaya dan segi kematian. Dari segi sosial, Himpunan Bersatu Teguh masih bisa menjaga relasi dan interaksi di antara mereka dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang sudah berakulturasi dengan bahasa Padang meskipun dengan dialek Mandarin tetapi inilah yang menjadi ciri khas mereka.

Organisasi menjadi wadah bagi etnis Tionghoa untuk dapat mempertahankan kebudayaan leluhur.[161] Meskipun hanya untuk didalam gedung Himpunan Bersatu Teguh, tetapi hal inilah yang menjadi nilai positif bagi etnis Tionghoa yang tinggal di Padang. Setelah aktif kembali pada tahun 1971 Himpunan Bersatu Teguh bisa melestarikan budaya Sipasan meskipun hanya untuk kawasan kampung Pondok, menjalankan latihan Wushu, Barongsai, melaksanakan program dan kegiatannya berdasarkan peraturan pemerintahan RI.

---

[161] Jennifer, *Op. Cit*, hlm. 403-406.

Untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dalam pengelolaan keturunan Tionghoa yang ingin masuk menjadi Warga Negara Indonesia dibentuk Badan Komunikasi Pembauran Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) pada tahun 1970. Bakom-PKB diketuai oleh Lian Tjin Tek (Tuako Himpunan Bersatu Teguh) terdiri dari wakil masing-masing organisasi marga dan organisasi sosial, budaya, dan kematian Tionghoa, etnis lainnya, serta pemerintah. Melalui Bakom-PKB disosialisasi dan mengkoordinir orang-orang Tionghoa yang ingin mengurus status Warga Negara Indonesia. BAKOM-PKB juga melakukan kerjasama dengan Himpunan Tjinta Teman untuk melaksanakan kerjasama untuk mengadakan perlombaan sepeda hias dan berbagai macam permainan seperti pacu karung dan atraksi lainnya.[162]

Stabilitas Negara dan restrukturisasi yang dilakukan organisasi Tionghoa berdampak terhadap aktivitas organisasi yang semakin meluas. Organisasi Tionghoa mulai melakukan hubungan dengan masyarakat di luar komunitas mereka melalui kegiatan-kegiatan sosial yang terkoodinir. Bahkan organisasi Tionghoa mulai melakukan kegiatan sosial dengan memberikan bantuan dan sumbangan untuk bencana alam.[163] Bantuan sosial diberikan organisasi tidah hanya untuk kalangan Tionghoa saja tetapi juga untuk daerah lain yang terkena bencana. Pada waktu-waktu tertentu organisasi melakukan bulan bakti, donor darah secara masal yang langsung dikelola oleh organisasi bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Selain itu organisasi juga melakukan acara bazaar bekerjasama dengan Wanita Himpunan Bersatu Teguh (WHBT) Sri Bakti. Keuntungan dari kegiatan akan disumbangkan untuk masyarakat yang ada di sekitar lingkungan, terutama anggota yang kekurangan.

Sebagai organisasi etnis, Himpunan Bersatu Teguh memperhatikan kesejahteraan anggotanya melalui bantuan-bantuan yang diberikan. Walaupun organisasi etnis Tionghoa ukanlah lembaga yang kaya akan dana, namun dalam membantu anggota yang mengalami kesulitan baik kesehatan, perekonomian

---

[162] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 24 Mei 1979

[163] Tesis Desi Ratna Wulan Sari, 2009, *Konstruksi Gender Berbasis Etnik Kajian Feminis Multikultural Studi Kasus: Perkumpulan Tionghoa di Padang, Sumatra Barat*, Depok: Universitas Indonesia. Hlm, 78-79.

maupun masalah kehidupan sosial lainnya dilakukan melalui anggota-anggotanya yang memiliki kemampuan, seperti bantuan yang diberikan kepada salah seorang anggota yang mengalami kebangkrutan, maka anggota yang memiliki kemampuan secara sendirinya akan membantu, baik berupa materi atau modal maupun dengan memberikan pekerjaan baru. Selain itu, organisasi juga sangat melindungi istri (hiaso) dari para anggotanya dan juga membantu menyelesaikan persoalan anggota yang pribadi sekalipun. Bantuan ini diberikan organisasi jika anggota memintanya.

Sebagai organisasi kebudayaan, Himpunan Bersatu Teguh menyelenggarakan pelaksanaan upacara kebudayaan, seperti sembahyang untuk leluhur dan orang tua serta keluarga yang telah meninggal. Kegiatan ini dapat terlihat dari persyaratan-persyaratan untuk menjadi calon anggota yang mengharuskan anggota untuk melaksanakan tradisi leluhur, seperti harus melakukan sembahyang kepada Kwan Tee Koen dan mengangkat Hio. Pelaksanaan upacara budaya sebelum tahun 1960-an dilakukan secara besar-besaran. Acara itu diperuntukkan untuk umum. Setiap perayaan 17 Agustus pemerintah juga mengundang tim kesenian Himpunan Bersatu Teguh untuk memperagakan atraksi kebudayaan mereka, seperti Barongsai yang diiringi dengan music genderangnya. Setelah keluar keputusan Presiden no 171 tahun 1967 tentang aturan pelaksanaan perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina. Perayaan upacara harus dilakukan dalam lingkungan keluarga ata secara perorangan, seperti acara tahun baru. [164]

Pembatasan pelaksanaan budaya berdasarkan keputusan Presiden tersebut membawa dampak lain bagi perkembangan kebudayaan mereka. Sejak itu budaya leluhur dilakukan hanya untuk dan dilingkungan sendiri. Terbatasnya pelaksanaan upacara leluhur yang diizinkan pemerintah membantu terjadinya pembauran budaya antara budaya leluhur dengan budaya lokal.

---

[164] Badan Koordinasi Masalah Cina, *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia*, Jakarta: Bakom,1979, hlm. 360.

Budaya-budaya leluhur yang masih dikelola dan dikembangkan oleh Himpunan Bersatu Teguh adalah melakukan sembahyang kepada Kwan Tee Koen dan arwah para leluhur yang merupakan kewajiban bagi setiap anggota.[165] Disamping itu juga dilakukan sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang merupakan sembahyang terbesar yang dilakukan oleh keturunan Tionghoa di Padang. Selain itu juga dilakukan sembahyang Tjeng Beng yang biasanya hiaso tidak diperbolehkan ikut dalam sembahyang. Sedangkan kegiatan pada akhir tahun, Himpunan Tjinta Teman mengadakan donor darah untuk PMI (Palang Merah Indonesia) serta KB (Keluarga Berencana).[166]

Dalam menjalankan aktivitas perkumpulan, Himpunan Tjinta Teman melakukan koordinasi dengan Kodim. Kodim juga menyarankan Himpunan Tjinta Teman untuk melakukan pembinaan terhadap pemuda pada kegiatan olah raga. Selain melakukan koordinasi dengan Kodim, Himpunan Tjinta Teman juga berkoordinasi dengan Walikota Padang. Bahkan, secara administrasi Walikota Padang juga meminta Himpunan Tjinta Teman untuk melaporkan daftar Badan Pengurus sampai periode terakhir kepengurusan.[167] Selain dari melaporkan daftar badan kepengurusan perkumpulan, Pemerintah juga mengharuskan untuk mengurus surat izin ke kepolisian. Perkumpulan seperti Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh secara rutin dalam bidang kematian berkoordinasi dengan Kodim Kota Padang untuk mengatur tata tertib yang harus diikuti saat *Songsu* (mengantar jenazah) di jalanan umum.[168] Koordinasi dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara umum serta menghindari kerusuhaan karena prosesi kematian merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Himpunan Tjinta Teman.

---

[165] Kwan Tee Koen merupakan kepercayaan perhimpunan yang dianggap sebagai nabi.

[166] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 13 Desember 1978

[167] Pada tanggal 1 Mei 1978 Walikota Padang mengirimkan surat permintaan agar Himpunan Tjinta Teman melaporkan daftar Badan Pengurus periode kepengurusan tahun terakhir dan bekerjasama dengan Himpunan Bersatu Teguh berkenaan dengan laporan tersebut. Tujuan dari surat tersebut adalah untuk menseragamkan sistem administrasi perkumpulan etnis Tionghoa di kota Padang. Lihat lebih lanjut Notulen HTT tanggal 27 Mei 1978.

[168] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 31 Januari 1979.

Pemerintah juga mengeluarkan himbauan kepada pemuda-pemudi Tionghoa untuk mengakrabkan diri dalam kegiatan olahraga dan pergaulan sehari-hari dengan masyarakat yang lainnya.[169] Himbauan yang disampaikan oleh pemerintah kepada dua perkumpulan terbesar etnis Tionghoa Padang yakni HTT dan HBT agar mampu mengajak anggotanya untuk berpartisipasi dalam himbauan dan aktivitas tersebut. Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh melakukan kerjasama memberikan bantuan kepada korban galodo gunung Merapi pada tahun 1979.[170]

Kerjasama yang erat di antara kedua organisasi besar yakni Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh dapat dilihat dari penyelesaian tempat pemakaman di Bukit Sien Tiong. Berdasarkan instruksi Walikota Padang melalui surat No 3769/Pem.XX/79 tertanggal 17 Juli 1979, terjadilah pemindahan lokasi tanah kuburan. Instruksi ini meminta agar etnis Tionghoa di bawah koordinasi klenteng Sie Hien Kiong, Himpunan Tjinta Teman, dan Himpunan Bersatu Teguh. Ketiga lembaga ini sepakat membentuk tim yang terdiri dari empat orang, yakni dua orang dari Himpunan Tjinta Teman dan dua orang lagi dari Himpunan Bersatu Teguh. Tugas dari perwakilan tersebut adalah mencari lokasi kuburan yang baru. Team ini melakukan peninjauan pada tanggal 29 Juli 1979. Akhirnya, diusulkan Ladang Padi dan Bandar Buat (tempat pertanian) sebagai lokasi kuburan baru.[171]

Tuako Gan Kheng Siang dari Himpunan Tjinta Teman dan Tuako Lian Tjin Tek dari Himpunan Bersatu Teguh menjadi jembatan antar kelompok etnis dengan pemerintah. Kedua tokoh ini menjalin kerjasama bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya saja, melainkan juga bagi kepentingan kelompok dan etnis Tionghoa lainnya. Bersama Lian Tjien Tek dan tokoh Tionghoa lainnya, Tuako Gan Keng Siang juga membentuk Yayasan Murni untuk

---

[169] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 18 Agustus 1979
[170] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 28 Mei 1979.
[171] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 24 Mei 1979.

menampung dan mengusahakan pendidikan bagi anak-anak Tionghoa yang orangtuanya terlibat dengan peristiwa politik G 30 S.[172]

Di bidang kebudayaan Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh pernah melaksanakan perarakan Sipasan atau Barongsai bersama dalam rangka memeriahkan peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus.[173] Selanjutnya Kodim juga meminta agar para pemuda dari ketiga perkumpulan sosial etnis Tionghoa, untuk mengadakan latihan-latihan olahraga dalam berbagai bidang, misalnya badminton, voli, basket dan lain-lain. [174]

d. Periode 1998-2013

Perubahan Negara terjadi secara drastis setelah Mei 1998, saat terjadinya pergantian rezim dari pemerintahan Orde Baru ke era Reformasi. Suatu hal yang sangat drastis terjadi dimana perubahan-perubahan tidak saja terjadi terhadap Negara secara Nasional, tetapi juga pada tingkat lokal. Dari aspek politik, terjadi perubahan besar dimana negara yang awalnya refresif terhadap masyarakat kemudian memberikan peluang untuk berekspresi melalui wadah-wadah baik formal maupun informal. Perubahan kebijakan Negara secara politik pun dirasakan oleh etnis Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

Hal yang berbeda terjadi di Kota Padang, meskipun demonstrasi dan gerakan protes juga terjadi, namun tidak menimbulkan tindak kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Bahkan di beberapa lokasi tempat etnis Tionghoa tinggal ditemukan fenomena-fenomena yang menarik. Terjadi reaksi dari masyarakat yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat Tionghoa dalam berbagai respon baik sebagai tetangga, teman, atasan, atau hubungan lainnya sehingga peristiwa Reformasi tahun 1998 di Padang dapat dikatakan kondusif, karena tidak adanya korban yang disebabkan oleh tindak kekerasan.

---

[172] Pendiri Yayasan Pendidikan Murni Lian Tjin Tek, Ga Kheng Siang, Oei Ho Tjeng, Cahterine (Istri Siangkasa Gani), Wawancara, Jakarta: 14 Desember 2009.

[173] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 16 Juni 1986.

[174] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 1 Februari 1988.

Terjadi sebuah peristiwa pembakaran rumah yang menyebabkan seorang pendeta meninggal dunia di Jalan Nipah. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah akibat demonstrasi mahasiswa, tetapi reaksi kriminal yang ditujukan kepada seorang agen togel. Hanya saja pada saat peristiwa terjadi kesalahan dimana yang menajadi korban bukanlah agen togel, namun Pendeta yang tinggal disebelah rumah agen togel tersebut.

Fenomena kota Padang di tahun 1998, mencerminkan bahwa posisi etnis Tionghoa di dalam politik kota, memiliki tempat tersendiri. Meskipun secara nasional Negara memberikan tekanan, namun sebagai lokalitas Padang memberikan ruang kepada etnis Tionghoa untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui tokoh-tokoh Tionghoa yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Keterlibatan tokoh Tionghoa di dalam lembaga-lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah kota, bahkan Negara berdampak positif dari pembinaan hubungan sesama etnis, antar etnis dan dengan pemerintah. Disini terlihat bahwa etnis Tionghoa Padang ikut terlibat di dalam pengembangan kota baik secara sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Kerjasama para tokoh Tionghoa dari organisasi-organisasi sosial, budaya, dan kematian seperti kerjasama Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong melalui koordinasi menghadapi perubahan politik Negara, maka Tionghoa Padang berada pada tataran yang aman dan kondusif.

Reformasi merupakan era baru yang memberikan peluang kepada etnis Tionghoa untuk mengekspresikan identitas mereka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Setelah presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Ketetapan MPRS RI nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan terjadi perubahan perspektif, baik di kalangan etnis Tionghoa maupun dari kalangan yang bukan etnis Tionghoa. Pencabutan ketetapan MPRS tersebut menjadi angin demokrasi di kalangan etnis Tionghoa di Indonesia umumnya dan kota Padang khususnya. Perubahan sistem itu membuka masing masing organisasi etnis Tionghoa melakukan penyesuaian-penyesuaian. Salah satu sikap yang mereka sesuaikan adalah membiasakan bahwa budayanya

juga bisa dipelajari secara terbuka oleh kelompok masyarakat lain, atau diluar kelompok mereka.

Peluang Negara mendorong Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh mulai membuka diri dan mengekspresikan budaya leluhur melalui festival-festival yang diselenggarakan pada saat perayaan hari besar Tionghoa. Perayaan hari besar Tionghoa yang semula diselenggarakan hanya untuk konsumsi intern anggota Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh kemudian menjadi terbuka bagi undangan dan masyarakat umum. Perubahan kebijakan ini mulai dilakukan oleh Himpunan Tjinta Teman pada saat kepemimpinan Tuako Gan Hok Liong. Begitu juga halnya dengan persoalan intern Himpunan Tjinta Teman, dimana pada periode ini pengurus organisasi pun mulai melakukan Reformasi. Rapat yang tidak pernah dilakukan di luar organisasi, pada periode ini Tuako Gan Hok Liong dan pengurus mengadakan rapat pembagian kerja di luar gedung organisasi, yaitu di Pulau Sikuai pada tanggal 5 Januari 1998.[175] Reformasi juga dilakukan pada saat perayaan *Sin Cia, di mana pada* tahun ini 1999 tidak dilakukan kunjungan ke rumah Tuako maupun pengurus harian, tetapi diadakan perayaan Sin Cia di Kongsi pada 20 Februari 1999. Undangan yang hadir adalah pengurus harian, *conglie, kak tio,* dan para seksi pemakaman.[176]

Himpunan Tjinta Teman pada periode ini tidak saja melakukan aktivitas budaya, namun juga bergerak di bidang sosial. Meskipun situasi belum kondusif, Tuako Gan Hok Liong mengajak organisasi Himpunan Tjinta Teman, Himpunan Bersatu Teguh dan Santo Yusuf untuk aktif dalam kegiatan sosial seperti gerakan peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu.[177] Gerakan kepedulian ini dilakukan dengan mengadakan pasar murah yang disponsori oleh para donatur untuk menggalang dana sosial dalam rangka perayaan Imlek. Selain itu juga memberikan bantuan kepada ABRI dalam bentuk gula pasir yang pembagiannya

---

[175] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 5 Januari 1998.

[176] Sebagai koordinator dana ditunjuk seksi sosial. Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, tanggal 5 Februari 1999

[177] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 2 Februari 1998

sebagai berikut: bantuan untuk Polda sebanyak 3 ton, Korem sebanyak 3 ton.[178] Organisasi juga melakukan pemberian Angpao untuk Hiati dan Hiaso yang kurang mampu. Kegiatan ini dikoordinir oleh seksi sosial.[179]

Pada periode kepengurusan ini, Himpunan Tjinta Teman melakukan pembangunan di bidang infrastruktur, seperti pembangunan gedung Himpunan Tjinta Teman Padang Panjang yang diresmikan pada tanggal 24 September 2000, pembangunan gedung Himpunan Tjinta Teman Sibolga, rumah abu Abadi, dan krematorium di Bungus.[180] Dalam acara peresmian rumah abu, Himpunan Tjinta Teman mengundang pemimpin dari perkumpulan Tionghoa lainnya yang ada di Padang, seperti Himpunan Bersatu Teguh, Santu Yusuf, dan Jise Kongsi.[181] Pada periode ini Himpunan Tjinta Teman juga melakukan kerjasama dengan Kerapatan Adat Nagari Teluk Kabung. Hal ini terlihat dari bantuan yang diberikan oleh Himpunan Tjinta Teman untuk pembangunan gedung KAN Teluk Kabung.[182]

Himpunan Tjinta Teman juga mengadakan pertemuan dengan MUSPIDA TK 1 Sumbar di gedung Bagindo Azis Chan Padang, pada tanggal 2 Desember 1998. Pertemuan ini dihadiri oleh Gubernur, Danrem, Kapolda, Dan Harim dan Kajati Sumbar. Pertemuan ini bersifat silaturrahmi dengan pemuda masyarakat termasuk juga dari unsur mahasiswa. Dalam pertemuan ini, membahas mengenai kejadian yang terjadi di daerah Ketaping dan Kupang, serta Undang-Undang No.9 tahun 1998 tentang unjuk rasa.[183]

Pertemuan Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh dengan Kasospol TK II Padang, menghasilkan beberapa permintaan dari Kasospol, salah satunya jika akan menampilkan Barongsai dan Naga agar berkonsultasi terlebih

---

[178] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 1 April 1998.
[179] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 5 Januari 1999.
[180] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang 1 Mei 1998; Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 19 Juni 2000; Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 6 Oktober 1958.
[181] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang ,4 desember 1998.
[182] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 19 Juni 2000.
[183] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 4 desember 1998

dahulu dengan Sospol. [184] Himpunan Tjinta Teman mengadakan kerjasama dengan Dewan Kesenian Padang. Kerjasama Himpunan Tjinta Teman ini berdasarkan kepada usulan yang diberikan oleh Dewan Kesenian Padang untuk melakukan kerjasama pada pagelaran cerita Cindo Mato. Pendanaan dan pengumpulan informasi untuk acara ini ditugaskan kepada Seksi Pendidikan Himpunan Tjinta Teman.[185] Rencana pementasan cinta Cindo Mato oleh Dewan Kesenian Kodya Padang telah mendapatkan persetujuan oleh Gubernur Sumatera Barat.[186]

Aktivitas Himpunan Tjinta Teman tidak mengalami penurunan di tahun ini. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan yang diikuti oleh Himpunan Tjinta Teman, seperti Tim barongsai Himpunan Tjinta Teman yang berangkat ke Jakarta pada tanggal 10 bulan Maret 1999, kunjungan ke Malaysia pada tanggal 11 April 1999.[187] Kunjungan ini mendapatkan sambutan yang hangat dari Malaka dan Johor Baru, bahkan pada tahun ini juga Himpunan Tjinta Teman ikut serta dalam memainkan Barongsai di Malaysia.[188] Setelah dari Malaysia, tim barongsai juga akan main di Dumai pada tanggal 17 dan 18 Juli. Aktivitas Himpunan Tjinta Teman lainnya juga melakukan kunjungan ke Pulau Rangsang dan menampilkan pertunjukan Barongsai. Yang mengikuti acara ini adalah beberapa pengurus harian dan Jiko Lie Sek Wie.[189]

Selanjutnya Himpunan Tjinta Teman juga mengirim utusan untuk mengambil kepala *Sai* ke Kuala Lumpur di bawah pimpin oleh Tuako Gan Hok Liong. Himpunan Tjinta Teman juga mendapatkan sumbangan Naga dari Semarang (kepala naga terbuat dari kertas), dan untuk melengkapi tim barongsai maka Himpunan Tjinta Teman membeli 1 buah kepala naga yang terbuat dari fiberglas.[190] Untuk meningkatkan kinerja pemain Barongsai, maka Tim Barongsai

---

[184] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 28 Februari 2000.
[185] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 5 April 2000.
[186] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 19 Juni 2000.
[187] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 5 April 1999.
[188] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 4 Mei 1999.
[189] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 5 Oktober 1999.
[190] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 5 Juli 1999.

Hok Tek Tong akan mengirim pemain untuk berlatih di Kuala Lumpur.[191] Dalam rangka membuka diri Tim Barongsai Hok Tek Tong mulai tampil di acara-acara di luar organisasi, seperti pentas di PDI P pada tanggal 27 dan 28 November 1999, di Sungai Pekning, perayaan HUT RI dan hari jadi Kota Padang.[192] Saat perayaan Hut Republik Indonesia dan hari jadi Kota Padan Festival yang diselenggarakan pertama kalinya setelah Orde Baru memberikan hadiah bagi Himpunan Tjinta Teman yakni mendapatkan 3 rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) untuk kategori *kio* terbesar, Sipasan terpanjang, dan atraksi Liong (Naga) yang untuk pertama kalinya dimainkan oleh wanita. Sipasan sepanjang 180 m diarak berkeliling kota sejauh 1,5 km dengan melibatkan 1.200 petugas dari anggota Himpunan Tjinta Teman.[193] Himpunan Tjinta Teman juga ikut serta dalam pertandingan Wushu tingkat Sumbar.[194] Pertunjukkan permainan Barongsai (main *patok dan biasa*) di depan kantor Gubernur Sumbar.[195] Tim Barongsai dan Naga Himpunan Tjinta Teman ikut merayakan HUT RI ke-64, dengan menampilkan permainan patok dan naga oleh anggota POLRI.[196]

Perayaan tidak hanya terbatas pada perarakan massal untuk menarik perhatian masyarakat dan menuntut pengakuan sosial saja, namun organisasi ini juga melakukan kompetisi baik di tingkat Nasional maupun Internasional.[197] Setelah mendapat persetujuan dari Laoco disepakati sembahyang dengan persembahan babi dan hewan lain *"ditiadakan"*.[198] Seksi Olahraga (Tim Naga dan Barongsai Patok Himpunan Tjinta Teman) juga diundang oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam pagelaran musik pada bulan Desember 2011. Selanjutnya, Himpunan Tjinta Teman juga mengikuti kompetisi Internasional Barongsai di Guang Zhou.[199]

---

[191] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 5 November 1999.
[192] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 1 Februari 2000.
[193] Harian Padang Ekspress, 8 Februari 2009.
[194] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 1 Maret 2009.
[195] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 12 Juli 2009.
[196] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 2 Agustus 2009.
[197] Pada tahun 2009, Himpunan Tjinta Teman meraih tiga penghargaan MURI sekaligus : Khio terbesar, Sipasan terpanjang dan pemain Naga wanita yang dimainkan oleh pemain wanita campuran Tionghoa dan etnis lainnya.
[198] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 8 September 2011.
[199] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 8 April 2012.

Dalam rangka perayaan 150 tahun Himpunan Tjinta Teman diadakan *Bazzar* di Gedung Serba Guna dan gedung utama Himpunan Tjinta Teman. Rangkaian acara bazaar meliputi pementasan wayang Potehi, lomba karaoke, busana kasual, *solo song*, lomba baju tidur, lomba mewarnai, memasak mie panjang umur, pantun, pameran otomotif, magic show, beat box dan acara lainnya yang diselenggarakan selama 9 hari berturut-turut. Pesta Ulang Tahun satu setengah abad Himpunan Tjinta Teman yang jatuh pada tanggal 23 Agustus 2013 berlangsung lancar,meriah dan sukses. Acara diresmikan dan dihadiri oleh staf Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Walikota Padang, Muspida tingkat I dan II, serta juri dari Guinness World Record, MURI, dan para undangan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Malaysia dan China).

Perayaan 150 tahun Himpunan Tjinta Teman berhasil mendapatkan dua penghargaan, yaitu dari Guinness World Record dan dari MURI. Dari Guiness World Record HTT mendapat penghargaan sebagai penyelenggara prosesi Sepasan terpanjang di dunia. Sementara itu MURI Himpunan Tjinta Teman memecahkan rekor Sepasan terpanjang di dunia dan pemakarsa penyelenggara pemakaman serta pemikul peti jenazah terbanyak di Indonesia. Rangkaian perayaan HUT 150 Himpunan Tjinta Teman dimeriahkan khusus dengan festival budaya yang diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus dengan kegiatan arak-arakan Kio, pertandingan olahraga, bakti sosial, donor darah, dan medical cek up kesehatan, bazaar, dan ciak ciu).[200]

[200] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 10 September 2013.

Foto 2

Penghargaan Guiness Worl Record Pada

Perayaan Ulang Tahun 150 Himpunan Tjinta Teman 2013

Sumber: Himpunan Tjinta Teman Padang

Foto 3

Arak-arakan Sipasan Perayaan 150 Tahun Himpunan Tjinta Teman Pada Tahun 2013

Sumber: Himpunan Tjinta Teman Padang

Reformasi berdampak pada perubahan-perubahan sistem di Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh, hal ini terlihat pada perubahan-perubahan pola pembinaan hubungan yang dilakukan, baik dengan pemerintah

maupun dengan elemen-elemen masyarakat. Dalam rangka perubahan tersebut kedua organisasi ini melakukan kerjasama dengan Dewan Kesenian Padang untuk menyelenggarakan cerita Cindua Mato,[201] melaksanakan acara Hoyak Tabuik bersama PWI Sumbar,[202] serta menampilkan tari poco-poco sebagai penampilan yang bernuansa Nasional oleh WHTT. Selanjutnya Himpunan Tjinta Teman memberikan sumbangan untuk Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila,[203] memberikan bantuan korban gempa, pembuatan kuburan massal,[204] sumbangan gempa Mentawai, [205] bantuan peti sosial, [206] aksi sosial donor darah, serta membantu pembangunan tiang Naga Klenteng [207], serta tidak ketinggalan penampilan Tim Himpunan Tjinta Teman pada Barongsai dan Naga.

Di Propinsi Sumatra Barat, khususnya di kota Padang, etnis Tionghoa juga merasakan perubahan ini. Terutama dampak yang paling cepat dirasakan adalah perubahan sistem. Sejalan dengan pergeseran paradigma di kalangan jajaran birokrasi yang dikendalikan oleh para perwira militer lewat kantor Sospol dan Ditsospol, pendekatan individual sangat penting dan efektif.

Himpunan Bersatu Teguh juga melakukan ekspos budaya pada masa Reformasi ini, hal ini terlihat pada tanggal 29 Januari 2006. Dalam rangka menyambut tahun baru Imlek 2556 etnis Tionghoa Padang dengan semarak menggelar arak-arakan Barongsai yang dinikmati oleh ribuan masyarakat kota Padang dari berbagai kalangan. Satu minggu sebelum perayaan tahun baru imlek, rumah-rumah, lembaga sosial, rumah marga, dan jalanan kawasan kampung Pondok sudah dihiasi dengan lampion serba berwarna merah.[208] Hiasan warna merah berkesan meriah dan ramai setelah perayaan tahun baru Imlek sejak tahun

---

[201] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 5 April 2000.
[202] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 12 Januari 2009.
[203] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 27 Juni 2002.
[204] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 8 Januari 2010.
[205] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 8 Desember 2010.
[206] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 8 Maret 2011.
[207] Notulen Rapat Hok Tek Tong Padang, 8 September 2012
[208] Warna merah merupakan warna khas pada budaya Tionghoa. Bukan hanya Angpao, melainkan bangunan sosial seperti klenteng dan tempat abu juga dicat merah. Merah mengandung makna teguh dan gembira, dua sifat yang menjadi pedoman hidup orang Tionghoa. Lihat lebih lanjut Patricia Bjaaland Welch, *Chinese Art: a Guide to Motifs and Visual Imagery*, Singapore: Tutling Publ, 2008, hlm.222.

2000-an bahkan di dalam acara tersebut ratusan amplop merah *(angpao)* dibagikan kepada ratusan orang yang menyaksikan pertunjukkan. Sebagai ungkapan bahagia dan menyemarakkan acara, panitia dan beberapa orang tokoh masyarakat membagi-bagikan *angpao* kepada masyarakat yang hadir. Pembagian angpao ini memberikan kesan meriah dan sukaria etnis Tionghoa Padang dalam merayakan tahun baru Imlek.

Himpunan Bersatu Tenguh juga pernah mendapatkan MURI dalam perayaan Sipasan sepanjang 84 m pada perayaan Imlek tahun 2008. Pada tahun 2004 Himpunan Bersatu Tenguh juga telah mendapat juara 2 tingkat Internasional atraksi Barongsai yang diselenggarakan di Shanghai.[209] Barongsai Heng Beng Tong merupakan kelompok kesenian Tionghoa yang mempelopori kesenian Tionghoa di Indonesia. Kesenian yang dibentuk pada tahun 1990 salah seorang pengurus Himpunan Bersatu Tenguh bagian olahrag dengan melakukan modernisasi terhadap permainan Barongsai. Pada tahun 1998 Himpunan Bersatu Tenguh mendapatkan posisi ke 4 CNI Cup-Muar-Malaysia, posisi ke 7 Macau World Lion Dance Championship pada tahun 1999, posisi ke 5 Genting World Lion Dance Championship pada tahun 2000, posisi ke 7 Genting World Lion Dance pada tahun 2002, posisi ke 7 Calsberg Cup di Muar pada tahun 2002, posisi ke 5 pada World Dragon& Lion Dance Championship di Malaysia pada tahun 2002, National Champion pada 1st Himpunan Bersatu Teguh Lion Dance Invitation pada tahun 2003, posisi ke 5 pada Nan Hai Huang Fei Hong Dragon and Lion Dance di China pada tahun 2003, posisi ke 5 pada Yuen Long District Sport Festival di Hongkong pada tahun 2006, Finalist 2nd Himpunan Bersatu Teguh World Lion Dance Tournament pada tahun 2007, posisi ke 8 Carlsberg Cup di Seremban (Malaysia) pada tahun 2007, posisi ke 3 King Cup di Thailand pada tahun 2007, dan berbagai prestasi lainnya yang berhasil di capai oleh HBT baik ditingkat Nasional maupun Internasional.[210]

---

[209] Harian Padang ekspres, 8 Februari 2009.
[210] Wawancara, 6 November 2014, Chandra Penata Long, Padang.

BAB V
PENUTUP

Kecendrungan imigran Tionghoa untuk membentuk organisasi di tempat tinggal yang baru dipengaruhi oleh budaya atau tradisi berserikat (*Hung*) dan bekerja sama (*Kongsi*). Kedua tradisi ini menjadi dasar bagi terbentuknya organisasi-organisasi etnis Tionghoa yang ada di perantauan termasuk di Kota Padang. Dilatar belakangi oleh kedua tradisi tersebut, kecendrungan etnis Tionghoa untuk membentuk organisasi di perantauan juga dipengaruhi oleh tradisi merantau, dimana saat sampai pada daerah tertentu para perantau akan mencari perantau dari daerah asal yang sama. Kecendrungan ini juga menjadi pendorong munculnya organisasi sebagai wadah tempat para migrant untuk menetap, mencari perlindungan, mencari pekerjaan, dan kebutuhan lainnya bagi para perantau baru.

Sebagai komunitas etnis Tionghoa Padang telah memiliki organisasi etnis yang berdiri sejak masa Kolonial Belanda. Organisasi Tionghoa Padang terkelompok atas dua bagian, yaitu: pertama, kelompok organisasi Marga (Klan) dan kedua, kelompok organisasi sosial budaya kematian. Marga (She) atau nama keluarga adalah pertanda dari keluarga mana seseorang berasal. Sebagai pertanda, marga menjadi identitas genetik dalam silsilah keturunan. Oleh karena itu dalam membuat nama sering kali nama marga menjadi penting untuk dibuatkan, nama marga dalam kebudayaan Barat berada di belakang nama kecil, kebalikannya budaya Tionghoa dan Asia Timur lainnya meletakkan nama marga di depan. Marga menjadi identitas di dalam masyarakat dan adat. Marga diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya (*patriakat*). Marga lebih sering digunakan sebagai identitas diri, sehingga dalam pergaulan sehari-hari marga sering dijadikan sebagai panggilan, sedangkan nama sering disingkat, seperti Gho Tjeng Li menjadi Charli Gunawan.

Dalam perkembangannya kemudian orang-orang yang berasal dari satu marga membentuk organisasi marga yang berasal dari satu suku (*clan*). Organisasi marga berperan sebagai tempat berkumpul dan bekerjasama bagi ornag-orang yang berasal dari satu keluarga. Secara kekerabatan satu marga merupakan satu

garis keturunan, namun bagi etnis Tionghoa satu marga belum tentu berasal dari satu daerah di Tiongkok. Dari pendataan yang dilakukan secara acak maka ditemukan lebih dari 100 jenis marga etnis Tionghoa di Padang. Jumlah ini menunjukkan bahwa etnis Tionghoa Padang adalah komunitas yang heterogen. Heterogenitas ini akan terlihat mencolok jika masing-masing marga mendirikan organisasi marganya, namun organisasi marga yang ditemukan di Padang hanya delapan marga. Pendirian organisasi marga atau yang familiar disebut dengan kongsi dilatar belakangi oleh jumlah anggota mereka. Hingga saat ini ada delapan organisasi marga yang jumlah anggotanya cukup banyak, yaitu marga Lie yang organisasi marganya bergabung dengan marga Kweek, marga Tan, marga Oei, marga Lim, marga Gho, marga Ong, dan marga Huang.

Selain organisasi marga, etnis Tionghoa Padang juga tergabung ke dalam organisasi sosial, budaya, dan kematian yang bersifat heterogen, yaitu Hok Teek Tong (HTT) yang berdiri sejak tahun 1863 dengan Tuako pertama Lee Kauw Keng dan Heng Beng Tong (HBT) yang berdiri sejak tahun 1873 dengan Tuako pertama Oei A King. Meskipun sudah berdiri sejak lama, namun secara administrasi kedua organisasi ini baru resmi terdaftar sebagai organisasi/perkumpulan yang modern sejak tahun 1895 saat pemerintah Hindia Belanda melakukan penataan terhadap perkumpulan-perkumpulan Tionghoa.

Anggota HTT dan HBT adalah para laki-laki Cina (*Hiati*) yang telah berusia di atas 17 tahun. Pemilihan untuk menjadi anggota HTT atau HBT didasari oleh pilihan hati nurani dengan konsekuensi mengikuti aturan budaya, yaitu penyembahan terhadap roh leluhur yang berbeda. Hal ini merupakan konsensus yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang telah melakukan pilihan perkumpulan HTT atau HBT. Bagi seseorang yang sudah masuk menjadi anggota HTT, maka orang tersebut tidak akan bisa pindah ke organisasi HBT. Begitu juga sebaliknya jika seseorang sudah masuk HBT, orang tersebut juga tidak akan diterima di HTT. Aturan ini berjalan sesuai dengan kesepakatan lisan antara kedua organisasi tersebut dan hingga saat ini ditaati oleh etnis Tionghoa yang tinggal di Padang. Selain di Padang, HTT dan HBT juga memiliki cabang di beberapa

daerah di pedalaman Sumatera Barat, yaitu di Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, bahkan sampai ke Pekanbaru dan Sibolga.

Kegiatan utama dari kedua organisasi ini adalah pertama secara budaya, menyelengarakan upacara sembahyang kepada leluhur atau dewa pelindung, menyelenggarakan upacara-upacara yang berhubungan dengan ritual-ritual tradisi leluhur, seperti perayaan Cap Go, perayaan tahun baru Imlek, dan makan bersama (*Ciat Ciu*). Kedua kematian, yaitu penyediakan perlengkapan, melaksanakan upacara penghormatan jenazah, dan menyelenggarakan prosesi pemakaman secara tradisional. Ketiga kegiatan sosial, yaitu menyelenggarakan kegiatan sosial, baik untuk kalangan sendiri maupun untuk bakti sosial di daerah yang terkena bencana dalam berbagai bentuk kegiatan (donor darah, bantuan ke panti jompo, sumbangan kebutuhan pokok, bantuan kesehatan, pengembangan pendidikan, dan sebagainya).

Organisasi Tionghoa berkembang seiring dengan perjalanan sejarah Kota Padang. Pada masa Kolonial Belanda organisasi Tionghoa berperan penting dalam memberikan wadah bagi migrant baru untuk bersosialisasi dan beraktifitas. Organisasi marga biasanya akan membantu para migrant yang berasal dari marga yang sama, sementara organisasi sosial, budaya, dan kematian memberikan fasilitas kepada migrant tanpa memandang marga atau daerah asalnya di Tiongkok. Tetapi saat mendaftar menjadi anggota organisasi sosial, budaya, dan kematian baik Hok Tek Tong maupun Heng Beng Tong setiap calon anggota harus mencantumkan daerah asal, marga, dan usia di buku keanggotaan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua organisasi ini tidak membedakan asal usul anggotanya tetapi didasarkan kepada keyakinan untuk melakukan penghormatan terhadap leluhur yang disembah masing-masing organisasi. Hok Tek Tong yang menyembah Ho Tek Tjeng Sin sedangkan Heng Beng Tong melakukan sembahyang kepada Kwan Tek Koan.

Sebelum Pemerintah Kolonial Belanda melakukan restrukturisasi pada tahun 1894 aktivitas organisasi Tionghoa sulit untuk ditelusuri, namun setelah Pemerintah Kolonial Belanda mengontrol aktivitas organisai, maka kegiatan organisasi harus dilakukan atas izin dari kepolisian dan kehakiman. Pada masa

pendudukan Jepang, aktivitas organisasi marga hanya terbatas pada pelaksanaan perayaan hari-hari besar Tionghoa dan sembahyang rutin kepada leluhur, sementara organisasi sosial budaya dan kematian Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong, membatasi aktivitas mereka pada prosesi kematian yang dilakukan secara sederhana dan sembahyang kepada leluhur masing-masing. Meskipun aktivitas pada periode Jepang juga dapat dikatakan tidak terlaksana sebagaimana masa Kolonial Belanda, namun kedua organisasi ini dapat di katakan mengalami kefakuman.

Memasuki era kemerdekaan organisasi Tionghoa juga masih berada posisi yang tidak menentu. Kondisi politik yang tidak berpihak menyebabkan organisasi Tionghoa berjalan statis dan organisai sosial, budaya, dan kematian Hok Tek Tong dan Heng Beng Tong berperan aktif menjaga keamanan Kampung Pondok bekerjasama dengan Cung Hua Cung Hui. Disamping itu beberapa orang Tionghoa Padang secara individu membantu perjuangan kemerdekaan dan gerakan PDRI, dan PRRI (1958) dengan memberikan, suplai senjata dan makanan. Meskipun secara ekonomis individu Tionghoa tersebut diuntungkan tetapi secara politis terbina hubungan dan dukungan kelompok etnis terhadap situasi politik lokal di Sumatera Barat.

Pasca gerakan 30 September 1965 terjadi perubahah politik negara dimana dugaan keterlibatan Tiongkok dalam Gerakan 30 S tersebut. Situasi ini menempatkan posisi etnis Tionghoa di Indonesia pada posisi yang sulit. Hal ini juga dirasakan oleh etnis Tionghoa Padang. Terutama setelah digunakan aksara, symbol-symbol yang berkaitan dengan aksara Tionghoa. Perubahan situasi politik ini berdampak luas terhadap kehidupan etnis Tionghoa selanjutnya di Indonesia termasuk terhadap keberadaan organisai sebagai elemen yang melestraikan kebudyaan leluhur Tionghoa. Melalui BAKOM–PKB organisasi Tionghoa Padang bekerjasama mensosialisasikan dan mengurus pengurusan status kewarganegaraan Indonesia.

Meskipun kontrol Negara pada masa Orde Baru terhadap kebudayaan dan kehiduapan sosial, budaya, dan politik sangat ketat, namun Padang memberikan ruang kepada etnis Tionghoa Padang untuk melestarikan budaya melalui

organisasi walaupun hanya terbatas pada aktivitas intern di dalam organisasi saja. Perubahan yang signifikan terjadi pada masa Reformasi, dimana etnis Tionghoa diberikan kebebasan untuk mengekspos kebudayaan mereka untuk konsumsi umum. Kebudayaan ini bisa tetap terjaga karena sebelumnya mereka tetap aktif melestarikan kebudayaan tradisionalnya. Sehingga masa reformasi terjadilah ekspos budaya etnis Tionghoa secara besar-besaran hal ini dibuktikan melalui penghargaan yang banyak diterima oleh organisasi etnis Tionghoa seperti Himpunan Tjinta Tema dan Himpunan Bersatu Teguh. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa organisasi Tionghoa Padang selama perjalanan sejarah Indonesia telah mampu mempertahankan eksistensinya, walaupun baru terekspos setelah masa Reformasi berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulah Dahana dan Nusron Wahid, 2005, *Telapak Sejarah Sam Po Kong: Menelusuri Perang Cina Dalam Penyebaran Islam di Indonesia*, Jakarta: DPP Golkar dan Suara Karya.

Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* Jakarta: Gunung Agung.

Bernard Phillipe Groslier, 2007, *Indocina:Persilangan Kebudayaan*, Jakarta : KPG.

Buku Kenangan 120 Tahun Himpunan Keluarga Tan Padang, Padang 29 Maret 2008.

Charles A. Chopel, 1994, *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Christine *Dobbin, 1992, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah : Sumatera Tengah*, Jakarta : INIS.

Comber Leon, 2009, *The Triads: Chinese Secret Societies in 1950's,* Singapore: Singapore Heritage Society.

Daradjadi, 2013, *Geger Pacinan 1740-1743: Persekutuan Tionghoa- Jawa Melawan VOC*, Jakarta: Kompas, 2013.

David CL Ch'ng, 1995, *Sukses Bisnis Cina Perantauan: Latar Belakang, Praktek Bisnis, dan Jaringan Internasional,* terj., Jakarta: PT. Grafiti.

David Mozinga, 1976, *Chinese Policy Toward Indonesia 1949-1967*, Cornell University Press, Ithaca and London.

Departement van Justitie, Ochtendrapport van 5 September 1895 No.1.

Desi Ratna Wulan Sari, 2011, *Konstruksi Gender Berbasis Etnik Kajian Feminis Multikultural Studi Kasus: Perkumpulan Tionghoa di Padang Sumatera Barat*, *Tesis*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Dicky Lopulalan, 1999, *Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial,* Jakarta : LSPP.

Dr.J. Voute civ.ing, 1933, *Annalen V.D Bosscha- Sterrenwacht Lembang* (Java), Volume 1, Bandung : Gbrs Kleijne & Co.N.V.

Elizabeth. E. Grave, 1981, *The Minangkabau respons to Dutch Colonial Rule in The Nineteenth Century* (Monografi) New York : Cornell University Press.

Erniwati, 2007, *Asap Hio di Ranah Min*ang: Komunitas Tionghoa Di Sumatera Barat, Yogyakarta: Ombak.

Freek Colombjin, 2006, *Poco-Poco (Kota) Padang : Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Pada Abad 20 dan Penggunaan Ruang Kota,* Yogyakarta : Ombak.

G. William Skrinner, 1981, "Golongan Minoritas Cina" dalam Mely G. Tan, *Golongan Etnis Cina di Indonesia,* Jakarta: PT. Gramedia.

Ger Teitler, 2002, "de Marine en de Verenigde Oost – Indhische Companie", in *Gerrit Knaap en Ger Teitler, Oost – Indhische Companie*, Leiden : KITLV Press.

Goerge Theodorson & Achilles G. Theodorson, 1979, *A Modern Dictionary of Sociology*, New York, Hagerstown, San Fransisco, London : Bernes & Noble Books.

Heidhues Soomers Mary, 2008, *Penambang Emas, Petani, Pedagang di Distrik Tionghoa* Kalimantan Barat, Jakarta : Nabil.

J.L Vleming, 1988, *Kongsi dan Spekulasi: Jaringan Bisnis Cina*, Jakarta: Pustaka Utama.

J.L. Vleming, 1992, "The Chinese Business Community in Netherlands India", dalam M.R. Fernando, *Chinese Economic Activity in Netherlands India : Selected Translation from the Dutch,* Singapore : Institute of Southeast Asia Studies.

James C. Rush, 2007, *Opium to Java : Revenue Farming and Chinese Entreprise in Colonial Indonesia 1860-1910*, Singapore : Equinox Publ.

Jane Drakard, 2004, *A Malay Fronteir*: *Unity And Duality In A Sumatera Kingdom*, Ithaca: Coronel Southeast Asian program.

Jean Chesneaux, 1991, *Serikat Rahasia Cina*, Jakarta : Grafiti.

Jennifer Cushman&Wang Gungwu, 1991, Perubahan *Identitas Orang Cina di Asia Tenggara,* Jakarta: PT. Temprin.

John Wong, 1987, *Politik Perdagangan Cina di Asia Tenggara*, Jakarta: Aksara.

Junus Jahja, *Garis Rasial Garis Usang: Liku-Liku Pembaharuan,* Jakarta: Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Penghayatan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB).

Justian Suhandinata, 2009, *WNI Keturunan Tionghoa: Dalam Stabilitas Ekonomi& Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Koesalah Soebagyo Toer, 1999, *Kronik Revolusi Indonesia, Volume 2,* Jakarta : KPG.

Leo Suryadinata, 1990, *Mencari Identitas Nasional : Dari Tjoe Baou San Sampai Yap Thiam Hien*, Jakarta: LP3ES.

Mardans Syofwan, Ishaq Taher, dkk, 1987, *Sejarah Kota Padang*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Memoar Ang Yan Goan, 2009, *SINPO: Tokoh Pers Tionghoa Yang Peduli Pembangunan Bangsa*, Jakarta: Yayasan Nabil.

Mestika Zed, 1998, *Kota Padang Pada Masa Revolusi 1945-1950, Hasil Penelitian*, Kerjasama Pemerintah TK. II Kodya Padang dengan DHD 45 Sumatera Barat, Padang.

Mohd. Gede Ismail, 1981, *Konflik Antara Kongsi Thay Kong dan Sekutu-Sekutunya dengan Pemerintah Hindia Belanda di Kesultanan Sambas Tahun 1850,* Yogyakarta: UGM Press.

Mona Lohanda, 2001, *The Kapitan Cina Of Batavia 1837-1942*, Indonesia : Djambatan.

Muchtar Naim, 1972, *Merantau dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan daerah Sumatera Barat.* Padang: Pusat Penelitian Minangkabau.

Nasrul Hamdani, 2011, *Komunitas Cina di Medan : Dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960*, LIPI Press : Jakarta.

Natasya Yunita Sugiastuti, *2003, Tradisi Hukum Cina : Negara dan Masyarakat Studi Mengenai Peristiwa-Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman*

Kolonial (1870-1942), Disertasi, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.

Onghokham, 2009, *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, Depok : Komunitas Bambu.

P. Tjiook Liem, 2009, *De Rechtspositie der Chinezen in Nederlands Indie 1848-1942*, Amsterdam: Leiden Univ.Press.

Patricia Bjaaland Welch,2008, *Chinese Art: a Guide to Motifs and Visual Imagery*, Singapore: Tutling Publ.

Pax Benedanto, 2007, *Kesusastraan Melayu dan Kebangsaan Indonesia, Jilid 10,* Jakarta : KGP.

Pramoedia Ananta Toer, 1998, *Hoakiau di Indonesia*, Jakarta: Garba Budaya.

Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, Ediati Kamil, 2003, *Kronik Revolusi Indonesia, Jilid IV (1948),* Jakarta : KPG.

Pratiwo, 2010, *Arsitektur Tradisional Cina dan Perkembangan Kota*, Yogyakarta : Ombak.

Rusli Amran, 1981, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Rusli Amran, 1988, *Padang Riwayatmu Dulu*, Padang: CV. Yasaguna.

Schlegel Gustave, 1866, *Thian Ti Hwui. The Hung Leagueoe, Heaven-Earth League: A Secret Society With The Chinese in China and India*, Batavia: Jakarta.

Siauw Giok Tjhan (ed), 2010, *Renungan Seorang Patriot Indonesia,* Jakarta: Lembaga Kajian Sinergi Indonesia.

Soewarsono, 1999, *Orang Cina di Bandung: Sebuah Keterputusan Sejarah,* Mely G. Tan (ed), *Etnisitas dan Konflik Sosial,* Jakarta: PMB-LIPI.

Soewarsono, 2000, Surabaya : Kota, Penduduk dan Hubungan Antar Kelompok", Thung Ju Lan (ed), *Etnisitas dan Integrasi di Indonesia : Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : PMB-LIPI.

Staf Umum Angkatan Darat-I, 1961, *Masalah Cina Di Indonesia*, Djakarta : Angkatan Darat.

Tanpa Pengarang, 1989. *Padang Pintu Gerbang Pantai Barat Indonesia, Padang*: Sumatera Offset Padang.

Twan Peck Yang, 2004, *Elite Bisnis Cina di Indonesia*, Yogyakarta: Hangar Kreatoe.

W. Anwar Falah, Riza Mutia, Lisa Dwiyana, 2007, *Menyingkap Riwayat Dan Pesona Kota Padang Lama Yang Tersisa*, Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya, UPTD Museum Adityawarman.

William Harrison Du Puy, 1893, *Encyclopedia Britannica: a Dictionary of Art, Science and General Literature, Volume 22*, Chicago: Werner Co.

Yerry Wirawan, 2013, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar Dari Abad ke 17 Hingga Ke-20*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Yin Cheong Cheng, 2005, *New Paradigm for Reengineering Education: Globalization, Localization and Individualization,* Dordrecht : Springer.

ARSIP DAN KORAN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman, Padang 12 Juni 1987; *Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong*, Padang 4 Juni 1924.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Tjinta Teman Padang, Padang : Pengurus Himpunan Tjinta Teman Padang, 12 Juni 1987

ANRI, Besluit, 21 Juli 1918, no. 41, bundle Alg. Secretarie.

Badan Koordinasi Masalah Cina, 1979, *Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia*, Jakarta:Bakom.

Besluit no. 38 tanggal 21 September 1909

Besluit van Commisaries Generaal no 1 tanggal 24 November 1826.

Besluit, tanggal 31 December 1895, nomor 62

Brief Gouvernements Secretaris no 2775 Buitenzorg 31 Desember 1895.

Daftar-Pelindung-Ketua-Kehormatan-Penasehat-Toako-Jiko-Shako Heng Beng Tong Pusat Padang periode 1989-1995, Padang 24 April 1991

E. Netscheer, *Padang Inthelast der XVIII*, Batavia: Batavia Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen.

Encyclopaedie III tahun 1919.

Harian Padang ekspres, 8 Februari 2009.

Harian Padang Ekspress, 8 Februari 2009.

H.Ran Dewall, " Opstand der Chinezen van Monteradoe, Weskust-Borneo 1853-54", *Manuskrip koleksi KITLV H.83.*

Hoa Po, no 033 tanggal 14 Agustus 1915 *"Chabar THHK Padang Ay Kok Koan".*

Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong, Padang, 4 Juni 1924

Indische Staatreglement (IS) 1925.

Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/1967

Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Padang, Leaflet KAN Kota Padang. Jl. Karia Kota Padang.

Kiriman Cinang Gho Ing Tiong.

Masyarakat, no. 5 tahun ke 2, Selasa Pn 16 April 1946.

Monumen di depan Klenteng Sie Hien Kiong lama Padang.

Nederlandsch Onderdanschap van niet Nederlanders 1910 pasal 126

Notulen HTT, 12 Januari 2009

Notulen Hok Tek Tong , 21 September 1933.

Notulen Hok Tek Tong, 14 Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiatgweek 2494)

Notulen Hok Tek Tong, 2 Desember 1957

Notulen Hok Tek Tong, 20 Februari 1931.

Notulen Hok Tek Tong, 3 November 1946.

Notulen Hok Tek Tong, 4 Februari 1939.

Notulen Hok Tek Tong, 12 Januari 1947.

Notulen Hok Tek Tong, 12 Mei 1948.

Notulen Hok Tek Tong, 13 Februari 1948

Notulen Hok Tek Tong, 13 Juli 1948.

Notulen Hok Tek Tong, 14 (Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiatgweek 2494).

Notulen Hok Tek Tong, 14 (Djeen Sjowa 18/2603= 12 Gogweek 2494).

Notulen Hok Tek Tong, 14 Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiatgweek 2494).
Notulen Hok Tek Tong, 14 Jumat Sjowa 19/2604= 19 tjap dji gweei 2494
Notulen Hok Tek Tong, 8 Nichi 2 Gatsu Sjowa 18/2603= 4 tjhia gweek 2494.
Notulen Hok Tek Tong, 15 Juni 1946.
Notulen Hok Tek Tong, 15 Juni 1946.
Notulen Hok Tek Tong, 21 Mei 1953
Notulen Hok Tek Tong, 21 September 1947.
Notulen Hok Tek Tong, 23 Agustus 1945
Notulen Hok Tek Tong, 8 Februari 1946
Notulen Hok Tek Tong, 9 April 1946
Notulen Hok Tek Tong, 27 juni 1930.
Notulen Hok Tek Tong , 4 desember 1998
Notulen Hok Tek Tong, 1 Mei1998
Notulen Hok Tek Tong, 19 Juni 2000
Notulen Hok Tek Tong, 6 Oktober 1958
Notulen Hok Tek Tong,l 27 Mei 1978.
Notulen Hok Tek Tong, 1 Maret 2009
Notulen Hok Tek Tong, 14 September 1977.
Notulen Hok Tek Tong, 2 Agustus 2009
Notulen Hok Tek Tong, 28 Februari 2000
Notulen Hok Tek Tong, 4 desember 1998
Notulen Hok Tek Tong, 5 April 2000
Notulen Hok Tek Tong, 8 April 2012
Notulen Hok Tek Tong, 8 Desember 2010
Notulen Hok Tek Tong, 8 Januari 2010
Notulen Hok Tek Tong, 8 Maret 2011.
Notulen Hok Tek Tong, 8 September 2011
Notulen Hok Tek Tong, 8 September 2012
Notulen Hok Tek Tong, 1 April 1998
Notulen Hok Tek Tong, 1 April 1998
Notulen Hok Tek Tong , 1 Februari 1988.

Notulen Hok Tek Tong, 1 Februari 2000
Notulen Hok Tek Tong, 10 September 2013
Notulen Hok Tek Tong, 12 Juli 2009
Notulen Hok Tek Tong, 13 Desember 1978
Notulen Hok Tek Tong, 16 Juni 1986
Notulen Hok Tek Tong, 18 Agustus 1979
Notulen Hok Tek Tong, 19 Juni 2000
Notulen Hok Tek Tong, 19 Juni 2000
Notulen Hok Tek Tong, 2 Februari 1998
Notulen Hok Tek Tong, 24 Mei 1979
Notulen Hok Tek Tong, 24 Mei 1979
Notulen Hok Tek Tong, 24 Mei 1979.
Notulen Hok Tek Tong, 27 Juni 2002
Notulen Hok Tek Tong, 28 Mei 1979
Notulen Hok Tek Tong, 31 Januari 1979.
Notulen Hok Tek Tong, 4 Mei 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 April 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 April 2000
Notulen Hok Tek Tong, 5 Januari 1998.
Notulen Hok Tek Tong, 5 Januari 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 Juli 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 November 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 Oktober 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 Februari 1999
Notulen Hok Tek Tong , 14 djeen sjowa 18/2603=12 gogweek 2494.
Notulen Hok Tek Tong, 8 Nichi, 2 Gatsu Sjowa 18/2603= 4 Tjhia Gweek 2494, Senin 14 Djeen Sjowa 18/2603=12 Gogweek 2494, 14 Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiagweek 2494), dan 14 Jumat Sjowa 19/2604= 19 Tjap Dji Gweei 2494.
Notulen Hok Tek Tong, 12 Januari 1947
Notulen Hok Tek Tong, 12 Mei 1948.
Notulen, Hok Tek Tong, 9 April 1946

E. Netscheer, *Padang Inthelast der XVIII*, Batavia: Batavia Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen.

Encyclopaedie III tahun 1919.

Harian Padang ekspres, 8 Februari 2009.

Harian Padang Ekspress, 8 Februari 2009.

H.Ran Dewall, " Opstand der Chinezen van Monteradoe, Weskust-Borneo 1853-54", *Manuskrip koleksi KITLV H.83.*

Hoa Po, no 033 tanggal 14 Agustus 1915 *"Chabar THHK Padang Ay Kok Koan".*

Huishoudelijk Reglement, Heng Beng Tong, Padang, 4 Juni 1924

Indische Staatreglement (IS) 1925.

Instruksi Presidium Kabinet No.37/U/IN/1967

Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kota Padang, Leaflet KAN Kota Padang. Jl. Karia Kota Padang.

Kiriman Cinang Gho Ing Tiong.

Masyarakat, no. 5 tahun ke 2, Selasa Pn 16 April 1946.

Monumen di depan Klenteng Sie Hien Kiong lama Padang.

Nederlandsch Onderdanschap van niet Nederlanders 1910 pasal 126

Notulen HTT, 12 Januari 2009

Notulen Hok Tek Tong , 21 September 1933.

Notulen Hok Tek Tong, 14 Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiatgweek 2494)

Notulen Hok Tek Tong, 2 Desember 1957

Notulen Hok Tek Tong, 20 Februari 1931.

Notulen Hok Tek Tong, 3 November 1946.

Notulen Hok Tek Tong, 4 Februari 1939.

Notulen Hok Tek Tong, 12 Januari 1947.

Notulen Hok Tek Tong, 12 Mei 1948.

Notulen Hok Tek Tong, 13 Februari 1948

Notulen Hok Tek Tong, 13 Juli 1948.

Notulen Hok Tek Tong, 14 (Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiatgweek 2494).

Notulen Hok Tek Tong, 14 (Djeen Sjowa 18/2603= 12 Gogweek 2494).

Notulen Hok Tek Tong, 14 Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiatgweek 2494).
Notulen Hok Tek Tong, 14 Jumat Sjowa 19/2604= 19 tjap dji gweei 2494
Notulen Hok Tek Tong, 8 Nichi 2 Gatsu Sjowa 18/2603= 4 tjhia gweek 2494.
Notulen Hok Tek Tong, 15 Juni 1946.
Notulen Hok Tek Tong, 15 Juni 1946.
Notulen Hok Tek Tong, 21 Mei 1953
Notulen Hok Tek Tong, 21 September 1947.
Notulen Hok Tek Tong, 23 Agustus 1945
Notulen Hok Tek Tong, 8 Februari 1946
Notulen Hok Tek Tong, 9 April 1946
Notulen Hok Tek Tong, 27 juni 1930.
Notulen Hok Tek Tong , 4 desember 1998
Notulen Hok Tek Tong, 1 Mei1998
Notulen Hok Tek Tong, 19 Juni 2000
Notulen Hok Tek Tong, 6 Oktober 1958
Notulen Hok Tek Tong,l 27 Mei 1978.
Notulen Hok Tek Tong, 1 Maret 2009
Notulen Hok Tek Tong, 14 September 1977.
Notulen Hok Tek Tong, 2 Agustus 2009
Notulen Hok Tek Tong, 28 Februari 2000
Notulen Hok Tek Tong, 4 desember 1998
Notulen Hok Tek Tong, 5 April 2000
Notulen Hok Tek Tong, 8 April 2012
Notulen Hok Tek Tong, 8 Desember 2010
Notulen Hok Tek Tong, 8 Januari 2010
Notulen Hok Tek Tong, 8 Maret 2011.
Notulen Hok Tek Tong, 8 September 2011
Notulen Hok Tek Tong, 8 September 2012
Notulen Hok Tek Tong, 1 April 1998
Notulen Hok Tek Tong, 1 April 1998
Notulen Hok Tek Tong , 1 Februari 1988.

Notulen Hok Tek Tong, 1 Februari 2000
Notulen Hok Tek Tong, 10 September 2013
Notulen Hok Tek Tong, 12 Juli 2009
Notulen Hok Tek Tong, 13 Desember 1978
Notulen Hok Tek Tong, 16 Juni 1986
Notulen Hok Tek Tong, 18 Agustus 1979
Notulen Hok Tek Tong, 19 Juni 2000
Notulen Hok Tek Tong, 19 Juni 2000
Notulen Hok Tek Tong, 2 Februari 1998
Notulen Hok Tek Tong, 24 Mei 1979
Notulen Hok Tek Tong, 24 Mei 1979
Notulen Hok Tek Tong, 24 Mei 1979.
Notulen Hok Tek Tong, 27 Juni 2002
Notulen Hok Tek Tong, 28 Mei 1979
Notulen Hok Tek Tong, 31 Januari 1979.
Notulen Hok Tek Tong, 4 Mei 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 April 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 April 2000
Notulen Hok Tek Tong, 5 Januari 1998.
Notulen Hok Tek Tong, 5 Januari 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 Juli 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 November 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 Oktober 1999
Notulen Hok Tek Tong, 5 Februari 1999
Notulen Hok Tek Tong , 14 djeen sjowa 18/2603=12 gogweek 2494.
Notulen Hok Tek Tong, 8 Nichi, 2 Gatsu Sjowa 18/2603= 4 Tjhia Gweek 2494, Senin 14 Djeen Sjowa 18/2603=12 Gogweek 2494, 14 Agustus Sjowa 18/2603 (14 Tjiagweek 2494), dan 14 Jumat Sjowa 19/2604= 19 Tjap Dji Gweei 2494.
Notulen Hok Tek Tong, 12 Januari 1947
Notulen Hok Tek Tong, 12 Mei 1948.
Notulen, Hok Tek Tong, 9 April 1946

Padang 21 April 1997 (Shangwee Capgo, 2548 Imlek), disusun oleh Gho Tjeng Lie, berdasarkan kepada penuturan Lauwtoako Gho Hun Tjeng pada pengurus dan anggota perkumpulan keluarga Gho.

Presidium Kabinet No.127/U/KRP/1968

Regering Reglement (RR) 1885 pasal 270

Reglement Kecil Hok Tek Tong, Pasal 33 tahun 1894.

Reglement Ketjil Hok Tek Tong, Pasal 20 tahun 1894.

Reglement Peratoeran dari Kongtie Heng Beng Tong, Fort de Kock 17 April 1899

S.M. Latif, *Moehamad Saleh Datuak Orang Kaya Besar*, (13 Rabi'ul awal 1257 - 8 Jumadi'l Ackir 1338), Bogor.

Memori Van Overgrave Van De Aftremendende Resident Van Sumatera Westkust, (tanpa Judul)

Algeemene Secretarie Statblaad no 290 tahun 1905.

Staatsblad no. 129 tahun 1917.

Staatsblad no. 79 tahun 1895

Staatsblad tahun 1835 No. 37.

Stablaad no 151 tahun 1906.

Sumatera Bode, 19 Desember 1941.

Statuten dan Huishoudelijk Reglement (Reglement Ketjil) dari Vereeniging Long Se Tong Padang, De Volharding Padang, 1932.

Statuten Van de Vereniging Hok Tek Tong Padang Sumatra Weskust, Pasal 8 tahun 1894.

Struktur Pengurus Himpunan Bersatu Teguh periode masa bakti 1976-1980; 1981-1985; 1986-1990; 1991-1996.

Surat Ketetapam Gubernur Militer Nomor 008/KDM/49 dan Surat Kuasa No. 003/KDM/49 tanggal 26 Januari 1949.

Ta Kung Pao, desember 20, 1959, trans in survey of China Mainland Press (SCMP), No 2164 (Desember 18, 1959).

Terjemahan, Genta di Klenteng Sie Hien Kiong Padang.

WAWANCARA

Wawancara dengan Ardian Cangianto, Padang 7 November 2014.

Wawancara dengan Haryono Pribadi, Padang 21 April 2009.

Wawancara dengan HBT Payakumbuh, Payakumbuh 23 November 2013 .

Wawancara dengan Johannes Ridwan, Padang 10 Desember 2008.

Wawancara dengan Lian Tjin Tek, Jakarta 20 Januari 2011.

Wawancara dengan Sinshe, Sekretaris HBT Padang, Padang 14 Juni 2014..

Wawancara dengan Tuako, Jiko, Sekretaris, HBT Payakumbuh 23 November 2013.

Wawancara dengan Laushe, Era Tekhnika Padang 10 Maret 2014.

Wawancara dengan Mama Kristine Hakim, Padang 19 Desember 2008.

Wawancara dengan pengurus marga Lim, Padang 15 November 2014.

Wawancara dengan pengurus marga Ong, Padang 17 November 2014.

Wawancara HBT Padang, Padang 14 Juni 2014.

Wawancara dengan Chandra Penata Long, Padang 6 November 2014.

Wawancara, Jakarta 3 Desember 2009.

Wawancara, Jakarta 14 Desember 2009.

Wawancara dengan Lie Tju Kui, Olo Ladang 13 Maret 2013.

Wawancara, Padang, 6 Maret 2009

Wawancara, Sekretaris Heng Beng Tong Padang Panjang, 23 November 2013